Dr. Si Luh Nyoman Seriadi, S.Pd.,S.Ag.,M.Pd

PEREMPUAN HINDU DALAM LINGKARAN POLITIK DI BALI

IHDN PRESS

2019

PEREMPUAN HINDU
DALAM LINGKARAN POLITIK DI BALI

Penulis
Dr. Si Luh Nyoman Seriadi, S.Pd., S.Ag., M.Pd.

Penerbit
IHDN Press
2019

ISBN: 978-602-53968-2-3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Judul:
Perempuan Hindu dalam Lingkaran Politik di Bali

Penulis:
Dr. Si Luh Nyoman Seriadi, S.Pd., S.Ag., M.Pd.

Diterbitkan oleh:
IHDN PRESS

ISBN: 978-602-53968-2-3

Redaksi:
Jalan Ratna No. 51 Denpasar
Kode Pos 80237
Telp/Fax: 0361 226656
Email: ihdnpress@gmail.com / ihdnpress@ihdn.ac.id
Web: ihdnpress.ihdn.ac.id / ihdnpress.or.id

Cetakan pertama: Januari 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Pengantar Penulis

Om Swastyastu,

Puja dan puji penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat rahmat-Nya Buku ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul "Perempuan Hindu dalam Lingkaran Politik di Bali". Karena jarangnya buku-buku yang berbicara tentang ini, tentu karya ini nantinya dapat memberikan motvasi sehingga para perempuan Hindu mau ikut terjun di bidang politik.

Penulis memilih judul ini sebagai upaya untuk lebih mendalami kajian agama Hindu yang dituangkan dalam judul" Perempuan Hindu dalam Lingkaran Politik di Bali". Ada banyak masalah yang dipaparkan tentang isu-isu ini, seperti penyebab lemahnya partisipasi politik perempuan Hindu di Bali, mengenai sejauh mana eksistensi perempuan Hindu dalam kegiatan politik di Bali dan implikasi kegiatan politik perempuan Hindu di Bali. Pergulatan ketika permasalahan inilah yang dinarasikan secara luas oleh penulis sehingga membentuk sebuah diaroma bagaimana semestinya perempuan Bali bersikap, terutama dalam partisipasinya dalam politik praktis.

Melalui buku ini diharapkan terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif dan berdampak pada semakin meningkatnya partisipasi politik perempuan Hindu di Bali. Sebagaimana pepatah tiada gading yang tak retak, tiada hal yang sempurna di dunia ini, demikian juga penulisan buku ini tidak terlepas dari banyak kekurangan. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga karya ini bisa diterbitkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat umum.

Om santih santih santih Om.

Denpasar, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

(*halaman*)

PENGANTAR PENULIS iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN HINDU DALAM PEMILU 8
2.1 Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Hindu 8
2.2 Perempuan Relatif Awam Berpolitik 49
2.3 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen 53

BAB III EKSISTENSI PEREMPUAN HINDU DALAM KEGIATAN POLITIK 60
3.1 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Politik Menurut Pandangan Sastra 60
3.2 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Pandangan Politik di Bali 67
3.3 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Kegiatan Politik di Kabupaten Badung 74
3.4 Hambatan Berpolitik Perempuan Hindu di Kabupaten Badung 79
3.5 Membuka Jalur Politik Perempuan Hindu di Kabupaten Badung 83

BAB IV IMPLIKASI KEGIATAN POLITIK PEREMPUAN HINDU PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN BADUNG 88
4.1 Implikasi Pada Bidang Politik dan Sistem Demokrasi..... 88
4.2 Implikasi Pada Bidang Sosial Budaya 92
4.3 Implikasi Pada Kebijakan Publik..... 98
4.4 Implikasi Pada Dunia Pendidikan..... 109
4.5 Implikasi Pada Perencanaan Karir Perempuan.. 116

BAB V PENUTUP 126
5.1 Simpulan..... 126
5.2 Saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

Wanita Bali masih cenderung awam berpolitik. Budaya patriarki seolah telah menggariskan bahwa wanita cenderung hanya mengambil peran domestik dan ritual. Panggung politik di Bali seolah menjadi milik laki-laki. Geliat politik perempuan di Bali baru terlihat seiring dengan isu keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dan telah menjadi isu pembahasan hangat dalam beberapa tahun belakangan. Walau demikian, sejumlah perempuan Hindu Bali sudah mengambil peran politik, namun keterwakilannya dianggap masih sangat minim.

Hingga saat ini, perempuan Hindu Bali masih merupakan pemain pemula dalam percaturan politik. Terlebih dalam pencalonan menjadi anggota legeslatif, perempuan masih dianggap sebagai pelengkap dan syarat bagi parpol dalam mengajukan calon. Bahkan disinyalir, perempuan yang merupakan pemain baru kerap dicurangi dengan berbagai cara sehingga tidak mampu lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam berbagai pertemuan calon legeslatif perempuan mengeluhkan, berbagai diskriminasi dialami oleh calon legeslator perempuan yang mengarah pada upaya memupus peran dan kesempatannya berpolitik. Sejumlah calon legislator perempuan mengeluhkan, mereka tidak memiliki keahlian sebagaimana layaknya pemain politik yang ulung menghadapi berbagai tipu daya yang disinyalir mengarah pada upaya mengalahkan perempuan dengan cara-cara yang tidak santun tersebut. Selain itu, sepintas tampaknya, perempuan Hindu Bali belum memiliki *skill* yang mumpuni untuk berkarir di bidang politik yang penuh dengan persaingan politis. Hal ini tentu saja akan berpengaruh

terhadap tingkat partisipasi politik perempuan. Dalam ajaran Hindu, tidak ada batasan perempuan dalam mengambil peran dalam kehidupan, termasuk peran politik.

Dalam ajaran Veda perempuan memiliki peran yang sangar besar dalam kehidupan. Kitab suci Veda menyebutkan sejumlah nama perempuan sebagai para *Brahmavādinī* antara lain: *Viṣvavārā, Apālā, Ghoṣā, Godhā* istri dari *Vasukra*, saudara perempuan dari *maharṣi Agastya, Lopāmudrā, Ṣaṣvatī* dan *Romaṣā*. Di samping nama-nama tersebut ada lagi *Vāch* (Sushil, 1982:130). Selain tokoh-tokoh *Brahmavādinī* di atas, di dalam kitab-kitab Upaniṣad terdapat tokoh-tokoh yang dikenal sebagai wanita ideal dan ahli filsafat, yaitu: *Maitreyī, Kātyāyanī*, yang merupakan dua istri dari *Yājñvalkya*, seorang maharsi yang sering dan amat dominan disebutkan di dalam kitab-kitab Upaniṣad. Tokoh wanita lainnya adalah *Gārgī*, yang merupakan putra seorang tokoh atau pahlawan yang berasal dari kota Banares.

Tokoh-tokoh wanita ideal lainnya disebutkan dalam kitab-kitab Itihàsa dan Purāṇa, khususnya dalam Rāmāyaṇa, antara lain: *Anasūyā* (seorang wanita pertapa dan Jñānin yang pernah bertemu memberi nasehat kepada Rāma, Sitā dan Lakṣamaṇa), Ṣabarī (seorang bhakta yang tulus dan merupakan abdi dari maharṣi Mataga), Svayamprabha (pertapa wanita yang memberikan bantuan kepada Sang Hanūman), Ahalyā (istri maharṣi Gautama), Saramā (wanita yang ditugaskan oleh Ràvaṇa untuk menjaga Dewi Sitā), Trijaṭā (putra Vibhīsaṇa yang sangat telaten melayani dan melindungi Dewi Sitā), Mandodarī (istri Rāvaṇa), Tara (istri Sugriva yang dilarikan oleh Subali), Kausalyā (ibu Śrī Rāma), Sumitrā (ibu dari Lakṣamaṇa dan Satrughna), Sītā (istri Śrī Rāma) (Nihshreyasananda, 1982:142-16). Dalam Mahābhārata, antara lain: Kuntī (ibu dari Pandava), dan Draupadī (istri dari Pandava/Tripurari Chakravarti, 1982:173-176). Di samping itu terdapat juga: Śakuntalā (leluhur raja-raja Hastina/Pandava dan Kaurava), Damayantī

(istri Prabhu Nala), dan Savitrī (putri maharaja Aṣvapati) (Suniti, 1982:205, 214).

Di dalam kitab-kitab Purāṇa dapat dijumpai nama seorang wanita ideal, yaitu: Devahūtī (ibu dari maharṣi Kapila, seorang tokoh dan pendiri dari filsafat Saṅkhya atau Saṅkhya Darṣana) (Rajendra, 1982: 229). Demikianlah, dalam Veda dan susastra Hindu banyak dijumpai tokoh-tokoh wanita yang memberikan pengaruh sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Selain itu, juga dikenal Mira Bai, seorang wanita yang memiliki bhakti luar biasa kepada Shri Krishna. Wanita dalam Veda memiliki citra yang luar biasa dan tidak ada dalam sejarah Hindu wanita memiliki kedudukan lebih rendah. Namun demikian, tradisi dan kebudayaan lokal serta pengaruh dari peradaban yang memposisikan wanita lebih rendah kerap masuk memberikan warna yang berbeda dari ajaran Veda. Namun demikian dalam susastra Hindu tidak dipungkiri juga terdapat sejumlah nama-nama tokoh wanita yang tidak patut untuk ditiru, yang memberikan warna negatif pada peradaban.

Walau citra dalam ajaran Veda sangat luar biasa. Namun dalam sejarah panjang peradabannya juga ada masa-masa gelap bagi kaum wanita. Pada jaman Buddha, wanita kedudukannya rendah dan dikait-kaitkan dengan pria, suami, saudara laki-laki atau ayah. Ia bukan individu yang mempunyai hak atas dirinya. Bahkan wanita yang tidak menikah dianggap terkutuk dalam keluarga. "seorang wanita seharusnya tidak dilahirkan. Bila terlahir, harus menikah atau dikubur. Inilah kondisi masyarakat dimana Sang Buddha (walau dengan segan) membuka pintu *Sangha* bagi kaum wanita agar supaya mereka yang sendirian (tidak menikah) dapat hidup bebas dalam karirnya dibidang keagamaan. Inilah tindakan yang sangat berani dan revolusioner. Bhikkuni Sasana yang didirikan Sang Buddha 2500 tahun yang lalu adalah organisasi pertama kaum wanita

yang tercatat dalam sejarah. Maha Prajapati Gotami, ibu asuh Sang Buddha bersama 500 orang wanita dengan rambut yang telah dicukur bersih berbaris dalam satu prosesi untuk menghadap Sang Buddha, memohon kepada beliau agar mereka dapat menerima pabbajja atau ditahbiskan menjadi Bhikkuni (Devaraya, 1987:29).

Gerakan protes ini awalnya tentu saja membuat Sang Buddha dihujat oleh para Brahmana ortodoks yang tidak mengakui kerohanian perempuan. Akan tetapi gerakan ini justru membuat Hindu sebagai agama induk melihat kembali ke dalam isi kitab sucinya yang penuh berisi cerita kehidupan wanita yang lebih dari seorang istri atau seorang ibu semata. Hingga kini Buddhis adalah satu-satunya agama yang memiliki Brahmana wanita (Bhikkuni) dengan jumlah besar dan memiliki hak yang sama. Harus diakui banyak wanita Hindu yang sesungguhnya berkeinginan menjadi pendeta dengan tidak menikah terpaksa harus menunda dengan berumah tangga karena mengikuti 'peraturan' dari masyarakat.

Di Indonesia, muncul tokoh RA. Kartini sebagai tokoh perempuan dan adanya organisasi Poetri Mardika dan lain-lain menjadi penanda penting bagi perjuangan sosial dan kultural kaum wanita untuk mengangkat derajatnya sejajar dengan kaum pria dalam olah kemerdekaan bangsa (Sunarto. 2009: 126).

Dalam konteks demokratisasi dan perpolitikan di Indonesia, isu-isu gender selalu menjadi sebuah bahasan wajib para demokrat dan politisi. Isu gender merupakan sebuah *blue print* pemerintah dalam mengesahkan UU Pemilu. Konteks negara Indonesia, pemilu dibagi ke dalam beberapa agenda, yaitu pemilihan legislatif yang memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan negara, serta ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur

dan wakil gubernur sebagai pelaksana pemerintahan di provinsi, juga bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota sebagai pelaksana pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam pengajuan calon, setiap partai politik yang telah masuk dalam verifikasi di komisi Pemilihan Umum (KPU), beramai –ramai mengajukan dan memasukkan calon –calon legislatif (caleg) untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota. Pengajuan caleg adalah fase implikasi penting terhadap pergerakan perempuan di Indonesia. Namun partai politik tidak mengamanatkan Pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media cetak harian dan media elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kuota yang paling rendah.

Di Bali delapan puluh persen atau 44 dari 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali periode 2009-2014 adalah wajah baru. Sementara sisanya, 11 orang, adalah wajah lama yang telah menjabat pada periode sebelumnya. Dari total 55 anggota terpilih itu, hanya 4 orang perempuan yakni Hening Puspitarini (PDIP), Tuti Kusuma Wardani (Partai Demokrat), Utami Dwi Suryadi (Partai Demokrat) dan Ni Made Sumiati (PDIP). Jumlah ini sama dengan jumlah anggota DPRD Bali perempuan pada periode sebelumnya,

sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan Kuota perempuan[1].

Kuota perempuan adalah penetapan jumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan. Ide dasar dari sistim kuota adalah untuk memastikan agar perempuan masuk dan terlibat dalam posisi politik dan sekaligus juga untuk menjamin agar keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya sekedar simbol.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009. Peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Di Kabupaten Badung, peran politik perempuan sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama, walau perannya kurang dominan. Sebagai wilayah yang menganut budaya patrialki, peran politik laki-laki masih sangat dominan dibandingkan dengan perempuan yang selama ini fokus pada urusan upacara keagamaan dan domestik. Berbagai upaya sesungguhnya tampak dilakukan guna mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Badung, seperti upaya pendidikan politik perempuan melalui kegiatan seminar dan pelatihan. Akan tetapi perempuan Badung masih belum berjaya dalam pemilu 2014 di kabupaten ini. Ironisnya, setelah puluhan perempuan

1(http://politik.vivanews.com/news/read/58769dprd_bali_didominasi_legislator_baru)

mencalonkan diri dari berbagai partai, dari 40 kursi, hanya satu orang perempuan yang lolos dan ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung periode 2014-2019. Fenomena ini menunjukkan, bukan saja gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi juga peran politik perempuan masih sangat lemah bahkan belum menunjukkan kemajuan peran politik. Padahal kaukus politik perempuan dan berbagai organisasi yang peduli dengan peran politik perempuan seperti Bali Sruti tampak bekerja keras memperkenalkan calon legislator perempuan dan gencar mewacanakan peran perempuan dalam politik. Tetapi berbagai upaya ini tampaknya belum menunjukkan hasil dan kemajuan.

Dipilihnya Kabupaten Badung sebagai tempat penelitian karena kabupaten ini menjadi parameter di Provinsi Bali dalam berbagai segi seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan keagamaan. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang sangat gencar mewacanakan peran politik di Provinsi Bali. Berbagai organisasi dan kaukus politik perempuan Bali gencar melakukan berbagai aktivitas di kabupaten dengan APBD tertinggi di Bali ini. Menariknya, walau berbagai kegiatan politik perempuan gencar dilakukan, tetapi kemenangan perempuan justru menurun dari pemilu sebelumnya.

BAB II
RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN HINDU DALAM PEMILU

2.1 Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Hindu

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Huntington dan Nelson (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington dan Nelson, 1994). Dengan demikian sebagai warga negara baik wanita maupun laki-laki patut melaksanakan Partisipasi politiknya.

Di Kabupaten Badung, gambaran peran perempuan Hindu dalam dunia politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, desa sekalipun, masih didominasi kaum laki-laki. Bukan berarti tokoh politik dan pemimpin perempuan di bidang pemerintahan tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh dari imbang jika dibandingkan dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Padahal, secara statistik jumlah penduduk perempuan jumlahnya hampir sama dengan penduduk laki-laki.

Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki. Hal ini pula yang

menyebabkan sebagian besar laki-laki masih meng-*image*-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, bahwa perempuan mengikuti saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik, serta berbagai kesan patriarki lainnya. Hal tersebut di atas direpresentasikan pada data partisipasi politik perempuan Hindu di Pemilu Kabupaten Badung tahun 2009 dan 2014.

Tabel 1
Data partisipasi politik perempuan Hindu di Kabupaten Badung pada Pemilu Tahun 2009

No	Dapil	Jumlah Calon Terpilih		Total Calon Terpilih
		Perempuan	Laki-laki	
1	Dapil Badung I	1 orang	5 orang	6 orang
2	Dapil Badung II	0 orang	10 orang	10 orang
3	Dapil Badung III	0 orang	7 orang	7 orang
4	Dapil Badung IV	0 orang	10 orang	10 orang
5	Dapil Badung V	0 orang	7 orang	7 orang
Total		1 (2,5%)	39 (97,5%)	40 (100%)

Sumber: Panwaslu Badung (2009)

Pemilu legeslatif tahun 2009 menunjukkan perolehan suara legeslatif perempuan hanya 1 kursi atau terhitung 2,5 % yang berasal dari Dapil I Badung. Jadi dari jumlah 40 anggota legeslatif hanya satu orang perempuan. Kondisi yang serupa terjadi lima tahun berikutnya yakni pemilu legeslatif tahun 2014, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Data partisipasi politik perempuan Hindu di Kabupaten Badung pada Pemilu Tahun 2014

No	Dapil	Jumlah Calon Terpilih		Total Calon Terpilih
		Perempuan	Laki-laki	
1	Dapil Badung I	1 orang	4 orang	5 orang
2	Dapil Badung II	0 orang	6 orang	6 orang
3	Dapil Badung III	0 orang	7 orang	7 orang
4	Dapil Badung IV	0 orang	11 orang	11 orang
5	Dapil Badung V	0 orang	8 orang	8 orang
Total		**1 orang (2,7%)**	**36 orang (97,3%)**	**37 orang (100%)**

Sumber: Panwaslu Badung (2014)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa data partisipasi politik perempuan Hindu Kabupaten Badung dari tahun ke tahun terkesan stagnan dan tidak mengalami perubahan berarti. Proporsi keterwakilan masih sangat jauh dari harapan 30% kursi legislatif. Pemilu legeslatif tahun 2009, calon perempuan yang terpilih hanya 1 orang (2,7 %). Data ini tidak berubah pada tahun 2014 yakni hanya satu calon perempuan yang terpilih menjadi anggota legeslatif dalam proses pemilu legeslatif. Dua orang anggota dewan perempuan yang kini menjabat merupakan hasil dari proses pergantian antar waktu.

Meskipun menurut Huntington dan Nelson (1994:76) partisipasi politik tidak selalu soal menjadi pejabat pemerintah bahkan bisa pula dilakukan oleh warga negara biasa, namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi politik akan lebih terasa ketika individu ataupun kelompok yang bersangkutan berkecimpung langsung dalam proses di pemerintahan yang sarat akan manuver politik. Sehingga dalam kasus partisipasi politik perempuan, kiprahnya politiknya menjadi lebih mudah diukur jika ia terjun langsung dalam politik menjadi pejabat publik yang berhadapan langsung dengan ritme politik pembuatan kebijakan misalnya di ranah legislative atau sebagai anggota

legislatif. Keberadaan wanita sebagai anggota legislatif secara fisik berpengaruh terhadap partisipasi politik wanita itu sendiri.

Menurut Riniti Rahayu (2012: 4), Ketua LSM Bali Sruti, rendahnya jumlah perempuan dalam parlemen di Bali adalah karena adanya anggapan bahwa politik itu kotor dan lebih pantas untuk kaum laki-laki, bukan perempuan. Hal ini juga berbanding lurus dengan sikap perempuan yang merasa hanya cukup menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, dapur dan anak-anak. Di sisi lain kualitas caleg perempuan juga masih kalah dibandingkan laki-laki karena rendahnya pendidikan politik dan kaderisasi. Semua kendala tersebut semakin diperparah dengan masih kuatnya sistem patriarki di Bali.

Partisipasi perempuan Hindu dalam politik pada pemilu legislatif ini juga sangat rendah. Sangat sulit untuk mencari perempuan Hindu yang mau terjun dan berjuang penuh untuk maju dalam pileg. Sebagian besar yang maju hanya sebatas formalitas, demi memenuhi kuota agar partai bisa ikut mendaftar. Sebagian besar dari caleg perempuan Hindu ini belum memiliki track record di masyarakat, dan secara kaderisasi partai juga belum begitu mumpuni. Faktanya calon perempuan tidak siap bersaing di percaturan politik yang keras dan menuntut tidak hanya waktu saja, namun juga ongkos politik yang tidak sedikit.

Sesuai dengan teori hegemoni dalam pandangan Antoni Gramsci menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik. Ia beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang

mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcemant. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997: 81). Dalam konteks ini, keberadaan perempuan di panggung politik di Bali secara umum dan di Kabupaten Badung sebagai fokus penelitian terkondisi sesuai dengan alur yang dinyatakan oleh Gramsci. Secara umum dalam sejarah kehidupan masyarakat adat di Bali, dominasi telah terjadi sejak dahulu yang dibungkus dalam tatanan adat yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

Sesuai dengan pendapat Gramsci, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus (consenso) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat iu. Itulah sebabnya hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci, 1976: 244). Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara. Sesuai dengan teori ini, hegemoni laki-laki atas perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan politik seakan mencapai jalan panjang kemenangan,

yang telah masuk pada konsel kultural-ideologis, dimana perempuan menerima sebagai sebuah kewajaran bahkan takdir yang memang harus dijalani. Olehnya, ketika negara membutuhkan kehadiran perempuan di panggung politik dan ranah publik lainnya, benturan praktik hegemoni yang sudah kuat mengakar harus dilawan. Perempuan yang ingin berkiprah dalam bidang politik sudah tersandung akan konsep kultural-ideologis laki-laki dan perempuan dalam peran kewajaran. Tembok kokoh hegemoni seakan sangat sulit untuk ditembus walau dengan keterbukaan informasi dan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masyarakat. Akibatnya, perempuan tetap dalam posisi yang sub-ordinat dari laki-laki. Dominasi laki-laki dalam bidang politik di Kabupaten Badung memang sangat terbantu dari konsep-konsep hegemoni yang telah tertanam ratusan tahun sehingga perempuan masih cenderung sulit untuk mendobraknya.

Berangkat dari hal tersebut dan analisis yang dilakukan berdasarkan data lapangan, dapat disimpulkan berbagai faktor menjadi dasar penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan Hindu dalam Pemilu yakni budaya Patriarki, stigma politik hegemoni laki-laki, pembagian kerja keluarga Hindu, tingginya biaya politik (cost politic) rendahnya tingkat pendidikan perempuan Hindu Bali dan politik yang masih identik dengan kecurangan.

1. Budaya Patriarki yang Sangat Kuat

Pada mulanya kata "patriarki" memiliki pengertian sempit, menunjuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, dimana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarganya. Kadangkala, dinyatakan bahwa patriarki telah berakhir di sebagian besar Eropa Barat dalam abad ke-19 dengan dijaminnya hak-hak

kewarganegaraan perempuan, khususnya perempuan yan sudah menikah. Namun sekarang istilah "patriarki" mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga, dan hal ini berlanjut pada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. Patriarki merupakan sebuah konsep dimana laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat seperti dalam hal pemerintahan, militer, pendidikan, industri, kesehatan, adat, dan agama (Mosse, 2007: 49).

Budaya Patriarki dianggap menjadi salah satu batu sandungan utama bagi perempuan untuk melaju dalam karier politiknya. Budaya patriarki menyebabkansempitnya ruang gerak wanita. Segala hal yang dilakukan wanita, harus memperoleh izin dan dukungan dari suami, mertua, dan keluarga. Hal ini juga berlaku jika seorang perempuan hendak maju sebagai calon legislatif. Selain itu maju menjadi calon legislatif memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bali dengan budaya patriarkinya, menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama sedangkan wanita tidak memperoleh hak waris sama sekali. Dengan kata lain seorang perempuan harus mengupayakan sendiri *cost* politiknya jika ingin melaju sebagai calon legislatif. Hal ini menyebabkan sulit bagi wanita untuk memperoleh *cost* politik.

Selain itu, budaya patriarki menyebabkan posisi wanita dalam rumah tangga hanya sebatas mengurus urusan domestik (rumah tangga), adat, dan upacara agama. Ketika perempuan Bali sudah terlalu sibuk dalam mengurus urusan domestik, adat serta agama, maka mereka cenderung merasa sudah terlalu lelah untuk menambah kesibukan lainnya seperti kesibukan di dunia politik yang membutuhkan investasi waktu serta tenaga yang tidak sedikit. Tidak dipungkiri, wanita yang ingin berkiprah dalam dunia politik justru mendapat halangan dari laki-laki dalam hal ini suami

atau mertua. Sebab masih ada sejumlah suami yang tidak ingin istrinya yang tampil di depan melebihi suami.

Sistem patriarki yang mengakar kuat pada budaya masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik di masa orde baru. Masa orde baru dinilai memberikan signifikasi yang besar dalam mengakarnya sistem partriarki yang sangat membatasi perempuan pada kewajiban kewajiban domestik, sebagaimana dikatakan oleh Hemas, 2012:

> Pendefinisian peran "ibu" pada era orde baru disadari atau idak telah mengkerangkeng perempuan pada posisi subordinat dengan menekankan fungsi reproduksi dan "kodrat perempuan" untuk melayani, mengabdi dengan menjadi "istri yang patuh". Pola ini diidentifikasi sebagai ideologi "ibuisme" yang pernah dibahas panjang lebar oleh feminis Julia Suryakusuma dalam konsep "ibuisme negara" (Sears, 1996). Konsep yang mencakup unsur-unsur ekonomi, politik, dan budaya itu diambil dari budaya "peng-istri-an" atau *housewifization* borjuis dan ibuisme priyayi (Mies, 1986 dan Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987 dalam Majalah Bali Sruti edisi No.5 Januari-Maret 2012).

> Pemerintah masa itu menciptakan institusionalisasi "istri" melalui berbagai regulasi, diantaranya lewat Panca Dharma Wanita yang di promosikan PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) sampai ke tingkat akar rumput. Bahkan sejak awal tahun 1970-an, domestifikasi peran ibu (baca: perempuan) semakin diperkokoh ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menegaskan lima fungsi perempuan, yaitu sebagai penerus keturunan dan Pembina generasi masa depan bangsa; sebagai ibu dan pendidik anak-anaknya; sebagai pengelola rumah tangga dan pekerja untuk menambah penghasilan keluarga; serta sebagai anggota masyarakat (Hemas, 2012:23 dalam Majalah Bali Sruti edisi No.5 Januari-Maret 2012).

Kebijakan yang dibungkus dalam GBHN jaman orde baru ini tidak hanya menempatkan perempuan pada posisi subordinat saja, bahkan lebih parah lagi karena harus ikut menjalankan fungsi pekerja untuk menambah penghasilan keluarga bersama laki-laki, selain mengurus urusan

domestik. Lebih lanjut menurut Hemas (2012) Keadaan ini jelas meletakkan perempuan sebagai korban diskriminasi di masyarakat yang sangat kuat dan sukar di tembus.

> Disadari atau tidak budaya patirarki dalam sistem kehidupan ini yang salah satunya ditunjukkan dengan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan sudah sedemikian kuat mengakar. Upaya menghapus diskriminasi itu yang membuat perempuan harus menembus barikade yang menghadangnya. Temboknya berawal dari tembok budaya dari ruang yang paling pribadi: rumah.
>
> Tembok-tembok berikutnya tidak berdiri sendiri karena komponen budaya itu teraduk sempurna disetiap limit kehidupan. Untuk sampai ke medan lapang menuju garis awal yang sama dalam memulai perjalanan politik di ruang publik bersama laki-laki adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Begitu banyak energi yang terkuras, sehingga tidak jarang yang kehabisan stamina di tengah jalan dan tak mampu melanjutkan. Sementara politisi yang tak mau berbagi kekuasaan dalam politik diruang publik maupun ruang politik dapat menyusun berbagai strategi untuk menjegal langkah perempuan (Hemas, 2012:24).

Keadaan budaya patriarki yang sangat kuat mengakar ini jelas menjadi sandungan besar untuk para perempuan untuk berkarir di dunia politik. Perempuan menjadi semakin tertingal dibelakang karena terlalu banyak menghabiskan energi untuk bergulat dengan sitem budaya patriarki di masyarakat yang sangat kuat mengakar dengan keadaan pengetahuan rimba politik yang masih begitu minim dibandingkan kaum laki-laki.

Kuatnya budaya patriarki di masyarakat membuat banyak beban yang harus dipikul oleh perempuan. Baik mengurusi keluarga, menjalankan kewajiban untuk *menyama braya* di masyarakat, mempersiapkan dan menjalankan upacara, dan lain sebagainya. Terkhusus bagi perempuan Hindu di Bali, hal yang menjadi kesibukan tambahan yang sangat wajib adalah mempersiapkan dan melaksanakan upacara keagamaan. Bisa dikatakan bahwa perempuan

adalah tonggak utama dalam pelaksanaan berbagai ritual keagamaan. Hal ini membuat perempuan memiliki ruang gerak yang sangat sempit untuk menambah kesibukan dengan terjun ke dunia politik. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendobrak budaya patriarki ini, antara lain membuat ritual upakara menjadi lebih fleksibel. Fleksibel disini maksudnya adalah tidak kaku terhadap tradisi, namun tetap menekankan esensi yang sebenarnya. Misalnya apabila waktu, kesempatan, dan keadaan tidak memungkinkan kita untuk membuat banten yang besar untuk persembahan, cukup menghaturkan canang. Lagipula, unsur-unsur dari canang itu sendiri sudah merepresentasikan banten yang sebenarnya. Hal yang terpenting adalah bagaimana ketulusan dan keikhlasan dalam melakukan persembahan. Contoh-contoh kecil seperti ini dapat menjadi salah satu solusi agar perempuan memiliki waktu dan kesempatan lebih banyak untuk terjun ke dunia politik dan turut berkontribusi menyumbangkan pikiran untuk menentukan kebijakan.

Selain itu, budaya patriarki kerap memposisikan wanita sebagai mahkluk nomor dua dibanding laki-laki. Demikian pula bagi anak perempuan yang belum bersuami, kerap mendapat halangan dari keluarga untuk terjun ke politik dan lebih memilih mengajukan anak laki-laki walau kemampuan anak laki-laki sejajar dengan anak perempuan atau bahkan lebih rendah. Adanya pemikiran bahwa laki-laki harus tampil di depan menjadi hambatan tersendiri bagi peran perempuan dalam dunia politik maupun karir.

Menurut Mosse (2007: 82) dalam bukunya *Half The World, Half A Chance An Introduction to Gender and Development* (Gender dan Pembangunan) fenomena struktur patriarki yang dominan di sebagian besar masyarakat memberikan kontrubisi atas minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembuatan serta pengambilan keputusan. Umumnya pada negara yang menganut sistem nilai patriarkal seperti

Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (domestik) saja. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggung jawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan bagi perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, termasuk di dalamnya isu politik.

Secara umum, peran perempuan (*women's role*) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: peran yang dimainkan secara langsung (*straight role*), dan peran tidak langsung (*no straight role*). Peran secara langsung adalah peran yang secara langsung dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung dapat dirasakan. Adapun peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak langsung dilakukan perempuan, dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak langsung (Munandar, 2001: 38).

Peranan perempuan dalam politik di Indonesia khususnya di Kabupaten Badung masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah. Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan pada tataran kelas dua (*second class*). Perempuan juga tidak punya peranan dalam

dunia politik untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik.

Dalam budaya patriarki kaum laki-laki mendominasi kaum perempuan dan membentuk sebuah kesepakatan bersama dalam masyarakat bahwa perempuan belum cukup cakap dalam berbagai bidang yang dikategorikan sebagai bidang laki-laki, termasuk salah satunya bidang politik. Sebagaimana dikatakan oleh Antonio Gramsci bahwa agar mereka yang terhegemoni patuh terhadap penghegemoni, maka yang terhegemoni seharusnya mampu menginternalisasikan nilai-nilai penghegemoni, selain memberikan persetujuan atas subordinasi para penghegemoni ini.

Dalam kaitannya dengan konsep patriarki di Bali, kaum perempuan Bali selaku kaum yang terhegemoni, melalui keseharian mereka baik secara sadar ataupun tidak sadar telah memberikan persetujuan mereka atas subordinasi kaum laki-laki di Bali. Laki-laki Bali sebagai penghegemoni sejauh ini telah mampu menginternalisasikan nilai-nilai budaya patriarki kepada perempuan Bali sebagai pihak yang terhegemoni. Sebagian besar kaum perempuan Hindu Bali menyadari dan menerima posisi mereka sebagai warga kelas dua di keluarga mereka sendiri. Walaupun dalam perkembangan zaman globalisasi ini riak-riak pemberontakan kecil atas budaya patriarki seperti keluhan terhadap keberadaan budaya ini sudah mulai dibicarakan oleh kaum perempuan Hindu di Bali.

Demokrasi menghendaki keharusan adanya kebebasan untuk berfikir dan berkeyakinan, kebebasan ilmiah, kebebasan mengeluarkan pendapat, *rule of law*, dan persamaan di muka hukum. Demokrasi dalam perkembangannya pula menghendaki keberadaan perempuan didalamnya. Budaya patrikarki yang berkembang seiring dengan keberadaan demokrasi di Indonesia membawa masalah tersendiri. Wanita dalam

budaya patriaki bisa dikategorikan belum berdemokrasi secara utuh. Hegemoni laki-laki kerap mengungkung hak-hak kebebasan perempuan bahkan dalam menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu. Faktanya masih banyak perempuan Hindu Bali yang terkungkung dalam budaya patriarki cenderung tidak berani menyuarakan perbedaan pilihan calon mereka dengan pilihan suaminya, bahkan lebih parahnya mereka akhirnya mengikuti pilihan suaminya.

Budaya patriarki di Bali yang begitu mengakar kuat telah menjadi salah satu 'batu sandungan' bagi para wanita untuk melaksanakan partisipasi politiknya, untuk ikut mendapatkan hak dalam demokrasi. Sebagaimana menurut Hans Kelsen (dalam Lubis, 1994:83) demokrasi menempatkan rakyat sebagai kuasa tertinggi yang memiliki legitimasi untuk memerintah negaranya, dimana semua rakyat memiliki hak yang sama untuk memerintah, maka seharusnya wanita juga memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk duduk di kursi parlemen dengan laki-laki. Dari analisis yang dilakukan, pendapat ahli dan sumber-sumber terkait, ada relasi yang kuat antara budaya patriarki dan teori Hegemoni yang dikemukakan Gramsci. Ada sebuah pengkondisian dengan menggunakan perangkat tertentu sehingga memunculkan consensus tentang laki-laki dan perempuan yang telah masuk dalam kawasan kultural-ideologis di Bali.

2. Stigma Politik Hegemoni Laki-laki

Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting pada abad ke-20. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramci (1891-1937). Antonio Gramci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Karl Marx. Gagasanya yang cemerlang tentang hegemoni, yang banyak dipengeruhi oleh filsafat hukum Hegel, dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma *base-superstructure*

(basis-suprastruktur). Teori-teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional (Hendarto, 1993:68).

Lebih jauh dikatakan dalam Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan "dominasi". Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan *"hegemoni"*. Dengan demikian supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui "persetujuan" (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Hal tersebut jelas terlihat sebagai penggambaran atas stigma hegemoni laki-laki dalam dunia politik.

Dunia politik merupakan domain publik yang diidentikkan dengan dunia laki-laki. Sementara, perempuan nyaris tidak mungkin menjadi aktor dalam politik karena kepentingan mereka terbatas pada domain domestik atau urusan rumah tangga. Dalam prakteknya dunia politik saat ini memang dirasa begitu maskulin. Seperti tidak ada ruang bagi wanita untuk bermain di ranah itu. Sebagian besar calon wanita tampak tidak berdaya dengan budaya maupun sistem yang membuat mereka seakan tidak bisa maju di dunia

politik. Persaingan politik di Indonesia masih dirasa terlalu keras dan didominasi oleh laki-laki.

Fenomena dunia politik yang masih begitu "macho" ditegaskan dalam rubrik forum MDG's majalah Bali Sruti Edisi ke-5 Januari-Maret 2012:

> Pengurus semua partai politik sebagian besar adalah laki-laki yang pada umumnya tidak memiliki perspektif gender. Bila ada ketua atau pengurus perempuan, pada umumnya tidak diposisi kunci dan belum tentu berwawasan gender juga. Budaya dan kebiasaan partai sangat "macho" dan perempuan menjadi terpinggirkan, misalnya: melakukan rapat di malam hari atau bahkan diluar kota dan kurang mendapat porsi yang memadai dalam pendidikan politik/ kaderisasi disemua tingkatan.
>
> Kepercayaan yang diberikan pada umumnya juga tidak besar sehingga perempuan menjadi kurang berpengalaman dibandingkan dengan laki-laki yang mempunyai keleluasaan secara kultur dan struktur dibanding perempuan, demikian juga ditengah masyarakat masih terjadi peminggiran perempuan sehingga untuk rekrutmen jabatan publik oleh parpol maka perempuan masih belum memperoleh porsi semestinya. Untuk perubahan diperlukan *political will* dari parpol dengan menerapkan kebijakan khusus sementara atau biasa dikenal dengan afirmasi (Bali Sruti edisi 5, Januari-Maret 2012:5).

Hegemoni laki-laki dalam dunia politik mungkin disebabkan karena keseniorannya ada di ranah itu. Sehingga muncul ego laki-laki untuk tetap mempertahankan kuasanya atas politik. Mereka yang menguasai perundangan juga mungkin saja mengkondisikan agar wanita tidak banyak berperan dalam hal politik, juga mengkondisikan agar wanita tidak mampu berkutik untuk melawan mereka dalam sistem yang tarung bebas nan keras ala mereka.

Politik di Kabupaten Badung masih menjadi hegemoni laki-laki, dunia laki-laki dimana perempuan akan sulit menembus. Bahkan diprediksi akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendudukkan perempuan dalam jumlah memadai di kursi legeslatif. Sementara itu, stigma

politik masih kental dengan laki-laki karena perempuan relatif baru hadir dalam dunia politik.

Menurut Tamerius (1995:103), ada dua alasan yang menyebabkan perbedaan jenis kelamin yang akan mengakibatkan perbedaan representasi kepentingan, yaitu:

1) Perbedaan pengalaman serta kebutuhan antara laki-laki dan perempuan;
2) Perbedaan perilaku dan sumber daya/modal yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun diharapkan adanya perbedaan representasi yang disuarakan oleh kelompok perempuan di parlemen, namun sampai saat ini representasi perempuan parlemen masih sebatas representasi jenis kelamin. Perjuangan perempuan tampaknya masih sangat panjang dan berliku. Perempuan mestinya bukan hanya 'menjual' representasi jenis kelamin tetapi keunggulan yang diperlukan untuk merebut kursi legeslatif.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus (*consenso*) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat itu. Itulah sebabnya hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci, 1976: 244).

Ada tiga tingkatan yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni yang merosot (*decadent*) dan hegemoni yang minimum (Femia, 1981:93). Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya "momen" filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang,

dominasi merupakan lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh "roh" ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjuk pada moral.

Konsep hegemoni terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi (*economic*), negara (*state*), dan rakyat (*civil society*) (Bocock, 1986:179). Ruang ekonomi menjadi fundamental. Namun, dunia politik yang menjadi arena dari hegemoni, juga menampilkan momen perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kekuasaan negara, konsekwensi yang dibawanya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni itu telah muncul secara parsial, memiliki sebuah signifikasi yang khusus. Negara dengan segala aspeknya, yang diperluas mencakup wilayah hegemoni, memberikan kepada kelas yang mendirikannya baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkret, yang dihasilkan dari hubungan organik antara negara atau masyarakat politik dan *civil society*.

Pendek kata, hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci penjelasan bagaimana ide-ide atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999:73). Pendapat ini tampaknya sesuai dengan gambaran yang diperoleh di lapangan bagaimana stigma politik yang telah terbangun sebagai arena laki-laki.

Sebagian besar informan berpendapat bahwa memang laki-laki masih sangat menghegemoni dunia politik di Indonesia, khususnya di kabupaten Badung. Laki-laki yang lebih dahulu masuk ke ranah politik menciptakan suasana yang begitu maskulin dalam dunia politik.

Minimnya representasi perempuan dalam dunia politik semakin memudahkan laki-laki dalam menghegemoni para wanita yang jauh lebih belakangan masuk ke dunia politik. Laki-laki telah berhasil membangun dirinya sebagai penguasa utama dari panggung politik.

Gambar 2
Karikatur Penggambaran Pandangan Masyarakat
mengenai Afirmasi kuota 30% Perempuan.
(Sumber: Wied N., 'Jeng,' *Bali Post*, 21 December 2003)

Para Perempuan menangkap adanya ketidak-relaan kaum laki-laki jika kuota kursinya diambil oleh perempuan. Keresahan para perempuan ini bahkan dijadikan sebuah karikatur di salah satu surat kabar terbesar di Bali, Bali Post.

Upaya hegemoni tidak hanya melalui serangkaian aturan main yang masih begitu bebas namun juga melalui nilai-nilai patriarki yang ada di masyarakat. Konsensus nilai-nilai serta norma di masyarakat juga merupakan bentuk hegemoni. Misalnya bahwa wanita harus ada dirumah sebelum malam tiba, perempuan yang pulang kerumah larut malam dijatuhi stigma negatif.

Gambar 3
Caleg Perempuan Simakrama Malam Hari
Sumber: Sandrowangak (weeklyline.net/politik)

Sementara di satu sisi simakrama (kampanye ke banjar-banjar) sering kali dilakukan malam hari dan selesai hingga larut malam. Sehingga tak jarang caleg perempuan mengambil resiko ikut *simakrama* malam hari walaupun mungkin ia harus melanggar konsensus perempuan tidak boleh pulang larut malam.

3. Pembagian Kerja Keluarga Hindu Bali

Hampir semua masyarakat memiliki pembagian kerja berdasarkan gender (*gender division of labour*), artinya beberapa masyarakat, seperti misalnya masyatrakat Bali memiliki peran gender yang benar-benar tumpang tindih (Mosse, 2007:65). Agama Hindu yang masuk ke Bali ikut memengaruhi relasi gender dalam masyarakat Bali. Konsep yang jelas terlihat adalah konsep *kasta* yang menyebabkan adanya pembagian masyarakat berdasarkan *kasta* (Lansing, 1995:27). Peraturan mengenai kasta tersebut memengaruhi adanya peraturan pernikahan antar kasta. Sistem patrilineal melalui konsep *purusa* yang mengutamakan laki-laki juga dipengaruhi oleh agama Hindu. *Purusa* yang berarti laki-laki diambil dari konsep agama Hindu. Dalam konsep tersebut *purusa* merupakan suatu kosmologi, materi pokok, dan dianggap sebagai penyebab efisiensi alam semesta. Konsep

purusa bersifat kepahlawanan untuk kejayaan kitab suci Veda dan kesejahteraan semua makhluk. Merujuk hal tersebut, terlihat bahwa konsep *purusa* (laki-laki) dipengaruhi oleh agama Hindu dan dianggap hal utama bagi terciptanya harmoni bagi semua makhluk.

Dasar budaya patriarki yang berkembang dalam keseharian masyarakat Bali memberikan dampak yang signifikan terhadap pembagian kerja dalam keluarga Hindu. Ketidakadilan gender yang menimpa perempuan Bali terjadi akibat beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender antara lain faktor kasta dan faktor budaya yang hingga kini masih melekat pada masyarakat Bali, faktor ekonomi, dan juga faktor sosial. Relasi gender masyarakat Bali dipengaruhi pula oleh agama, yaitu Hindu. Hal yang akan dibahas dalam relasi gender di Bali adalah relasi di ruang keluarga dan publik. Dalam ruang keluarga yaitu masalah pernikahan, suksesi, dan ahli waris. Karena di Bali terdapat kesatuan keluarga yang disebut *dadia*, pembahasan relasi gender di ranah keluarga tidak hanya sebatas pada keluarga inti.

Pembagian kerja dalam keluarga Hindu dengan garis patrilineal nya bisa membuahkan gender yang membuat wanita menjadi *second class citizen* di keluarganya sendiri. Seolah wanita itu hanyalah pelengkap penderita dalam keluarga dengan tanggung jawab domestik, tanpa hak waris, tanpa kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan dikeluarganya sendiri. Hal ini jelas menjadi batu sandungan terbesar bagi seorang wanita yang telah berkeluarga untuk terjun ke dalam dunia politik. Seorang wanita Hindu Bali yang telah menikah akan masuk ke dalam sistem banjar adat dimana tanggungjawab nya tidak hanya sebatas mengurus suami dan rumah tangganya saja, namun juga menanggung kewajiban untuk bermasyarakat (*menyama braya*) berikut dengan aktivitas adat dan keagamaannya. Jangankan berpolitik yang notabenenya perlu investasi waktu yang

bukan main, berkarir sebagai pegawai biasa saja rasanya seorang wanita sudah kewalahan mengatur waktu antara kewajibannya di keluarga (mengurus anak, suami dan urusan domestik), kewajibannya di adat (*ngayahin banjar, menyama braya*), kewajiban keagamaan (membuat sarana upakara, *mebanten, ngodalin, dll.*) serta pekerjaan kantor (karir)nya.

Pembagian kerja dalam keluarga Hindu Bali memang menempatkan perempuan dalam urusan domestik dan adat, misalnya persiapan perlengkapan *upakara* sehari-hari maupupun ketika ada upacara yang jumlahnya sangat banyak di Bali, perempuanlah yang harus bertanggungjawab. Perempuan yang harus membuat, sekaligus *mebanten*. Faktanya, jarang laki-laki mau mengambil beban keluarga ini. Demikian pula anak laki-laki sejak kecil relatif dididik menjauhi tugas ini dan langsung dilimpahkan pada an

ak perempuan yang berakibat tertanamnya paham jika perempuan satu-satunya yang bertugas dalam hal ritual di Bali. Kecuali pada keluarga yang lebih terdidik dan menganut paham egaliter, dalam beberapa tahun belakangan, anak laki-laki tampak sudah mulai tidak malu untuk *mebanten* atau membawa *aturan* ke pura. Tetapi hal itu masih sangat minim. Sebab anak laki-laki akan merasa malu ketika ke pura membawa *banten*.

Gambar 4
Penggambaran Wanita Bali di tengah Tradisi,
karier dan Globalisasi
Sumber: Surya dharma, Sarad 2000

Walaupun pembagian kerja keluarga Hindu di Bali terkesan memposisikan perempuan hanya pada tugas domestik dan upakara, perempuan hendaknya tidak mengabaikan dunia politik secara sepenuhnya. Untuk mempengaruhi berbagai kebijakan di masyarakat, salah satu pintu gerbangnya adalah dunia politik. Melalui proses politiklah negara ini terbentuk, melalui dunia politiklah susunan pemerintahan terbentuk. Jajaran pemerintahan tentunya menaungi segala aspek di masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Perempuan merupakan roda penggerak ekonomi di masyarakat. Tanpa perempuan, ekonomi akan sulit berkembang di masyarakat. Perempuan masih sangat diperlukan dalam dunia politik, terutama untuk pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Gambar 5
Kegiatan *Ngayahang Banjar* salah satu rutinitas
adat-budaya-keagamaan wanita Hindu Bali.
Sumber: Dok Pribadi Penulis

Hal lain yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pembagian kerja keluarga Hindu di Bali adalah konsep *purusa-pradana*. Konsep ini menyebabkan laki-laki duduk sebagai *purusa*, yang memimpin keluarga, menentukan keputusan tertinggi dalam keluarga. Selain itu, yang memegang peran sebagai ahli waris utama dalam garis keturunan keluarga adalah pihak *purusa* (laki-laki). Sedangkan wanita diposisikan sebagai orang nomor dua di keluarga dan menurut saja dengan apa yang diputuskan laki-laki. Posisi perempuan yang demikian dalam keluarga membuat perempuan terkadang sulit untuk beraktivitas untuk membangun karir politik di luar.

Sistem patriarki Bali muncul melalui hukum patriarkat atau patrilineal tersebut. Panetje (1986:39) dijelaskan bahwa hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan

patriarchaat (patriarkat) yaitu hubungan seorang anak dengan keluarga bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapak atau keluarga dari *pancar laki* (*kepurusa*) adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, masyarakat Bali tetap mengidealkan kelahiran anak laki-laki (*purusa*). Menurut Panetje, keluarga dari pihak laki-laki mendapat perhatian lebih dahulu daripada keluarga dari pihak ibu. Namun, bukan berarti hubungan si anak dengan ibunya atau keluarganya dari *pancar ibu* (*wadu*) tidak ada artinya sama sekali. Hubungan dengan keluarga *pancar wadu* baru mendapat perhatian sesudah hubungan dengan keluarga bapaknya tidak ada lagi. Konsep *purusa* terimplementasi pula melalui pernikahan. Panetje (1986:116) menjelaskan bahwa perempuan Bali yang sudah menikah tinggal di keluarga suaminya. Perempuan serta anak hasil pernikahan tersebut masuk dalam garis kekerabatan keluarga suami atau bapaknya. Istri tidak lagi wajib memuliakan sanggah keluarga bapak kandungnya. Perempuan itu akan resmi mohon diri (*mepamit*) di sanggah asalnya dan di sanggah suaminya ia melaporkan diri sebagai anggota baru.

Mengikuti pendapat Talcott Parson analisa struktur hukum dalam suatu kelompok masyarakat terdiri dari:

1) Ide-ide (norma keagamaan dan nilai-nilai sosial)
2) Norma (Hukum adat Bali)
3) Kollektivitas (desa adat dan lembaga-lembaga adat lainnya)
4) Peran (sikap, prilaku anggota masyarakat)

Permasalahan gender dirumuskan dalam kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit hukum Adat Bali. Bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam hukum adat, dan menghasilkan sistim kewarisan menurut garis "*purusa*" yang sepenuhnya tidak identik dengan garis lurus laki-laki, karena perempuanpun bisa

menjadi "*Sentana Rajeg*" sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Tapi bila keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Inilah yang dimaksud sebagai bias gender dalam hukum adat Bali. Sangat jelas sekali anak perempuan apalagi sudah menikah keluar, maka ia tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab keluarga pihak suami selama perkawinannya langgeng. Bila terjadi perceraian, anak perempuan tersebut kembali kekeluarga asalnya, dan beralih menjadi tanggungjawab orangtua atau saudara laki-lakinya. Hak asuh anak-anak jatuh pada suami / keluarga suami, dan bagi si ibu tidak ada tanggungjawab ekonomis ataupun spiritual terhadap anak-anaknya. Faktanya di sinilah getirnya nasib perempuan Bali yang bercerai.

Menurut hukum Adat Bali mengenai harta perkawinan, harta bersama (*guna kaya*) harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah dibagi dua (50% hak perempuan) dan bila ada harta *tatadan* (bekal atau hibah dari orangtua perempuan), harta *tatadan* sepenuhnya kembali menjadi hak perempuan. Prakteknya, dalam kasus perceraian banyak diselesaikan hanya secara adat, dan perempuan Bali sering tidak menggugat harta bersama apalagi bila ada anak-anak, biasanya diberikan kepada anak-anaknya. Syukur bila keluarga asalnya menerima dengan baik. Dari pengamatan perempuan yang bercerai dan pulang ke rumah selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan juga sering membantu biaya sekolah anak-anaknya bila memungkinkan.

Menurut hukum adat, orang tua atau saudara laki-laki di rumah asalnya wajib bertanggungjawab bila ia sakit ataupun meninggal, bila mereka tidak mau akan dikecam oleh masyarakt adatnya. Oleh karena itu setiap perceraian yang terjadi harus dilaporkan kepada "*kelian*" atau kepala banjar adat baik di lingkungan rumah suami maupun

ditempat asal istri. Tidak boleh mengambang tak karuan, karena ini menentukan kewajiban banjar adat bila anggota masyarakatnya meninggal atau memiliki masalah hukum lainnya. Dilihat dari skenario di atas, memang posisi perempuan menjadi serba salah dan sangat dirasakan keadaan bias gender dan ini melahirkan ketidakadilan gender.

Hukum Adat Bali tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat agraris, demikian juga lembaga-lembaga adat seperti desa adat sangat tergantung pada tanah (wilayah kerjanya) dan peran-peran individu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dari sisi kekuasaan dalam masyarakat yang mendominasi adalah para tuan tanah (feodalisme). Sampai masa tahun 60'an sangat dirasakan ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap perempuan sangat tinggi, seperti: praktek kawin paksa, poligami, pemingitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, serta masih banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan.

Perempuan Bali merupakan sosok yang memiliki kesibukan yang jauh lebih padat jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan dari daerah lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bali merupakan daerah yang kental akan adat istiadat, budaya, tradisi, agama, dan kearifan lokal. Selain itu yang menjadi motor utama dalam mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi di Bali adalah perempuan.

Apabila dibandingkan dengan para perempuan di wilayah Jawa yang ingin terjun ke dunia politik, perempuan Bali masih jauh kalah. Perempuan di wilayah Jawa, bila bertekad untuk terjun ke dunia politik, mereka cenderung berjuang habis-habisan. Semangat, keyakinan, dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi massa terkadang

bisa melebihi laki-laki. Ketika perempuan disana ingin maju di dunia politik, biasanya sudah mengantongi dukungan penuh dari keluarga, sehingga perempuan bisa fokus untuk berjuang.

Perempuan Bali terkadang belum mampu untuk mengatur dan membagi waktu untuk menyelesaikan kewajibannya di keluarga dan di lingkup *nyama braya* masyarakat. Jadi walaupun perempuan sudah menduduki jabatan politik, perempuan tetap harus mengurusi rumah tangga dan kewajiban *menyama braya*, hal ini menyebabkan pikiran perempuan bercabang dan sulit untuk fokus.

Secara umum perempuan memiliki sikap penuh pertimbangan dan memikirkan resiko yang terjadi bila mengambil tindakan tertentu. Jadi ketika ingin mengambil keputusan, perempuan cenderung memikirkan resiko dan peluang hingga dua sampai tiga kali, kemudian baru mengambil keputusan dan bertindak. Berbeda dengan laki-laki, kaum laki-laki biasanya sekali berpikir langsung bertindak, untuk resiko nanti diurus di belakang. Hal ini membuat laki-laki cenderung lebih cepat mengambil keputusan. Ketika laki-laki sudah maju tiga langkah, perempuan baru satu langkah.

Perempuan Bali memiliki kewajiban dan kesibukan dari urusan domestik (ibu rumah tangga), hingga pembuatan sarana upakara setiap harinya, *ngopin*, *ngayah*, *tedun*, dan masih banyak lagi. Selama 24 jam yang dimiliki perempuan Bali terkadang tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Apalagi bila menjelang hari besar keagamaan, sarana upakara dibuat dengan berbagai variasi yang memiliki kerumitan yang tinggi, serta dalam jumlah yang cukup banyak. Belum lagi rutinitas seorang wanita di rumah adalah mengurus anak-anak, melayani suami, menjaga rumah, dan masih banyak lagi.

Gambar 6 Perempuan Bali melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu melaksanakan upacara *banjotan* di pantai bersama *karma banjar*.
Sumber: Dok Pribadi Penulis

Penyebab keengaanan perempuan Bali untuk terjun ke dunia politik yakni seorang perempuan rumah tangga harus bangun lebih awal dan tidur lebih akhir bila dibandingkan anggota keluarga yang lain. Menjadi seorang perempuan sesungguhnya memerlukan energi dan pemikiran yang tidak sedikit. Terkadang, urusan-urusan seperti inilah yang membuat seorang perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik. Karena diketahui bersama bahwa diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk berkecimpung dalam dunia tersebut. Seorang calon politikus harus banyak melakukan *lobby* dengan berbagai pihak, banyak turun ke masyarakat, dan lain-lain. Melihat sibuknya dunia politik, membuat perempuan enggan untuk terjun ke dunia itu karena kekhawatiran akan terbengkalainya urusan rumah tangga, adat, maupun tradisi masyarakat.

Gayatri Chakravorty Spivak menilai bahkan dalam keadaan masyarakat 'normal' dengan struktur patriarki, wanita atau para perempuan ini sudah menduduki posisi subaltern. Posisi subaltern ini menurut Gayatri merupakan posisi dimana sekelompok orang atau individu berada pada posisi yang termarjinalkan, yang selalu menjadi objek bagi kelas yang dominan dan berkuasa (Moore-Gilbert, 2000). Kompleksitas masalah yang dihadapai wanita dunia ketiga (termasuk di Indonesia khususnya di bali) tidak bisa dipandang sama dengan keadaan dan pemikiran feminis barat. Kaum perempuan di dunia ketiga tidak hanya mengalami dominasi dari segi ekonomi saja, namun juga dalam ruang adat, agama serta budaya. Posisi subaltern pada wanita ini turut disebabkan oleh budaya stuktur masyarakat patriarki. Perjuangan kaum wanita (feminist) di dunia ketiga menurut Spivak menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang dianggap oleh kaum feminist barat sebagai feminist universal.

Dalam pembagian kerja keluarga Hindu sebagaimana dijelaskan diatas wanita tidak hanya mendapat bagian dalam hal ekonomi keluarga saja, namun juga turut andil dalam mengurus rumah tangga, berikut proporsinya dalam kegiatan ada, budaya serta keagamaan di masyarakat. Beban kerja yang dihadapi kaum perempuan bahkan bisa dikatakan dua kali lipat dibandingkan dengan laki-laki, namun karena posisi wanita yang subaltern dalam masyarakat, mereka lebih sering bungkam dan menjalani kerja itu sebagai kodrati yang harus mereka terima.

4. Tingginya Biaya Politik

Investasi politik masih menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik. Dalam berpolitik, ada beberapa hal penting dan mutlak diperlukan, antara lain keberanian, kemauan kuat, dan biaya. Dapat diistilahkan dengan 3O (Ongkos, Otak, Otot). Ketiga

hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apabila seorang calon memiliki kemampuan/kompetensi dan memiliki tenaga/semangat yang kuat, namun tidak memiliki ongkos (biaya), maka kecil kemungkinan untuk bisa berhasil.

Untuk mengenalkan diri ke masyarakat, tentu diperlukan biaya untuk publikasi maupun memberikan berbagai santunan dan bantuan ke masyarakat. Ini bukanlah *money politics*, namun lebih tepat bila disebut *cost politics*. Pengeluaran biaya didasarkan pada pribadi masing-masing calon, ada yang secara *jor-joran* mengeluarkan biaya, ada juga yang tidak terlalu *jor-joran*.

Pilihan untuk mengeluarkan biaya politik secara jor-joran atau tidak merupakan bantuk tindakan rasional. Sebagaimana dikatakan oeh Max Webber bahwa tindakan rasional beruhubungan dengan pertimbangan sadar dan pilihan bahwa tindakan itu kemudian dinyatakan. Segala bentuk tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana individu yang bertindak itu memberikan makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Rasionalitas dari sebuah tindakan menurut Webber akan berpengaruh terhadap bagaimana orang melihat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Semain mudah dipahami sebuah tindakan, maka semakin rasional lah tindakan itu (Webber, 1920: 113).

'*Cost politik'* sepenuhnya adalah pilihan bagi para calon legislatif. Pilihan antara 'mengeluarkan seluruh amunisi' atau 'hanya sekedarnya saja'. Dalam hal ini, ada calon yang hanya menghabiskan biaya 500 juta, tapi lolos dan berhasil menjadi anggota dewan. Namun ada pula yang menghabiskan hingga belasan Milyar. Namun rata-rata secara umum, biaya yang diperlukan minimal 1-2 Milyar per calon. Biaya untuk investasi politik itu memang cukup mahal. Maka dari itu, menjadi calon legislatif harus siap

secara mental maupun finansial, harus siap kalah dan siap menang.

Gambar 7
Pemberitaan Mengenai Beratnya Ongkos Politik
Sumber: VOTING, Edisi XVI, 28 Agustus - 3 September 2013

Pengeluaran modal biaya untuk mencalonkan diri dalam legislatif dapat diminimalisir dengan keaktifan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini mampu membuat seseorang dikenal oleh masyarakat, sehingga biaya yang diperlukan untuk "mengenalkan diri" ke masyarakat melalui kampanye dapat dihemat.

Pencapaian melalui cara tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Bali cerdas dalam memilih calon pemimpinnya, tidak hanya didasarkan pada seberapa besar bantuan yang diberikan oleh sang calon ketika kampanye, namun melihat kompetensi dan dedikasi yang sesungguhnya di masyarakat.

Gambar 8
Karikatur Tantangan Finansial Perempuan
untuk Maju sebagai Calon Legislatif
Sumber: Ajuz, 2008 (www.inilah.com)

Tantangan finansial ini pula yang sebagian besar menjegal kaum perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Rasionalitas dalam mengatur keuangan membuat wanita berpikir berkali-kali untuk 'merelakan' uang ratusan bahkan milyaran rupiah sebagai *cost politics*. Rasanya lebih masuk akal kalau uang itu jadikan modal awal untuk keperluan bisnis dengan keuntungan yang bahkan bisa melipatkan modal awal itu atau setidaknya di depositokan dengan hasil bunga yang tentunya menggiurkan pula. Jika diinvestasikan dalam bidang politik, duduk di kursi legeslatif pun belum tentu bisa mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, apalagi gagal.

Tentang tingginya investasi politik juga ditegaskan bahwa seorang calon legeslatif jika ingin bertarung harus menyiapkan paling minimal Rp 2 Miliar untuk pembiayaan

politik. Bahkan sejumlah caleg harus mengeluarkan hingga Rp 12 miliar untuk memenangkan suara. Biasanya caleg yang hanya menghabiskan ratusan juta akan menang secara kebetulan dengan perhitungan suara di Dapil-nya, bukan menang dengan kemenangan jumlah suara. Dana ini untuk keperluan kampanye, tim sukses, bantuan ke masyarakat dan pembiayan lain yang disebut sebagai *cost* politik. Sehingga dengan kondisi saat ini, orang yang terjun ke dunia politik mestinya memang sudah mapan secara ekonomi.

Pandangan perempuan tentang biaya politik berbeda dengan laki-laki. Misalnya saja memiliki dana Rp. 1 miliar, perempuan relatif berpikir untuk menggunakannya dalam pembiayaan politik. Perempuan akan lebih berpikir untuk membuka usaha atau biaya pendidikan anak. Sebab dana yang besar itu akan sangat sia-sia ketika gagal dalam bertarung memperebutkan kursi Dewan. Demikian pula perempuan akan berpikir, ketika duduk di kursi legeslatif kecil kemungkinan dana yang dikeluarkan akan didapatkan kembali mengingat gaji seorang anggota Dewan yang tidak besar dan selalu ada pengeluaran yang besar ketika sudah menjabat. Sementara pertimbangan tersebut jarang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki ketika sudah menginginkan menjadi anggota legeslatif, akan berjuang dengan sangat keras serta tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana yang disebut sebagai biaya politik. Dana miliaran akan dihabiskan demi sebuah ambisi yang disebut sebagai cita-cita politik. Sementara itu ketika duduk sebagai anggota dewan, biaya yang dihabiskan sebagai investasi politik tetap akan besar. Hal ini dikarenakan seorang anggota Dewan harus hadir dalam berbagai kegiatan baik kegiatan adat, sosial maupun pendidikan, misalnya undangan pernikahan, potong gigi, kematian, sakit sampai pada berbagai kegiatan lainnya. Dalam sebulan dana yang dikeluarkan mencapai Rp 46 juta untuk keperluan sosial maupun *menyama braya* dalam

konteks adat. Hal inilah yang membuat kaum perempuan masih enggan untuk serius terjun ke dunia politik.

Selain investasi dana, ada hal yang lebih penting, lebih bermanfaat, lebih bermartabat, dan lebih menjanjikan yakni investasi sosial. Hal ini perlu dilakukan kaerana seorang caleg perlu membangun kedekatan personal dengan para konstituen. Dibandingkan hanya memberi uang yang kesannya transaksional dan kurang mendidik masyarakat. Investasi sosial memang bukan hal yang mudah dan instan. Investasi jenis ini memerlukan waktu yang tidak singkat, memerlukan kesabaran, dan memerlukan ketulusan. Investasi sosial ini dilakukan dengan cara merangkul masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa calon nantinya mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar
Salah satu aggota legislatif perempuan
meninjau konstituennya
Sumber: Denpost, 16 Maret 2016

Sebagian anggota legislatif perempuan di Badung memiliki kesamaan pandangan bahwa biaya politik mereka tidaklah besar. Dengan tidak jor-joran dalam terkait investasi

politik dalam betuk dana. Tidak seperti kaum laki-laki yang mengatakan minimal dana yang dibutuhkan 2 milyar rupiah untuk bertarung sungguhan dalam melaju ke kursi legislatif, sedangkan para wanita paling banyak menghabiskan 200-300 juta saja. Investasi politik yang tinggi dipandang tidaklah rasional, lebih baik digunakan untuk investasi ekonomi lainnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sebagian besar perempuan bertumpu pada tindakan rasional utamanya dalam mengatur keuangan. Dengan kata lain investasi politik yang jor-joran dinilai sebagai sesuatu yang kurang rasional. Konsep rasionalitas menurut Weber merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jeni-jenis tindakan sosial yang berbeda. Tindakan rasional merupakan tindakan yang selain didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di masa namun juga didasarkan pada refleksi secara sadar ataupun perencanaan (Ritzer, 2011). Tindakan rasional para perempuan yang melaju ke jalur legislatif adalah dengan lebih banyak melakukan investasi kedekatan sosial kepada masyarakat yang akan memilihnya, bukan dengan cara memberikan uang semata.

Kaum perempuan yang berkecimpung dalam percaturan politik untuk memperoleh kursi legislatif dapat dikatakan telah mengedepankan tindakan rasional dalam memuluskan langkahnya khususnya dalam hal penggunaan sumber daya keuangan. Sebagian besar wanita yang bertarung untuk kursi legislatif enggan menggelontorkan uang milyaran rupiah sebagaimana yang dilakukan oleh para laki-laki. Mereka menganggap pendekatan sosial kepada masyarakat konstituennya lebih rasional daripada 'membeli suara' mereka dengan uang saja. Sementara kaum laki-laki menanggap uang itu merupakan keharusan dan bentuk 'kesungguhan dalam bertarung' melihat sedikitnya uang yang di keluarkan oleh kaum wanita dalam proses kampanye sebagai bentuk ketidak seriusan mereka dalam bertarung.

5. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Perempuan

Tidak dapat dipungkiri tingkat pendidikan juga menjadi nilai jual dalam dunia politik. Tingkat pendidikan tidak hanya sebatas pada gelar saja, namun juga berbanding lurus dengan pengetahuan politik yang seharusnya dimiliki oleh setiap legislator beserta kualitas mereka. Nyanyian klasik yang mempertanyakan kualitas calon perempuan ini juga seringkali diperdengarkan. Sebagaimana di muat dalam majalah Bali Sruti:

Nyanyian klasik dikumandangkan oleh salah satu anggota Pansus yang menanyakan kualitas perempuan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Kaukus Perempuan Parlemen bersama gerakan perempuan kepada Pansus RUU Pemilu. Bahkan mengatakan bahwa kewajiban LSM (Masyarakat Sipil) untuk mempersiapkan perempuan berkualitas bagi partai!

Betapa naifnya, karena UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partapi Politik, disana secara tegas dikatakan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat. Namun peran ini tidak pernah dilakukan dengan baik selain hanya dalam kampanye untuk "menjual" dan memenangkan parpol/calegnya saja di semua tingkat ditanah air (Bali Sruti Edisi ke 5, Januari-Maret 2012).

Adanya indikasi partai malas melakukan pendidikan atau kaderisasi yang baik bagi anggota perempuan. Bahkan jika dilihat dari kutipan diatas tendenisi partai yang menginginkan hanya "calon perempuan jadi" yang "telah di didik oleh masyarakat sipil" untuk maju dari partainya. Tendensi yang sepertinya dibuat agar para perempuan tidak lebih pintar dari kaum laki-laki tentang dunia politik yang sangat berpotensi merebut peluang kursi kekuasaan mereka di parlemen.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan. Wawasan yang luas membuat seorang perempuan menjadi lebih cerdas dan bijaksana dalam menjalani kehidupan maupun mengambil keputusan. Dari hasil pengamatan, gelar masih sangat menjual ketika berhadapan dengan massa dan kampanye politik. Gelar dianggap sebagai nilai lebih oleh masyarakat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gelar. Namun sayangnya, tidak semua perempuan cerdas yang memiliki gelar tinggi mau terjun ke dunia politik. Jika memang berkenan terjun ke dunia politik, sejak awal memang harus mempersiapkan pendidikan dan sikap mental yang tangguh. Mereka juga menyatakan bahwa jika perempuan ingin maju mereka memang harus mempersiapkan diri dengan pendidikan yang memadai.

Dalam menyampaikan aspirasi di depan masyarakat, seorang caleg memerlukan kemampuan berbicara yang baik, agar mampu menyentuh hati masyarakat. Dalam hal ini, perempuan memiliki modal yang besar, yakni sifat keibuan yang membuatnya terlihat lembut dalam berbicara. Selain kelembutan juga dibutuhkan kecerdasan dalam memilih kata-kata, agar dimengerti oleh masyarakat. Hal tersebut didapatkan melalui pendidikan. Wawasan yang luas, kelembutan hati, kecerdasan, dan pengetahuan yang tinggi membuat perempuan terlihat jauh lebih sempurna didepan masyarakat.

Keterampilan dan kemampuan sulit untuk diakui oleh masyarakat apabila tidak dibuktikan dengan gelar akademis. Gelar akademis yang tinggi pastinya akan menjadi nilai tambah sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya. Orang yang berpendidikan dianggap cenderung memiliki pemikiran yang lebih matang dan daya analisis yang jauh lebih. Paradigma masyarakat perihal pendidikan mendorong para calon legislatif agar memiliki gelar akademis, hal ini juga memicu 'rasa percaya

diri' untuk tampil di depan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri saat ini bahwa angka buta huruf jauh lebih banyak disandang oleh kaum perempuan. Hal ini erat kaitannya pula dengan budaya patriarki masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya akan bertugas mengurus dapur dan keluarga, sehingga tidak memerlukan pendidikan yang terlalu tinggi. Maka dari itu, perempuan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk terjun ke dunia politik harus memepersiapkan diri dari awal, baik dari segi mental, kemampuan, dan tingkat pendidikan.

Di dunia politik, gelar menjadi nilai tambah dari seseorang, pandangan masyarakat akan berbeda terhadap orang yang memiliki gelar yang tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya menyadang S1 atau tidak bergelar. Disinilah letak kelemahan dari seorang perempuan. Dimana kita ketahui bahwa jarang sekali seorang perempuan memiliki gelar hingga Doktor, padahal jika dilihat dari tahap pendidikannya, perempuanlah yang kebanyakan menempati kategori prestasi. Dalam mencapai pendidikan sampai ke universitas, dilihat dari jumlah penduduk, jumlah perempuan memang kurang dari laki-laki. Kalau dilihat yang mendapat nilai *cum laude,* nilai tertinggi mulai banyak diraih oleh perempuan (Suryani, 2003:56).

6. Politik Masih Identik dengan Kecurangan

Dunia politik di Indonesia lebih sering diidentikkan dengan dunia laki-laki. Hal ini terjadi karena politik dianggap suatu kegiatan yang kekuasaan yang dianggap kotor, penuh dengan intrik dan tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik menjadi suatu kegiatan yang identik dengan kekuasaan yang bersifat negatif, kesewenangan, kekerasan, pengerahan masa dan kompetisi terbuka, dimana kondisi-kondisi itu tidak melekat dalam diri perempuan dan sisi feminisnya yang mengutamakan perdamaian. Padahal apabila berbicara kekuasaan

sebenarnya kekuasaan itu bersifat netral, karena ia bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dalam dunia politik, kekuasaan bisa bermakna positif karena dapat mewujudkan kepatuhan, perubahan dan pembaharuan.

Kecurangan tidak hanya pada saat pemilu saja, namun indikasi kecurangan dan diskriminasi pada perempuan juga terjadi bahkan dalam kandungan tubuh partai sebelum akhirnya para calon ini terlahir sebagai calon legilatif dalam pemilu. Menurut Forum MDG's yang dimuat dalam Bali Sruti Edisi ke 5 Januari-Maret 2012 sistem Partai yang oligarki sampai saat ini jelas menyulitkan bagi para perempuan.

> Oligarki di Partai yang sangat kental dirasakan dalam setap tarikan napas dan gerak partai politik. Hal ini menjadi hambatan utama bagi perempuan parpol. Tidak adanya keterbukaan dalam rekrutmen serta absennya kebijakan khusus sementara internal partai juga memberika kontribusi lambannya peningkatan transparansi perempuan dalam politik, misalnya: tidak adanya bantuan keuangan atau alat peraga kampanye bagi caleg perempuan, penempatan pada nomer urut kecil yang membuka ruang keterpilihan lebih besar, kepastian daerah binaan kader dan tidak dipindahkanke dapil lain menjelang pemilu. Hal-hal lain adalah masih hidupnya KKN, system pemilu yang berubah secara mendadak dipenghujung masa kampanye yang panjang, pragmatism caleg dan juga pemilih dll.
>
> Bila seorang kader perempuan, sekalipun sangat potensial, berani mempertanyakan apalagi mempermasalahkan kebijakan partai/pimpinn, sudah pasti akibatnya akan sangat fatal bagi yang bersangkutan alias bunuh diri dan kariernya tidak mendapat "kapling" dalam cabatan partai dan daftar calon. Maka sangat dimengerti bahwa menghadapi oligarki partai yang sedemikian rupa, kader perempuan partai sebagus dan sekuat apapun, tidak dapat secara leluasa "menyuarakan" aspirasinya karena akan berdampak pada penilaian akan norma kepatuha, loyalitas dan intergritas kepada partai dengan tolok ukur Anggaran Dasar dan Anggaran RUmah Tangga (AD/ART) Partai (Bali Sruti Edisi ke 5 Januari-Maret 2012).

Sejauh ini, di Kabupaten Badung khususnya telah terbukti bahwa calon perempuan cenderung lebih jujur dan taat pada norma yang ada dalam mengikuti proses pemilu. Hal ini terbukti dari tidak adanya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perempuan. Dalam bertarung di kancah politik, perempuan lebih senang menggunakan cara-cara yang damai, menyentuh, tidak menghujat, dan lain sebagainya. Mereka juga menegaskan bahwa dalam proses meraih jabatan di kursi pemerintahan lewat jalur politik, memang memerlukan waktu, tenaga, biaya, perjuangan, dan mental pantang menyerah. Prinsip dari dunia politik sesungguhnya sangat baik dan mulia, namun aplikasinya tergantung dari siapa yang menerapkan dan bagaimana cara menerapkannya. Belum tentu yang jujur selalu hancur.

Gambar 10
Gambaran Caleg Menghalalkan segala cara
untuk memperoleh kursi, termasuk main dukun
Sumber: Oom Pasikom (Kompas) edisi 1 Februari 2014

Banyak wanita yang enggan untuk terjun ke dunia politik, dikarenakan dunia politik identik dengan kecurangan dan sikap menghalalkan segala cara. Hal ini menyebabkan ketakutan sendiri di kalangan perempuan.

Wanita dengan kehalusan budinya lebih memilih menang terhormat atau tidak menang sekalipun dibanding menggunakan cara-cara yang curang. Tidak dapat disangkal bahwa untuk merebut kursi politik banyak cara yang ditempuh. Sesungguhnya Negara dan partai sudah mengisyaratkan untuk berpolitik yang jujur dan santun, namun terkadang kenyataan di lapangan banyak terjadi kecurangan atas nama tujuan politik dan cara-cara yang berbeda. Bahkan tidak dipungkiri dengan menggunakan ilmu-ilmu *niskala* (*magic*) untuk menyingkirkan calon yang lain dan mencapai kemenangan. Dunia politik memang harus mendapat sentuhan kebajikan demi menghilangkan cara-cara lama yang sesungguhnya tidak santun ini.

Hindu memandang politik tidak semata-mata sebagai cara mencari, dan mempertahankan kekuasaan, melainkan adalah bagi penegakkan Dharma. Hal ini banyak dijelaskan dalam percakapan antara Bhagawan Bhisma dengan Yudhistira pasca perang Bharatayudha, yaitu dalam Santi Parwa LXIII, hal 147, sebagai berikut: "Manakala politik telah sirna, Veda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan". "Ketika tujuan hidup manusia: *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa* semakin jauh. Begitu juga pembagian masyarakat semakin kacau, maka pada politikiah semua berlindung, pada politiklah semua kegiatan agama/yajna diikatkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, dan pada politiklah dunia terpusatkan". Dalam Nitisastra disebutkan bahwa kekuatan perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Bahkan perempuan memiliki kekuatan delapan sedangkan laki-laki satu. Hal ini berarti jika potensi yang dimiliki perempuan dikembangkan akan jauh lebih hebat dari pada laki-laki.

2.2 Perempuan Relatif Awam Berpolitik

Politik merupakan salah satu dasar terbentuknya sebuah negara. Oleh karena itu pengetahuan mengenai politik sudah sepatutnya dimiliki oleh warga negara, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Pengetahuan politik tidak selalu bebicara tentang pemerintahan sebuah negara saja, namun juga keseharian masyarakat yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah wadah yang disebut negara juga merupakan bentuk politik.

Masyarakat umum kebanyakan beranggapan bahwa perempuan sangat awam dalam dunia politik, hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah sangat sedikit perempuan yang memiliki kemauan dan keberanian kuat untuk terjun dalam dunia politik, selama ini wanita Bali lebih identik sebagai pihak yang berkecimpung mengurusi keluarga, adat, dan upacara agama.

Perjalanan mengedukasi perempuan untuk turut serta dalam politik merupakan proses yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun relatif belum memahami apa itu politik yang sesungguhnya, bagaimana berpolitik yang sehat, berpolitik yang cantik. Namun perempuan yang tergabung dalam organisasi seperti PKK banjar atau sejenisnya bila memperoleh pendidikan politik mereka relatif mengerti bahwa mereka selayaknya ikut berperan serta dalam politik.

Penduduk, termasuk didalamnya kaum perempuan adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional. Tanpa mengikutsertakan kaum perempuan dalam proses pembangunan bangsa dan negara berarti lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan bangsa dan Negara. Salah satu contoh konkret pada pemilu 1999 yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian Asia Foundation (Suryanef, 2001:46) menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat pemilih perempuan sejumlah 57% dari keseluruhan pemilih terdaftar. Hal ini adalah

merupakan sebuah potensi dan kekuatan besar yang perlu disadari oleh perempuan, karena keberhasilan sebuah peristiwa politik, seperti pemilihan umum, sangatlah ditentukan oleh partisipasi perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dipertegas di dalam GBHN dapat dinyatakan bahwa perempuan bagai mitra sejajar pria mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dengan pria untuk berprestasi melakukan suatu kegiatan dalam segala aspek pembangunan bangsa dan Negara. Selain itu sebagai warga Negara Indonesia perempuan mempunyaai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dan atau memilih.

Peran pembangunan negara tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan pun harus turut andil di dalam proses pembangunan tersebut. Penerapan nilai-nilai demokrasi pada program perempuan haruslah sama dengan laki-laki, jadi dari proses perencanaan kebijakan sampai proses evaluasi. Lagi-lagi dibutuhkan kreativitas dari para aktivis perempuan dalam membantu menanamkan pentingnya nilai demokrasi bagi para perempuan yang awam dengan demokrasi itu sendiri, tujuan utama ialah pemberdayaan "*empowerment*" yang sifatnya jangka panjang.

Situasi regulasi politik perempuan pada saat sebelum Pemilu 2009 cukup kondusif dengan adanya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Kedua UU tersebut mengakomodir pasal-pasal yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Terdapat ketentuan mengenai 30% perempuan dalam persyaratan pendirian partai politik dan kepengurusan di tingkat pusat, serta pasal tentang sistem *zipper* pada daftar calon anggota legislatif (caleg). Penerapan sistem *zipper* mengharuskan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diletakkan di salah satu nomor urut di antara ketiga orang caleg. Sistem ini merupakan strategi agar caleg perempuan

ditempatkan pada nomor urut kecil dan meningkatkan peluang keterpilihan.

Keberhasilan perjuangan perempuan tersebut dipatahkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUUVI/2008 Perihal Pengujian UU Pemilu Legislatif terhadap UUD 1945, yang menggugurkan sistem *zipper*. Dengan adanya penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka strategi untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan melalui sistem *zipper* menjadi sia-sia. Nomor urut menjadi tidak mempengaruhi tingkat keterpilihan. Awalnya, putusan ini sempat dikhawatirkan akan menyebabkan kegagalan peningkatan representasi perempuan di legislatif.

Namun, hasil penelitian *Women Research Institute* (WRI, 2010), justru menunjukkan bahwa representasi perempuan legislatif di beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan. Begitu pula halnya di DPR-RI. Jumlah perempuan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 mengalami peningkatan. Dari jumlah Anggota DPR-RI pada periode sebelumnya yang hanya sebesar 11,8% menjadi 18% (101 orang dari 560 Anggota DPR-RI). Jumlah ini merupakan pencapaian tertinggi representasi perempuan di parlemen sejak DPR Sementara.

Selama masa Orde Baru, pemilu berperan melegalisasi politik penyeragaman dalam semua lini, seperti yang dikemukakan oleh Fatah (dalam Emiyanti, 2001:8-9) bahwa salah satu politik penyeragam yang terbangun selama Orde Baru adalah politik tanpa representasi, yakni politik yang mengabaikan kaidah keterwakilan. Dalam sistem politik seperti ini, perempuan mengalami marjinalisasi politik. Partai politik tidak pernah memperhatikan aspirasi perempuan, jika ada hanya pada saat menjelang pemilu saja. Selanjutnya apabila pemilu usai dan wakilnya telah menjadi wakil rakyat dan daerah, maka perempuan kembali ditinggalkan. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa

posisi perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah. Disamping itu, meski pada sistem politik telah berubah, tetapi nasib dan kesadaran politik perempuan belum mengalami perubahan.

Gambaran umum tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang sangat rendah pada semua tingkat pengambilan keputusan, baik pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam birokrasi pemerintahan, partai politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Dalam hal ini rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam politik terjadi di Bali, yakni pada jajaran eksekutif. Begitu pula pada tingkat eselon II tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan tersebut, yakni dari sekiat banyaknya kepala desa/lurah di Bali belum ada perempuan yang banyak menduduki jabatan sebagai lurah, apabila ada itupun hanya beberapa saja.

Selain itu didalam organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Bali jarang sekali dan mungkin tidak ada perempuan yang menjadi *Bendesa Adat* atau *Bendesa Pakraman*. Hal ini juga tampak dalam kepengurusan organisasi lainnya seperti karang taruna dan *sekaa teruna*. Dalam organisasi seperti tersebut jarang sekali dapat ditemui perempuan menjadi ketua atau menduduki jabatan sebagai ketua atau wakil ketua. Berdasarkan hal tersebut, maka mempertimbangkan perspektif gender dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan keputusan adalah dasar kerangka kerja demokrasi yang akan mengarah pada kesetaraan (Soetjipto, 2000;447).

Sistem politik telah mengalami perubahan, jika zaman dahulu, sistem kampanye masih lebih banyak mengandalkan kemampuan (otak) dari sang calon. Orang-orang yang maju dan tampil untuk menjadi calon pemimpin, benar-benar berniat untuk mendedikasikan diri untuk

rakyat. Sehingga sekitar tahun 2004 tersebut, agak sulit untuk mencari calon legislatif. Mencari calon laki-laki merupakan hal yang cukup sulit, apalagi mencari calon perempuan. Hal inilah yang membuat wanita terlihat jauh lebih awam daripada laki-laki. Setelah terbitnya peraturan perundang-undangan tahun 2008 mengenai minimal 30% perempuan yang harus maju sebagai calon legislatif, baru mulai bermunculan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki potensi sebagai pemimpin dan penyalur aspirasi masyaraka.

Jika perempuan saat ini dinilai masih relative awam berpolitik maka pendidikan politik menjadi hal mutlak yang harus didapatkan oleh kaum wanita untuk memastikan kualitas partisipas politik mereka menjadi lebih baik. Namun jika dilihat dari keadaan alami wanita di masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Gayatri Chakavorty Spivak (1976) sebagai kaum dengan posisi subaltern maka keadaan awam ini menjadi wajar, sekaligus perlu ditangani agar tidak semakin parah. Mereka yang berada pada posisi subaltern ini memang relative sulit berkembang karena keadaan yang tertindas dan mereka menggangap keadaan tertindas itu sebagai kodrati yang memang sudah seharusnya diterima dan dijalani, lalu bungkam atas penindasan yang terjadi.

2.3 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Representasi politik merupakan aktivitas yang membuat suara, opini, dan perspektif warga muncul dalam proses pembuatan kebijakan. Squires (2000) menyatakan bahwa warga negara itu terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki suara dan kepentingan berbeda-beda yang didasarkan pada latar belakang, ras, etnis, agama, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Seluruh kelompok tersebut menginginkan agar suara, opini, dan kepentingan mereka terakomodir di dalam legislatif.

Selama satu decade terakhir ada kecenderungan peningkatan peran dan partisipasi perempuan. Di satu sisi

kaum perempuan tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk terlibat dalam politik sementara kaum pemilih merasa sangsi akan kemampuan mereka. Pada sisi lain, Partai Politik belum secara maksimal memberikan pendidikan kader yang sesuai berperspektif gender. Hasilnya komposisi perempuan di Pengurus Harian Partai Politik masih minim. Terbukanya peluang memperbaiki representasi perempuan seharusnya diimbangi dengan komitmen oleh Partai Politik guna penyiapan kader yang baik. Sesunguhnya, yang paling penting adalah membuka akses bagi peningkatan kapasitas dalam aktualisasi politik kaum perempuan, dan lebih jauh lagi mendorong keterlibatan perempuan untuk duduk di posisi-posisi penentu kebijakan publik.

Kesempatan dalam kiprah politik dan peran kepemimpinan bagi perempuan, penting untuk terus ditingkatkan tidak sekadar untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga membangun sistem dan etika politik yang semakin baik. Terkait dengan kapasitas perempuan sebagai pemilih, pemimpin partai politik, legislator, atau pejabat pemerintah harus memperbanyak kebijakan publik yang merefleksikan keberpihakan pada rakyat dan berperspektif gender serta diiringi derajat sensitifitas yang makin tinggi pada berbagai persoalan di tanah air (Hemas, 2012:27).

Keterwakilan Perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. *Affirmative action* dengan kuota 30% perempuan di parlemen ini merupakan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi begitu penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. Meskipun untuk konteks Bali, tercatat dalam tiga kali pemilu perempuan yang terpilih menjadi anggota legislative kuotanya baik di parlemen daerah maupun di provinsi masih jauh dari angka 30%. Keresahan mengenai prosentase kuota ini digambarkan

dalam sebuah karikatur yang dimuat oleh salah satu surat kabar terbesar di Bali, Bali Post.

Gambar 11
Gambaran Pandangan Masyarakat mengenai
Kuota 30% Perempuan di Parlemen
Sumber: BaliPost

Representasi di parlemen merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh anggota parlemen dalam menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat. Fungsi ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tujuan keberadaan perempuan dalam parlemen hendaknya dapat mempengaruhi proses politik yang terjadi di dalam parlemen dengan perspektif gender. Perempuan dalam parlemen harus menjadi garda utama dalam penentuan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung memiliki keterampilan dan kepekaan yang jauh lebih tinggi dalam beberapa bidang tersebut dibandingkan laki-laki. Sehingga nantinya kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bali sendiri, khususnya di Kabupaten Badung, keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat dikatakan belum maksimal. Bila di Pulau Jawa, hampir setengah jumlah

calon legislatif adalah perempuan, dan mereka banyak yang berhasil lolos menduduki anggota dewan dengan jumlah suara bersaing sengit dengan kaum laki-laki. Sedangkan di Bali, hanya beberapa partai yang calon perempuannya berhasil lolos di kursi anggota dewan. Selain itu, jumlah pencapaian suara yang diraih perempuan dan laki-laki masih relative jauh. Artinya suara tertinggi biasanya diraih oleh laki-laki, dan perempuan jauh di bawahnya. Representasi politik menurut Pitkin (Stanford Encyclopedia, 2006:1) adalah aktivitas yang membuat suara, opini, dan perspektif warga negara muncul di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik akan terjadi apabila politikus/aktor-aktor politik berbicara dan mengadvokasi.

Menurut Subono (2009:79) representasi politik perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting karena beberapa hal. Pertama, dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati *(no true democracy)* dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya *(no true people's participation)* dalam pemerintahan dan pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian untuk mewujudkan politik yang demokrastis, maka representasi perempuan sangat diperlukan. Kedua, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya partisipasi perempuan, bukan hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Florence Butegwa, seorang pengacara dari Uganda, dalam Subono (2009:80) mengatakan bahwa "partisipasi politik perempuan bukanlah sebuah kemewahan tetapi suatu kebutuhan" *(women's participation in politics is not a luxury, but a necessity).* Representasi politik perempuan adalah untuk menentukan perspektif dan tujuan pembangunan yang berpihak pada kepentingan perempuan. Ketiga, partisipasi perempuan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Hasil signifikan yang

diharapkan dari representasi perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan semakin banyaknya undang-undang yang sensitif gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Tabel 3
Jumlah Laki-laki dan Perempuan Anggota DPR, DPD. Dan DPRD Hasil Pemilu 2004, 2009 dan 2014 di Provinsi Bali

No	Pusat/Prov/ Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi	Hasil Pemilu 2004		Hasil Pemilu 2009		Hasil Pemilu 2014	
			Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	DPR RI dari Bali	9	7	2	9	-	9	-
2	DPD dari Bali	4	3	1	4	-	4	-
3	Provinsi Bali	55	51	4	51	4	50	5
4	Denpasar	45	42	3	44	1	44	1
5	Badung	40	39	1	39	1	39	1
6	Tabanan	40	39	1	38	2	37	3
7	Jembrana	30 35(2014)	29	1	24	6	31	4
8	Buleleng	45	43	2	41	4	39	6
9	Bangli	30	29	1	26	4	28	2
10	Karangasem	40 45(2014)	38	2	38	2	42	3
11	Klungkung	25 30(2014)	25	-	22	3	25	5
12	Gianyar	40	40	-	37	4	37	3
		403 418(2014)	385	18 (4,5%)	373	30 (7.5%)	385	33(7,9%)

Sumber: 2004 dan 2009, LSM Bali Sruti 2014 KPUD Provinsi Bali
Hasil Pemilu 2014 33 orang (7,9%)
Hasil Pemilu 2009 30 orang (7,5%)
Hasil Pemilu 2014 18 orang (4,5%)

Tabel tersebut menunjukkan minimnya representasi perempuan dalam bidang politik dan dominasi laki-laki tidak terbantahkan. Laki-laki memang masih menghegemoni dalam dunia politik. Kursi DPR RI dari Bali (9 kursi) hasil

pemilu tahun 2004 justru berhasil mendudukkan dua orang perempuan, selanjutnya tahun 2009 dan 2014 kembali dikuasai laki-laki. Demikian pula DPD RI, tahun 2004 sempat direbut oleh satu orang perempuan, selanjutnya Pemilu tahun 2009 dan 2014 kembali hanya diisi oleh laki-laki. DPRD Provinsi Bali dengan jumlah 55 kursi Pemilu tahun 2004 hanya berhasil mendudukkan 4 kader perempuan, sementara 51 laki-laki, tahun 2009 kembali hanya 4 orang perempuan yang berhasil lolos dan Pemilu tahun 2014 perempuan meningkat menjadi 5 kursi. Situasi yang sama juga terjadi di DPRD Kabupaten/Kota dimana keterwakilan perempuan masih sangat minim. Ini secara umum menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam bidang politik memang masih jauh dari harapan.

Terkait dengan isu di atas, Tamerius (1995:97) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada empat aspek gender yang dapat membuat anggota parlemen perempuan (juga laki-laki), akan memiliki sensitivitas terhadap isu kelompok jenis kelaminnya. Keempat aspek itu adalah:

a) *content (*perbedaan pengalaman hidup), yang sangat mempengaruhi pembentukan perspektif seseorang, serta bagaiman pemaknaan dirinya terhadap nilai-nilai kehidupan.
b) *perspective* (cara pandang yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan kebutuhan hidup yang berbeda). Hal ini mempengaruhi sensitivitas seseorang terhadap suatu kelompok atau kepentingan di luar dirinya.
c) *mutuality* (pemahaman terhadap kebutuhan kepentingan kelompok jenis kelaminnya sendiri); dan
d) *association* (bergabung di dalam suatu asosiasi akan mempengaruhi pengalaman, ideologi, dan membentuk tujuan hidup seseorang).

Pada kenyataannya, merepresentasikan kepentingan perempuan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Melainkan, ada kompleksitas yang bergantung pada berbagai level keadaan, dimulai dari level individu, kelompok pendukung, sistem politik, dan juga kekuatan eksternal lainnya. Secara individual, seorang perempuan belum tentu memiliki perspektif perempuan, karena pengaruh pengalaman hidup mereka. Pengalaman dan kebutuhan hidup seorang perempuan belum tentu sama dengan perempuan lainnya, sehingga seorang anggota parlemen berjenis kelamin perempuan, belum tentu memiliki kepedulian terhadap isu gender dan atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Begitu pula halnya dengan representasi perempuan parlemen sampai saat ini masih dianggap sebagai representasi jenis kelamin semata.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen memang harus diperjuangkan mengingat pentingnya kehadiran perempuan. Sesungguhnya jika dilihat dari isu gender, sangat mungkin bagi Caleg perempuan untuk memenangkan pertarungan, sebab jumlah pemilih perempuan tergolong besar. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legeslatif 2014 yang berjumlah 350.405 orang pemilih, menunjukkan jumlah pemilih perempuan yang tidak sedikit, yakni 176.340 orang pemilih perempuan atau sekitar 50, 32 %. Jumlah ini justru lebih banyak dari pemilih laki-laki sejumlah 174.065 orang atau 49,68 %. Jumlah pemilih perempuan justru lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi calon legeslatif perempuan yang terpilih hanya satu orang. Dengan demikian ada indikasi bahwa pemilih perempuan tidak memilih calon perempuan.

BAB III
EKSISTENSI PEREMPUAN HINDU DALAM KEGIATAN POLITIK

3.1 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Politik Menurut Pandangan Sastra

Sastra Hindu menjabarkan banyak pelajaran mengenai politik, kepemimpinan, etos kerja, dan tugas serta kewajiban kepala negara/ raja. Bhīṣma berkata kepada Yudhiṣṭira dalam Mahàbhàrata Śànti Parva. Ajaran Sri Bhīṣma ini terkenal sebagai ajaran politik dan kepemimpinan yang sangat tinggi;

(1) *Yasmin yathà vartate yo manuṣyah*
Tasminstathà vartitavyaý sa dharmah
Màyàcàrì màyayà pratyupeyah
Sadhvàcàrì sàdhunà pratyupeyah.

'Sebagaimana orang-orang menerima pergaulan, seperti itu pula hendaknya ia memberi pergaulan. Bergaul dengan orang jahat dihadapi dengan kekerasan, pergaulan dengan orang-orang baik dibalas dengan kebaikan).

(2) *Na narmayuktaý vacanaý hinàsti*
Na striûu ràjan na vivàhakàle
Pràóatyaye sarvadhanàpahàre
Pañcànåtànyàhurapatakàni

'Wahai Raja, ada lima macam kebohongan yang dianggap tidak berdosa, yaitu pada waktu bermain-main, di saat perkawinan, dalam keadaan jiwa terancam bahaya, di saat kemusnahan harta dan berbohong dengan wanita yang tidak baik'.

(3) *Àragyamànåóyamavipravasàh*
arthàgamo nityamarogità ca
Priyà ca bhàryà priyavàdinì ca
Sad jivalokasya sukhàni Ràjan.

'Wahai Raja, ada enam jenis kesukaan di dunia ini yaitu: kekuasaan yang baik, tidak punya hutang, tidak tinggal di negara lain, memiliki sumber penghasilan, tidak pernah sakit, dan istri cantik yang bertutur kata manis menarik'.

Kitab Mahàbhàrata Anusàsana Parva 104.6 juga mengajarkan tentang etos kerja, seseorang hendaknya giat bekerja demi kesejahteraan hidup di dunia ini:

(4) *Àcàràllabhate hyàyuràcàrallabhate úrìyam*
Àcàrat kirtimàpnoti puruûaá pretya echa sa.

'Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang, tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran dan bergaul dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan'.

(5) *Ûaðdoûaá puruûeóeha hàtavya bhùtimicchatà*
Nidrà tandrà bhayaý krodhaý àlasyaý dirgasùtrata.
(Mahàbhàrata Udyogaparva 33.78)

'Orang yang menginginkan kesejahteraan di dunia ini, dia harus neninggalkan enam jenis sifat-sifat yang tidak baik yaitu: suka tidur, malas, takut, marah, tidak bersemangat, dan selalu mengulur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan'.

(6) *Paràpavàdaý na brùyàd nàpriyaý na kadàcana*
Na manyuá kaúcidutpàdyaá puruûena bhavàrthinà.
(Mahàbhàrata Anuúasana Parva 104.105)

'Tidak menghina orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, tidak marah dengan orang lain, dan dengan kelakuan seperti itu orang-orang bisa memperoleh kemajuan'.

(7) *Pràninamavadhastàta sarvajyàyàn mato mam*
Ànåtaý và vaded vàcaý na tu hiòyet kathañcana.
(Mahàbhàrata Karna Parva 69.23)

'Wahai Saudara, pendapatku adalah bahwa tidak menyakiti mahluk hidup lain adalah kegiatan yang paling baik. Orang boleh berkata-kata bohong, tetapi dalam segala hal tidak boleh membunuh mahluk lain'.

(8) *Yathà yathaiva jìveddhi tat kartavyamahelayà*
Jìvitaý maraóàtsreyo jìvan dharmamavàpnuyàt.
(Mahàbhàrata Úàntiparva 141.65)

'Dengan cara bagaimana pun kita bisa melindungi jiwa mahluk lain, dengan penuh perhatian lakukanlah usaha itu. Dibandingkan dengan kematian, hidup adalah jauh lebih baik. Karena dengan hidup kita bisa memperoleh Dharma (menunaikan kewajiban-kewajiban) (Mishra, 1990:16)'.

Ajaran tentang politik dan kepemimpinan, tugas dan kewajiban raja/kepala juga diuraikan dengan sangat panjang dalam kitab Manava Dharma Sastra buku VII. Bahkan ajaran soal politik dijelaskan dalam 226 sloka. Inti dari ajaran tersebut adalah bagaimana peran politik seorang kepala negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Ajaran politik ini menjadi acuan bagaimana seorang kepala negara harus meneladani sifat-sifat Dewa demi kesejahteraan negara. Ajaran politik Hindu ini sangat mulia. Sloka kedua (Manava Dharma Sastra VII.2) langsung menyatakan tujuan utama dari orang yang mengemban tugas negara (*ksatria varna*);

Brāhmāṁ prāptena saṁskāraṁ
kṣatriyeṇa yathā vidhi
sarvasyāsya yathā nyāyaṁ
kartavyaṁ pari rakṣaṇam
Manava Dharma Sastra VII.2

"Kṣatria yang telah menerima sakramen menurut Veda, berkewajiban melindungi seluruh dunia sebaik-baiknya."

Ajaran- ajaran ini bersifat terbuka dan tidak menyasar hanya kepada laki-laki saja. Susastra Hindu tidak mengkotak-kotakkan, melarang atau bahkan mendiskriminasi perah seorang perempuan didalamnya. Sejak zaman peradaban manusia yang ditulis dalam Veda, dari peralihan Kerta Yuga sampai ke Kali Yuga apresiasi terhadap seorang wanita, istri atau perempuan sesungguhnya demikian penting. Mengingat citra seorang

wanita memegang kunci biduk kelangsungan rumah tangga. Pengkajian tentang kedudukan perempuan dalam agama Hindu sungguh sangat menarik, karena perempuan, istri atau wanita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Kita sulit memb ayangkan bila dalam masyarakat tidak terdapat seorang perempuan. Dalam sejarah perkembangan agama Hindu, bila kita melihat Veda dan susastra Hindu sebagai sumber kajian sejarah dan sosiologis, maka dalam momentum tertentu, wanita dilecehkan seperti kita jumpai dalam kisah Rāmāyaṇa (Dewi Sitā) dan dalam Mahābhārata (Dewi Drupadī) yang menjadi korban dari keserakahan dan hawa nafsu laki-laki. Banyak literatur dalam sastra Veda tentang kedudukan seorang wanita, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi didalam aspek kehidupan yang lainnya.

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga masyarakat dan bangsa dapat dilihat dalam Kitab Bhagavad Gītā *adhyāya* 1 Śloka 41 dan 42 yaitu:

adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Bhagavad Gītā I.41

Wahai Śrī Kṛṣṇa, dengan merajalelanya hal-hal yang bertentangan dengan *dharma* maka kaum wanita dalam keluarga akan menjadi tercemar. Duhai Varṣṇeya, ketika tingkah laku para wanita telah merosot, maka akan lahirlah keturunan yang tidak diinginkan.

saṅkaro narakāyaiva kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Bhagavad Gītā 1.42

Anak-anak yang tidak dinginkan seperti itu akan membawa keluarga maupun para penghancur keluarga itu sendiri ke neraka. Lenyapnya tradisi mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur akan mengakibatkan kejatuhan para leluhur.

Dari beberapa penjelasan Śloka diatas sangat jelas bahwa tanggung jawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan akhlak masyarakat. Selain itu wanita juga memegang peran sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan dalam keluarga masyarakat dan Negara. Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan dalam mitra yang sejajar. Berikut akan dijelaskan mengenai sosok dari seorang wanita yang dikutip dari beberapa kitab suci Hindu:

Yantri rad yantri asi yamani
Dhruva-asi-dharitri

Yajur Veda XIV.22

Wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang. Dia mengatur yang lain-lain dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal atau aset keluarga. Dia menopang keluarga.

Pada zaman India Kuno menyebutkan bahwa wanita berhak mendapat pendidikan yang sama yang menekankan pembelajaran-pembelajaran tentang kitab suci Veda yang telah berlangsung dalam Malaviyaji Benares Hindu University sejak 30 tahun silam (Wibawa, 2006: 7). Hanya saja ketika penyimpangan terjadi, wanita mendapat perlakuan deskriminatif karena dianggap sebagai sub-ordinat. Namun hal tersebut bukan merupakan ajaran Veda tetapi penerapan di masyarakat yang salah.

Dipertegas lagi dengan penghormatan kepada wanita sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab suci Veda,

pretaṁ pādau prasphuratam
vahatam pṛṇato gṛhān.
indrani-etu prathama-
ajītā amuśitā puraḥ

Atharvaveda 1.27.4

'Ya, kaki-kakiku, berbarislah maju dan bergegas. Bimbinglah kami ke rumah-rumah orang-orang yang tidak picik. Semoga Sang Hyang Indrani,

wanita yang tak terkalahkan, yang tidak terampas dan yang memberikan perintah bimbinglah kami.

Daksinyam svajane daya parijane sathyam sada durjane
Pritih sadhujane nayo nrpajane vidva jannesvarjanam
Sauryam satrujane ksama gurujane narijaneadhrstata
Ye caivam purusah kalasu kusalastesveve lokasthitih.

Niti Sataka, 18

Memperlakukan keluarga dengan baik, mengasihi orang lain, bersikap tegas terhadap penjahat, menghormati orang baik, bersikap bijaksana dengan para pemimpin, bersikap jujur dengan para bijaksana berani menghadapi musuh, pemaaf terhadap para guru, menghormati wanita, atas dasar-dasar itulah kehidupan berlangsung.

Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan seperti yang dijelaskan dalam Niti Sataka amatlah diperlukan dalam bidang politik. Mengenai sosok ideal seorang politisi itu juga termuat dalam Bhagavad Gītā XVIII.43 yang membahas jiwa Ksatriya yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Bhagavad Gītā XVIII.43

"Pemberani, berwibawa, memiliki ketabahan hati yang baik, mahir dalam peperangan, berjiwa pantang mundur, bersikap demawan, memiliki sifat seorang pemimpin adalah sikap seorang Ksatriya yang muncul secara alami."

Dari sifat-sifat yang dijabarkan diatas bahwa jelas perbandingan antara sorang perempuan dengan sifat yang harus dimiliki oleh politisi yang ideal, keduanya hampir memilki sifat yang sama. Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama

prajānārthaṁ striyaḥ sṛṣṭāḥ
samtānārthaṁ ca mānavāḥ
tasmāt sādhāraṇo dharma
śrutau patnyā sanoditaḥ

Manawa Darmacastra IX, 96

Untuk menjadi ibu perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya.

Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama" Manu Smerti mengumpamakan perempuan diumpamakan seperti bumi/ pertiwi/ tanah dan laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam menciptakan kehidupan.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa sesungguhnya Hindu secara tekstual memandang perempuan sebagai bagian yang tidak hanya eksis dalam politik namun sudah menjadi keharusan untuk ikut berkecimpung didalamnya.

Teks-teks Hindu menggambarkan dengan tegas bahwa wanita layak dan memiliki kualitas kualitas mumpuni untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik. Dengan demikian wanita sudah seharusnya eksis dalam politik. Sehingga, ketika ditarik dalam konsep teori feminism modern, konsep-konsep sastra justru lebih unggul. Teori feminisme kontemporer dimana tokoh yang paling populer dalam teori ini, Gayatri Chakravorty Spivak. Spivak meneorisasikan dengan pandangan dan keprihatinan pada sosok yang paling sering terbuang dari *episteme* yaitu perempuan yang dicabut hak-haknya. Spivak juga menekankan pandangan feminisme Asia berbeda dengan pandangan Barat ketika berbicara gender. Ia memandang peran dan kesejahteraan menjadi fokus utama dalam membicarakan feminisme. Dalam pandangan Spivak, laki-laki dan perempuan memang berbeda, tetapi memiliki peluang yang sama dalam banyak hal, termasuk dalam dunia sosial dan politik. Demikian pula dalam teori demokrasi,

menghendaki adanya persamaan peran dan tidak ada perbedaan atas gender. Kitab Suci Veda tidak membedakan peran sosial-politik atas laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh menjadi pemimpin, politisi, orator bahkan maju ke medan perang.

3.2 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Pandangan Politik di Bali

Gambaran umum tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang sangat rendah. Pada semua tingkat pengambilan keputusan, baik pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam birokrasi pemerintahan, partai politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Dalam hal ini rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam politik terjadi di Bali, yakni pada jajaran eksekutif. Begitu pula pada tingkat eselon II tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan tersebut, yakni dari sekian banyaknya kepala desa/lurah di Bali belum ada perempuan yang banyak menduduki jabatan sebagai lurah, kalo ada itupun hanya beberapa saja. Selain itu didalam organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Bali jarang sekali dan mungkin tidak ada perempuan yang menjadi *Bendesa Adat* atau *Bendesa Pakraman*. Hal ini juga tampak dalam kepengurusan organisasi lainnya seperti karang taruna dan sekaa teruna. Dalam organisasi seperti tersebut jarang sekali dapat ditemui perempuan menjadi ketua atau menduduki jabatan sebagai ketua atau wakil ketua. Berdasarkan hal tersebut, maka mempertimbangkan perspektif gender dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan keputusan adalah dasar kerangka kerja demokrasi yang akan mengarah pada kesetaraan (Soetjipto, 2000: 447).

Gambar 12
Pelantikan kaukus Legislatif Perempuan di Bali
Sumber Bali Sruti Edisi ke-5 Januari-Maret 2012

Kedudukan perempuan di masyarakat yang masih dianggap subordinat, yakni disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fsiologis antara laki-laki dan perempuan. Faktor padangan masyarakat sangat mempengaruhi keinginan seorang perempuan untuk memasuki ranah politik. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu untuk mengemban jabatan seperti laki-laki. Perempuan diremehkan karena hanya dianggap sebagai pelengkap kuota.

Selama ini perempuan selalu diletakkan sebagai perempuan lemah, sebagai orang kelas dua, tetapi itu terus dipikirkan, berontak dan kemudian berusaha untuk mendapat tempat, akhirnya perempuan akan kehabisan tenaga untuk memperjuangkan hal tersebut. Ada baiknya jika perempuan berhenti menyebut diri kelas dua, berhenti menyebut kelas pinggiran dan mulai berbuat. Berbuat sesuatu yang bisa memberikan pandangan bahwa perempuan tidak seperti apa yang mereka duga. Ketika

perempuan telah memperlihatkan diri, baik dalam pendidikan, dalam peranan, dan dalam aktivitas, orang laki-laki akan berpikir, "dia itu perempuan, tetapi dia adalah orang yang mampu". Tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah perempuan dan nanti tanpa sadar laki-laki akan menganggap perempuan dan laki-laki adalah sama kalau sama-sama mau mempergunakan kesempatan itu (Suryani, 2003:61-62).

Gambar 13
Baliho Caleg Perempuan Pemilu Legislatif
Sumber: mediasrikandi.wordpress.com

Perempuan harus lebih berani menunjukkan dirinya, perempuan harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjadi seorang pemimpin. Perempuan memiliki peran penting dalam kursi legislatif, dimana perempuan berperan sebagai penyeimbang dalam setiap keputusan yang akan diambil. Perempuan memiliki ketelitian yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki, terutama dalam hal administrasi dan keuangan. Sesungguhnya peran perempuan masih sangat dibutuhkan dalam jajaran pemerintahan, baik

pemikirannya, ide-ide, maupun gagasan. Perempuan cenderung memimpin dengan cara yang jauh lebih lembut dan lebih menyentuh. Perempuan Bali selama ini terbukti sudah mampu mengemban kesibukan dengan penuh tanggung jawab. Perempuan juga memiliki naluri yang lebih besar untuk melayani orang lain. Buktinya dalam tatanan keluarga, perempuan mampu melayani suami, anak-anaknya, serta anggota keluarga lainnya. Jiwa pelayanan yang dimiliki perempuan ini tentunya memiliki korelasi dengan jiwa pelayanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jiwa melayani masyarakat. Dengan segala kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan ini, sayangnya masih banyak perempuan Bali yang masih merasa pesimis dan takut untuk terjun ke dunia politik.

Tingkat partisipasi politik perempuan untuk memasuki ranah politik di Kabupaten Badung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya perempuan yang terdorong dan memiliki ambisi untuk maju dalam politik. Sebagian besar yang mengajukan diri sebagai calon legislatif motif awalnya adalah untuk memenuhi kuota, sekadar formalitas saja. Keikutsertaan perempuan dalam politik seperti dipaksakan, dan sekedar pelengkap agar partai politik bisa maju dalam pemilu.

Partisipasi perempuan di Badung dalam ranah politik sudah mulai terbuka dan perempuan sudah mulai ikut andil, hanya saja masih belum terlalu banyak di kancah politik. Sebagian besar perempuan maju hanya untuk memenuhi kuota 30% agar partai Politik dapat mencalonkan ikut pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum cukup tangguh untuk menembus dunia politik yang memang masih didominasi oleh laki-laki. Dalam hal ini laki-laki masih diuntungkan dengan berbagai konsep dan kebiasaan dominasi yang telah terbangun menjadi sebuah sistem di Bali.

Gambar 14
Menggunakan hak pilih merupakan salah
satu bentuk partisipasi politik.
Sumber: KPUD Kabupaten Badung, 2014

Badung sendiri partai Demokrat memiliki partisipasi politik yang cukup bagus. Sudah memenuhi kuota 30%. Kini telah 3 orang dari 40 orang yang ada namun dua diantaranya adalah PAW (Pengganti Antar Waktu), tidak terpilih langsung dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Bila di Jawa, hampir setengah jumlah calon legislatif adalah perempuan, dan mereka banyak yang berhasil lolos menduduki anggota dewan. Khusus di Partai Demokrat Kabupaten Badung, belum ada calon wanita yang lolos menjadi anggota legislatif. Untuk di Badung, khususnya di Partai Demokrat, pencapaian suara wanita belum ada yang mendekati jumlah suara laki-laki.

Berdasarkan data KPUD Kabupaten Badung yang dicantumkan dalam lampiran 3, dapat dilihat tingkat partisipasi politik perempuan di Badung pada tahun 2009 adalah 142 orang. Dari keseluruhan jumlah calon legislative

perempuan Kabupaten Badung tahun 2009 ini, 107 orang beragama Hindu, 26 orang beragama islam, 3 orang beragama protestan dan 6 orang beragama Kristen. Dari data tersebut dapat dilihat tingkat partisipasi perempuan Hindu di Badung pada tahun 2009 cukup bagus. Namun dari 142 orang yang mencalonkan diri hanya satu orang yang terpilih yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ni Putu Yunita Oktarini. Ini perbandingannya sangat jauh antara calon dan yang terpilih.

Merujuk pada data Daftar Calon Tetap Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Lampiran 4, dapat dilihat jumlah Calon Legislatif Perempuan adalah 109 orang. Dari jumlah tersebut hanya satu orang yang terpilih yaitu dari Partai Golongan Karya. Namun dalam perjalanan dua orang perempuan menjadi anggota legislatif sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW). Satu orang dari Partai Golongan Karya dan satu orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikut akan ditampilkan perbandingan tingkat partisipasi Politik perempuan di Kabupaten Badung pada tahun 2009 dan 2014.

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Calon Legislatif Perempuan, Jumlah Calon Legislatif Perempuan yang Terpilih, Data Calon Terpilih, dan PAW

PERBANDINGAN	TAHUN	
	2009	2016
Jumlah calon Legislatif perempuan	142 orang	109 orang
Calon yang terpilih	Ni Putu Yunita Oktarini (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan /PDIP)	Ni Luh Gede Sri Mediastuti, SE (Partai Golongan karya)
Pengganti Antar Waktu (PAW)	—	1. Ni Ketut Suweni (Partai Golongan Karya) 2. Putu Yunita Oktarini (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Jumlah Anggota Legislatif	1 orang	3 orang

Sumber: KPUD Kabupaten Badung

Merujuk datapada tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Badung dilihat dari jumlah calon menurun. Pada tahun 2009 jumlah Caleg Perempuan dari Partai politik sebanyak 142 orang, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya menurun menjadi 109 orang. Namun jika dilihat dari jumlah calon yang terpilih, partisipasinya semakin meningkat. Tahun 2009 yang terpilih hanya 1 orang sedangkan pada tahun 2014 walaupun jumlah yang terpilih masih 1 orang, namun kehadiran 2 orang perempuan lainnya karena PAW menaikkan persentase partisipasi perempuan di Kabupaten Badung. Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Badung semakin membaik. Tingkat kesadaran untuk memilih perempuan, sudah meningkat.

Partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak hanya dilihat dari jabatannya dalam panggung politik. Namun seorang perempuan yang mau ikut menyumbangkan hak suaranya dalam pemilu juga disebut dengan partisipasi politik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketut Wiana dalam buku Berpolitik Menurut Hindu bahwa Politisi dalam melaksanakan swadarmanya tidak mesti duduk sebagai pejabat formal. Politisi yang tidak duduk dalam jabatan formal seyogyanya aktif memberikan masukan secara tulus menyangkut urusan membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera (Wiana, 2015:128-130). Perempuan ikut dalam pemilu sebagai warga negara yang baik, pemilu sebagai salah satu aturan pemerintah harus dijalani dengan baik. Walaupun tidak maju menjadi calon, perempuan harus tetap memberikan hak suaranya pada saat pemilu.

Namun, alangkah baiknya jika ada perempuan yang maju ke dalam ranah politik tanpa paksaan dan atas kesadaran sendiri untuk menyuarakan suara perempuan. Kiprah perempuan harus lebih meningkat di segala bidang, tidak ada lagi pelecehan terhadap perempuan, perempuan

harus memiliki *power* dalam berkontribusi dan mengambil banyak peran di masayakat, perempuan harus memiliki etika yang baik, dan perempuan harus memiliki *skill* yang mumpuni agar memiliki *bargaining position* di masyarakat. Perempuan memang harus aktif, selain urusan rumah tangga juga aktif dalam mengurus urusan rumah tangga negara. Kehidupan berpolitik berkembang semakin baik, dengan berpartisipasinya perempuan dalam birokasi politik di Badung.

Eksistensi Perempuan Hindu dalam panggung politik berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas tergolong masih rendah. Hal ini yang sesunguhnya juga merupakan agenda Feminisme post modern yang di dengungkan, mengenai kesetaraan dan penghapusan penindasan terhadap kaum subaltern baik secara wacana maupun tindakan aksi nyata di masyarakat. Eksistensi perempuan dalam panggung politik juga sesungguhnya adalah bentuk budaya demokrasi yang mapan. Perwujudan cita-cita dan dasar dari demokrasi sebagaimana John L. Esposito (dalam Dunn, 1993) mengatakan bahwa dasar demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya semuanya (laki-laki dan perempuan) berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki dalam demokrasi memiliki kesempatan eksistensi yang sama besar.

3.3 Eksistensi Perempuan Hindu dalam Kegiatan Politik di Kabupaten Badung

Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat dalam diri seseorang untuk menjadi *feminim* yang berarti memiliki sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan tersebut biasanya diidentikan dengan lemah, tidak pemberani, memerlukan perlindungan dari seorang laki-laki dan dianggap sangat sedikit memiliki peluang untuk

berperan di luar misalnya ikut perpartisipasi di bidang politik. Dalam kesehariannya orang tua di Bali seringkali tidak pernah menanamkan pada putrinya bahwa perempuan adalah mahluk lemah yang harus dibantu dan dilindungi, sehingga jarang terlihat laki-laki Bali akan membukakan pintu mobil untuk pacarnya atau istrinya, atau membawakan barang-barang yang dibawa teman perempuannya, atau mengantarkan teman putrinya pulang (Suryani, 2003:42). Sehari-hari anak-anak melihat perempuan sebagai sosok yang kuat, tangguh dan mampu mengerjakan pekerjaan di rumah maupun di luar rumah, seperti mencangkul, menyunggi barang dikepalanya atau mengapur atau mengecat rumah tanpa banyak dibantu kaum laki-laki.

Gambar 15
Dewi, Perempuan Bali tetap menjadi tukang suwun walau sedang hamil.
Sumber: luhde.nawalapatra.com

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan dalam dunia politik sudah ada, sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini

sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Di era Kolonialisme Belanda kita mengenal RA Kartini, ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peranan perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan. Berkat pemikiran-pemikiran yang ia lahirkan, sehingga sampai saat ini pemikirannya masih menjadi bahan kajian para Kartini masa kini (Sumardio, 1976:53-60).

Gambar 16
Keaktivan caleg perempuan dalam kegiatan kampanye pilpres 2014, sebagai salah satu bentuk eksistensi diri dalam dunia politik
Sumber: Caleg-gerindra-tabanan.blogspot.com

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum". Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak ada yang

bisa menyangkal bahwasannya perempuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin dan di khidmad oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti yakni tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia, ia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri.

Di dalam bingkai kehidupan sosial dan politik, masyarakat Indonesia secara umum telah memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi peluang kuota 30% tersebut tidak sepenuhnya terisi dalam kursi legislatif Kabupaten Badung, karena masi sangat sedikit perempuan yang memiliki keinginan untuk maju, sungguh-sungguh berjuang dan ikut terjun didalam bidang politik. Sekalipun ada perempuan yang menempati kursi legislatif kebanyakan dari mereka dipaksa ikut bergabung dengan diberikan imbalan agar kuota 30% tersebut terisi.

Gambar 17
Salah satu Caleg Perempuan Provinsi Bali dari Kabupaten Badung
Sumber: www.indonesiamedia.com

Perempuan Bali di Kabupaten Badung maju menempati kursi caleg hanya bertujuan untuk memenuhi kuota 30% tersebut biasanya tidak ikut bertarung dalam mengumpulkan suara terbanyak, dapat dikatakan mereka hanya sebagai pelengkap saja. Sifat takut yang dominan dimiliki oleh seorang perempuan menyebabkan perempuan tersebut tidak terlalu keras memperjuangkan kedudukan yang ingin dicapai, mereka lebih memilih untuk mundur dibandingkan menerima cacian, sindiran, yang dikeluarkan oleh lawan maupun oleh masyarakat karena dapat dikatakan bahwa dunia politik merupakan dunia yang keras. Seseorang yang memilih terjun ke dunia politik haruslah memiliki sifat yang dapat dikatakan tebal telinga dan tebal muka. Ketika seseorang terjun kedunia politik apalagi menjabati kedudukan yang lebih tinggi, maka orang tersebut harus benar-benar tahan akan semua kejadian yang akan muncul dihadapannya. Resiko inilah yang tidak ingin ditanggung oleh sebagian besar perempuan Bali di Kabupaten Badung.

Demikian halnya dalam struktur organisasi partai, biasanya yang lebih dominan mengisi jabatan adalah laki-laki. Laki-laki cenderung memiliki keberanian dan totalitas yang lebih besar dibandingkan perempuan. Perempuan juga memiliki keberanian itu, namun ruang gerak perempuan biasanya terbatas karena masih terikat oleh banyak urusan domestik. Namun sekarang berbagai partai politik sudah makin bergerak untuk mengusahakan agar posisi laki-laki dan perempuan setara dalam kegiatan partai.

Ruang gerak perempuan dalam kegiatan politik sangat terbatas, terbatas oleh waktu dan kesempatan. Bagaimanapun juga, kaum perempuan tidak bisa lepas dari kesibukan domestiknya. Dalam setiap kegiatan perpolitikan, yang cenderung lebih menonjol adalah laki-laki. Hal ini tentu saja bukan merupakan kondisi ideal. Dalam pandangan Sastra Veda maupun teori feminisme postmodern, kehadiran perempuan dengan peluang yang sama memang harus terjadi demi kebaikan dan membangun kesejahteraan.

3.4 Hambatan Berpolitik Perempuan Hindu di Kabupaten Badung

Sejak adanya pergeseran zaman, pekerjaan konvensial wanita yang wajib melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menyetrika, melayani suami dan mengasuh anak dianggap pekerjaan yang ortodoks dan kurang bergengsi. Gender dalam perspektif modern mulai berbenturan dengan nilai gengsi dan persamaan hak. Sejak itu juga orientasi wanita pada dunia eksternal berubah keinginan adanya emansipasi dalam segala hal. Melompatlah peran wanita untuk menduduki jabatan disegala lini. Termasuk ada motivasi yang besar bahwa wanita terlibat dalam kancah politik praktis. Persepsi tentang dunia glamour dan eksotik adalah buah dari persepsi wanita untuk mengejar karier di luar pagar rumahnya. Memang patut dihargai bahwa dimata

Tuhan tidak ada diskriminasi malah diwajibkan adanya persamaan hak serta harkat martabat yang sejajar. Wanita menerobos kesegala lini pekerjaan, yang dulu merupakan ladang bagi kaum adam (Wibawa, 2006:19-20).

Namun berbeda dengan perempuan Bali, dikatakan bahwa perempuan Bali masih dalam keadaan yang tertindas. Perempuan Bali tidak diberikan kesempatan, perempuan Bali tidak diberikan tempat di DPR maupun DPRD terlihat dari jumlah anggota perempuan yang tidak sebanding dengan anggota laki-laki jika dilihat dari komposisi penduduk (Suryani, 2003:232).

Gambar 18
Kesibukan dalam *ngayah banjar* yang dirasa menjadi salah satu hambatan perempuan Hindu untuk maju dalam karir politik
Sumber: binginbanjah.wordpress.com

Apabila dicermati dengan lebih seksama, dalam mencapai pendidikan sampai ke universitas, dilihat dari jumlah penduduk, jumlah perempuan memang kurang dibandingkan laki-laki. Jika dilihat dari segi nilai yang diperoleh saat menempuh pendidikan misalnya yang memperoleh *cum laude,* nilai tertinggi mulai banyak diraih oleh perempuan. Seandaikan tingkat pendidikan dianggap

sebagai penghalang yang menyebabkan perempuan tidak mampu menempati posisi penting. Hal yang kemudian mesti dicari jawabannya adalah mengapa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang setara dengan laki-laki tidak mampu meraih tempat tertinggi. Hal yang bisa dikatakan aneh dari sosok seorang perempuan juga sekaligus sebagai suatu ciri khas bagi seorang perempuan yaitu ketika ada seseorang sedang memberikan ceramah, jarang sekali seorang perempuan tersebut bersedia mengeluarkan pendapat. Namun, jika ngobrol di suatu kelompok, kebanyakan dari mereka menjadi pembicara sekaligus pendengar yang hebat.

Perempuan cenderung lebih sulit mengalahkan kaum laki-laki yang disebabkan oleh Laki-laki lebih cepat bergerak dan gerakannya lebih bebas di masyarakat. Langkah perempuan sangat terbatas, kadang ada rasa malu, kadang ada rasa kikuk ketika harus bergaul dengan banyak laki-laki. Laki-laki pulang tengah malam tidak apa-apa ketika mengurus politik, tapi jika peremepuan mesti menjaga image sebagai seorang wanita. Di sana letak keterbatasan perempuan. Laki-laki langkah dan vokalnya lebih keras. Namun jika perempuan, bahasanya lebih halus dan lebih menyentuh. Oleh, perempuan harus berani menunjukkan bahwa apabila laki-laki bisa, mengapa kaum perempuan tidak bisa. Perempuan harus bangkit, karena kesempatan emas belum tentu datang dua kali. Jiwa harus dibesarkan. Untuk memberikan semangat ke massa, memerlukkan usaha dan semangat yang tinggi pula.

Hal lain yang menjadi hambatan eksistensi perempuan dalam panggung politik adalah kurangnya kemampuan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Hal ini menyebabkan tidak banyak perempuan yang paham terhadap politik yang sesungguhnya. Kebanyakan perempuan yang maju sebagai calon legislatif adalah karena keterpaksaan atau dorongan

dari pihak luar. Sehingga para perempuan maju di legislatif hanya sebagai formalitas saja, sehingga perempuan tidak terlalu ambisius dalam merebut suara. Selain itu, kasus fobia politik juga sangat mempengaruhi keinginan dan minat perempuan lain untuk terjun ke dunia politik.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Badung (tabel 6.4), pada tahun 2009 jumlah DCT (Daftar Calon Tetap) Perempuan adalah 142 orang, namun yang lolos menjadi calon terpilih hanya 1 orang. Sehingga jumlah calon perempuan yang gugur dalam perhelatan pemilu tahun 2014 di Kabupaten Badung adalah 141 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah DCT (Daftar Calon Tetap) Perempuan adalah 109 orang, namun yang lolos menjadi calon terpilih hanya 1 orang, dan terdapat 2 orang perempuan yang dilantik sebagai PAW (Pengganti Antar Waktu), sehingga total jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif tahun 2014 ini adalah 3 orang. Sehingga jumlah calon perempuan yang gugur dalam pemilu kabupaten badung tahun 2014 adalah 106 orang. Kegagalan dalam merebut kursi anggota dewan, secara tidak langsung juga bermakna kerugian pemikiran, tenaga, maupun biaya yang dihabiskan selam masa kampanye. Melihat kenyataan ini, maka tidak heran bila panggung politik menyebabkan munculnya fobia bagi perempuan di Kabupaten Badung. Fobia politik yang dialami oleh calon legislatif perempuan yang tidak berhasil dalam merebut kursi anggota dewan, tentunya menyebabkan ketakutan bagi perempuan lain untuk terjun di dunia politik.

Masalah lain, perempuan Bali belakangan ini lebih menyibukan diri dalam urusan mempercantik diri secara fisik, jarang yang bersedia mempercantik diri secara mental, secara intelektual. Selain itu perempuan Bali khusunya yang berada di Kabupaten Badung sangat terikat akan kebudayaan yang tidak bersifat statis memengaruhi dinamika perempuan Bali di Kabupaten Badung. Kuatnya pengaruh adat-istiadat yang mengakibatkan perempuan Bali khususnya Perempuan

Bali yang terdapat di Kabupaten Badung merasa terganggu langkahnya dalam melakukan aktivitas di luar khususnya mengambil peran dalam berpolitik, kewajiban mereka sebagai anggota *pekrame banjar,* dan sebagai seorang menantu mengakibatkan seorang perempuan tidak dapat lebih leluasa dalam bertindak, karena jika mereka tidak melakukan kewajibannya, maka mereka akan dikecam di dalam masyarakat adatnya maupun dalam keluarga. Kabupaten Badung masih kental dengan adat budayanya yang masi dipegang teguh oleh masyarakat Badung.

Kabupaten Badung khusunya dikecamatan Petang belum terdapat sistem *pengayah pengganti* atau jika yang bersangkutan tidak bisa *ngayah* atau melaksanakan kewajibannya sebagai anggota *pekraman* orang tersebut dapat meminta orang lain untuk menggantikannya dengan imbalan berupa bayaran atau yang lainnya. Sehingga tidak ada peluang bagi perempuan Badung untuk tidak melaksanakan *ngayah.* Hukum adat di Bali pada umumnya dilandasi oleh spirit moral Agama Hindu, dan jika dilihat dari sudut moral Agama Hindu perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan dimasyarakat seperti dalam upacara keagamaan maupun kegiatan sosial perempuanlah yang lebih banyak mengambil peran. Sehingga, seluruh masyarakat semestinya berupaya menciptakan kondisi ideal dimana baik laki-laki maupun perempuan dapat berkiprah demi membangun kesejahteraan.

3.5 Membuka Jalur Politik Perempuan Hindu di Kabupaten Badung

Perasaan kasihan yang orang Bali yang ditujukan kepada perempuan Bali yang bekerja, banyak menimbulkan keheranan pada diri perempuan Bali. Padahal perempuan Bali sendiri mengerjakan hal ini dengan santai, gembira, dan sering sambil ngobrol mengerjakan pekerjaannya seakan-

akan tidak ada hambatan pada dirinya. Masyarakat Hindu di Bali memandang perempuan bukan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi. Perempuan dianggap mempunyai kekuatan yang sangat besar yang dapat menciptakan keindahan, tetapi dapat pula membahayakan kehidupan di dunia ini (Suryani, 2003:42-43).

Pandangan perempuan yang menganggap laki-laki bukan musuh atau saingan dalam meniti karier, tetapi sebagai partner atau mitra dalam kerja adalah modal besar untuk terciptanya ketenangan dalam pekerjaan. Kedudukan yang diperoleh perempuan dalam kariernya, bukan karena belas kasihan atau supaya dikatakan pemerintah Bali telah menjalankan emansipasi, tetapi memang karena perempuan itu mempunyai kemampuan dalam menempati jenjang kariernya. Dengan adanya pandangan ini kiranya pembangunan daerah Bali tidak didasarkan atas perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai mitra kerja dalam membangun daerah Bali.

Agar perempuan Bali dapat berperan aktif dalam pembangunan, sejajar dengan kaum laki-laki, maka perempuan Bali harus tetap mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan informal atau formal. Aktivitas perempuan Bali tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya saja, tetapi juga perlu untuk mensejahterakan dirinya sendiri tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Bali (Suryani, 2003:50).

Keberhasilan dalam dunia kerja akan dapat di raih oleh perempuan apabila banyak perempuan dapat mencapai pendidikan formal yang baik. Seorang perempuan yang cerdas dan memiliki kemampuan yang baik akan memperoleh kedudukan dan penghasilan atas dasar kemampuannya. Peluang kerja di luar pekerjaan domestik cukup banyak untuk perempuan, khususnya di bidang politik. dalam hal politik, seorang perempuan harus berani

memposisikan dirinya menjadi tangguh dan berani berbicara.

Gerakan emansipasi selalu didengung-dengungkan. Dikatakan bahwa perempuan Bali masih dalam keadaan tertindas. Perempuan Bali tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan tempat di DPR maupun DPRD yang terlihat dari jumlah anggota perempuan tidak sebanding dengan komposisi penduduk. Perempuan harus berjuang untuk bisa menempati posisi ini agar perjuangan perempuan memperjuangkan kaumnya berhasil. Semua yang ingin dicapai harus melalui perjuangan, bukan minta diberikan tempat, bukan minta diberikan posisi karena perempuan. Emansipasi tidak menghendaki belas kasihan, emansipasi ingin menunjukkan kemampuan perempuan sama dengan laki-laki. Untuk itu perempuan harus berjuang memperolehnya. Boleh menuntut, boleh bercita-cita, namun perempuan harus melihat kenyataan, bagaimana kondisi perempuan di Bali (Suryani, 2003:56).

Seandainya tingkat pendidikan dianggap sebagai penghalang yang menyebabkan perempuan tidak banyak mampu menempati tempat penting, kenapa yang mempunyai pendidikan sama dengan laki-laki tidak mampu meraih tempat tertinggi. Kenapa di birokrasi tidak banyak perempuan yang berkiprah, walaupun mereka sudah sarjana. Itulah yang menjadi pertanyaan hingga sekarang. Saat ini mulai banyak perempuan yang memikirkan kesejahteraan hidupnya dengan menempuh pendidikan sampai ke jenjang universitas. Namun hanya sedikit yang berani maju ke dalam birokrasi, jarang dari mereka yang mau berbicara, jarang yang berani mengajukan pendapat. Namun kalau ngobrol dalam kelompok kecil, luar biasa tidak henti-hentinya. Mungkin hal ini terjadi karena banyak perempuan mempunyai otak betina yang lebih dominan, yang mempunyai sifat yang lebih menjaga hubungan baik dengan orang lain, kurang agresif dan tergantung dengan orang lain.

Sedangkan kalau perempuan mempunyai otak jantan tentu ia lebih agresif, berani maju, berani mencoba berani berdebat untuk mempertahankan pendapat, ambisius dan gigih bersaing untuk mencapai tujuan (Suryani, 2003:65)

Di Kabupaten Badung, peluang untuk seorang perempuan masuk ke dalam ranah politik tinggi. Namun hanya segelintir orang saja yang mengajukan dirinya untuk masuk ke dalam panggung politik. Memang ketertarikan perempuan saat ini, terutama remaja perempuan sangat rendah terhadap dunia politik. Dilihat dari organisasi-organisasi pemuda yang ada, jarang sekali perempuan yang menjadi pemimpinnya. Partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat diperlukan, untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Peluang politik di Badung sekarang sudah mulai terbuka dan ikut, hanya masih saja belum terlalu banyak dikancah politik hanya untuk memenuhi kuota 30% agar partai politik dapat mencalonkan ikut pemilu. Penyebab kurangnya ketertarikan perempuan terhadap politik karena berpolitik biasanya digunakan untuk kepentingan sesaat, terkadang untuk kepentingan sendiri dan melupakan kepentingan orang banyak.

Pandangan bahwa kehidupan berpolitik adalah kehidupan yang kejam dan biasanya didominasi oleh kaum laki-laki adalah salah satu alasan mengapa perempuan jarang terjun kedalam ranah politik. Untuk terjun kedalam politik sebagai perempuan itu harus benar-benar mempersiapkan diri secara lahir batin. Semuanya harus diisi, baik ilmu maupun pengalaman. Karena begitu terjun dalam dunia politik itu harus siap dibanting, dalam artian kalau siap maju ya harus siap dicela, itu kan lawannya tidak cuma satu, lawannya banyak, sementara persaingannya masih belum sesehat yang diinginkan. Disini dipertegas kekuatan dan ketahanan diri sangat penting bagi seorang perempuan untuk memasuki panggung politik.

Untuk membuka jalur politik di Badung, perlu diadakan pendekatan terhadap perempuan, agar mengetahui pentingnya politik. Tingkat pendidikan perempuan juga harus ditingkatkan. Hal yang harus dilakukan agar perempuan termotivasi untuk masuk ke dunia politik, antara lain adalah edukasi. Perempuan harus tahu bahwa mereka punya peranan dan penting terjun dalam dunia politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Ketut Suryani bahwa "agar perempuan Bali dapat berperan aktif dalam pembangunan sejajar dengan kaum laki-laki, maka perempuan Bali harus tetap mengikuti perkembangan zaman, dengan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan informal atau formal" (Suryani, 2003:50).

Seorang wanita yang ingin berkecimpung dalam dunia politik merupakan sosok yang harus memiliki kemampuan *multitasking*, karena harus memiliki kemampuan dalam membagi waktu antara kesibukan domestik (sebagai ibu rumah tangga) dan kesibukan dalam membangun karir atau aktif dalam kegiatan politik.

Sesuai dengan konsep *political efficacy*, dalam teori demokrasi, yang artinya mengacu pada perasaan bahwa partisipasi politik seseorang dapat berdampak terhadap proses-proses politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah. Demikian pula demokrasi menghendaki keharusan adanya kebebasan untuk berfikir dan berkeyakinan, kebebasan ilmiah, kebebasan mengeluarkan pendapat, *rule of law*, dan persamaan di muka hukum. Perlakuan demokrasi di setiap negara tidak selalu sama, oleh karena demokrasi pada kenyataannya, memang tumbuh bukan diciptakan. Olehnya, jalur politik perempuan mestinya diciptakan, dibuka, baik oleh perempuan sendiri, masyarakat maupun partai politik.

BAB IV
IMPLIKASI KEGIATAN POLITIK PEREMPUAN HINDU PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN BADUNG

4.1 Implikasi Pada Bidang Politik dan Sistem Demokrasi

Selama ini kaum perempuan selalu dihubungkan dengan urusan domestik, yakni melahirkan anak, mengurus anak, mengerjakan urusan rumah tangga, dan untuk masyarakat Bali dituntut pula menghasilkan uang untuk menunjang ekonomi keluarga. Langkah perempuan sangat terbatas, kadang ada rasa malu, kadang ada rasa kikuk ketika harus bergaul dengan banyak laki-laki. Laki-laki pulang tengah malam tidak apa-apa ketika mengurus politik, tapi jika perempuan mesti menjaga image sebagai seorang wanita. Semua kesalahan dan kejelekan mengenai anak dan keluarga pasti yang disalahkan adalah perempuan. Anak nakal, ibunya yang tidak becus. Suami kelayapan, istrinya yang tidak beres. Apa saja selalu dihubungkan dengan perempuan. Memang sebagai perempuan harus bangga karena semua urusan erat hubungannya dengan perempuan. Perempuan adalah manusia super yang harus bisa menyelesaikan segala hal. (Suryani, 2003:69)

Dengan kondisi seperti ini, perempuan harus menyadari bahwa disadari atau tidak, masyarakat menghargai perempuan mempunyai peranan besar dalam kehidupan manusia ini (Suryani, 2003:69). Partisipasi perempuan dalam masyarakat juga diperlukan, sekarang perempuan sudah mulai masuk ke dalam ranah politik. Dengan masuknya perempuan dalam ranah politik tentu menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan tentunya dalam birokrasi di Indonesia.

Gambar 19
Antusiasme Pemilih Perempuan bahkan yang lanjut usia untuk menggunakan hak pilihnya
Sumber: KPUD Kabupaten Badung

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan perempuan sudah sangat padat yaitu, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, bermasyarakat dan sekarang ditambah dengan berkarier di bidang politik. Tentu ini sangat sulit untuk mengatur waktunya, namun terbukti perempuan bisa melakukannya. Perempuan itu memiliki banyak cara untuk mengatur waktunya. Misalnya di kabupaten Badung terkenal dengan adatnya yang kuat. Seorang perempuan harus *ngayahang banjar*, namun disisi lain harus berkarier. Disanalah perempuan akan melakukan inovasi-inovasi baru. Mereka akan menyarankan untuk *ngayah* dilaksanakan pada sore hari, agar kegiatan kantor tetap bisa dilaksanakan. Kalaupun tidak bisa maka akan digantikan oleh orang lain dengan memberikan bayaran.

Peran ganda pada perempuan Bali-Hindu telah tertanam sejak kanak-kanak. Pola asuh dan budaya

masyarakat mengarahkan perempuan untuk berperan ganda dalam hidupnya. Peran ganda yang dirasakan perempuan Bali bukan sebagai beban, tetapi suatu pengabdian untuk keluarganya sendiri disamping menjaga harga diri dan martabat keluarga asalnya. Perasaan ini dapat menjamin ketenangan dalam keluarganya sendiri, sehingga tidak terjadi benturan antara suami dan istri dalam menjalankan tugas rumah tangga. Ketenangan dalam keluarga akan menciptakan ketenangan dalam masyarakat yang sangat membantu dalam melancarkan jalannya pembangunan daerah Bali (Suryani, 2003:49).

Perempuan yang masuk dalam ranah politik, memberikan dampak positif dalam pembangunan di Indonesia. Perempuan dianggap lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat, karena terbiasa mengurusi urusan rumah tangga. Perempuan tahu banyak tentang harga-harga pangan sehingga sangat membantu di bidang ekonomi.

Kehidupan demokrasi di Indonesia bersifat terbuka, karena rakyat mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan rakyat, dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Arti lainnya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Suryani, 2003:52).

Pemaknaan demokrasi yang disampaikan oleh Schumpeter, adalah sebagai kebaikan bersama (*common good*). Merujuk pada ide awal pembentukan Negara dikatakan bahwa kebaikan bersama merupakan ujung dari kehendak bersama kolektif warga masyarakat. Karena itu, lanjut Schumpeter, tujuan sistem pemerintahan demokratis ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik (Agustino,2009: 40-41). Jadi demokrasi merupakan hal yang penting dalam suatu Negara,

agar masyarakat bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang satu.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik membawa perubahan yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perempuan sudah mulai berani menyuarakan hak-hak kaumnya dan mulai memikirkan masa depan bangsa dan negaranya. Keterlibatan perempuan sangat penting untuk pembangunan di Indonesia. Dalam kebijakan ODA tahun 1989 disampaikan bahwa "Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan berpengetahuan, serta memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, ketrampilan dan kredit, mereka akan lebih produktif secara ekonomis. Selain itu, perempuan memiliki pengaruh dominan terhadap generasi yang akan datang melalui sikap, pendidikan dan kesehatan mereka" (Mosse, 1996:206). Perempuan yang cerdas melahirkan generasi yang cerdas, membawa kemajuan bagi perkembangan negara.

Selain itu perempuan lebih mudah untuk menyentuh hati masyarakat, karena perempuan bersifat lembut dan keibuan. Sehingga masyarakat tidak merasa segan untuk menyampaikan permasalahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perempuan lebih memahami bagaimana kehidupan masyarakat. Perasaan dan intuisi perempuan sangat kuat. Jarang laki-laki memiliki. Laki-laki biasanya maskulin. Ada rasa kasih seorang ibu, ibu punya rasa yang lebih tajam. Kehadiran perempuan dalam politik sangat membantu mengimbangi birokrasi di Indonesia. Anggota legislative perempuan cenderung lebih *attention to detail*, lebih teliti dan cermat baik dalam hal administrasi maupun hal-hal lainnya. Terjunnya perempuan dalam demokrasi di Indonesia, membuat kehidupan berdemokrasi di Indonesia berimbang. Permasalahan-permasalahan yang akan menjadi sorotan oleh pemerintah, bukan hanya masalah *hard politics* (pertahanan keamanan, nuklir, dan lain-lain), namun permasalahan

sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan juga merupakan masalah yang akan menjadi sorotan utama, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Bila perempuan sudah menduduki posisi dan hak yang sejajar dengan laki-laki dalam pemerintahan, maka itulah saatnya perempuan berani menyuarakan suaranya seperti laki-laki. Perempuan sudah mulai memikirkan nasib bangsanya.

4.2 Implikasi Pada Bidang Sosial Budaya

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang telah berperadaban tinggi dan telah berkembang ratusan tahun hingga sekarang ini. Hal ini tidak saja berarti masyarakat Bali memiliki pengalaman hidup yang luas, tetapi juga berpengalaman dalam menghadapi konflik sosial, termasuk dalam menghadapi kekerasan dan perang. Masyarakat Bali memiliki "budaya imajinasi" yang sangat kompleks tentang realitas konflik sosial sehingga mereka memiliki pandangan berbeda tentang konflik sosial dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Perbedaan manusia berdasar jenis kelamin (*sex*) dikenal sebagai *sexual differentiation* atau pembedaan seksual. Sedangkan gender merupakan istilah yang berarti hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin tersebut. Gender sebagai fenomena sosial mengandung makna sebab akibat atau implikasi sosial (kemasyarakatan) yang muncul dalam masyarakat karena pembedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akibat-akibat sosial ini bisa berupa pembagian kerja, sistem penggajian, proses sosialisasi dan sebagainya. Gender sebagai fenomena budaya berarti akibat-akibat atau implikasi dalam budaya (yaitu pada pola dan isi pemikiran) yang muncul dalam masyarakat karena adanya klasifikasi dualistis yang didasarkan pada perbedaan antara laki dan perempuan.

Pembedaan laki-laki dan perempuan bukan merupakan masalah bagi kebanyakan orang, tetapi pembedaan ini menjadi masalah ketika menghasilkan ketidaksetaraan, dimana laki-laki memperoleh dan menikmati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan daripada perempuan. Jadi yang menjadi persoalan bukan hanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, pembedaan laki-laki dan perempuan telah menjadi landasan ketidaksetaraan tersebut, karena masyarakat memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Gender sebagai persoalan sosial-budaya adalah ketidaksetaraan gender yang menghasilkan pelbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan berdasar jenis kelamin dan perempuan merupakan pihak yang lebih rentan sebagai korban. Semuanya ini merupakan kenyataan yang dibentuk oleh tatanan sosial, budaya dan sejarah, karena itu sebenarnya dapat dan perlu dirubah. Perubahan ini tentu saja tidak mudah, karena untuk dapat melakukannya diperlukan analisis serta penarikan kesimpulan yang tepat.

Peran gender *(gender role)* tersebut kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya. Akibat dari ketidakadilan gender tersebut antara lain: (1) marginalisasi perempuan, (2) penempatan perempuan pada subordinat, (3) *stereotype* perempuan, (4) kekerasan *(violence)* terhadap perempuan, dan (5) beban kerja tidak proposional. Masalah sulitnya membangun kesetaraan dan keadilan gender baik melalui jalur struktural maupun kultural tidak lepas dari lima hal tersebut di atas (*stereotype,* subordinasi, marjinalisasi, beban berlipat dan kekerasan terhadap perempuan), yang terus menerus berlangsung karena terdapat legitimasi yang menjadi hambatan dalam membangun kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Sumber legitimasi dimaksud

adalah: (1) Legitimasi sosial budaya, (2) Legitimasi interpretasi agama, dan (3) Peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender (Marhaeni, 2008:5).

Dengan adanya ketimpangan gender seperti itu maka diperlukan keadilan gender (*gender equality*). Keadilan gender adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan secara adil. Kesetaran gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action.*

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam sosial-budaya dan pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Namun sampai saat ini banyak perempuan yang masih terabaikan karena kurang informasi dan kurang menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara. Secara umum masih sedikit yang menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi persoalan yang gender spesifik, artinya

persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau satu kelompok orang menyandang gender perempuan. Masih banyak yang tidak bisa mengerti mengapa persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Mereka juga belum menyadari adanya kepentingan kesetaraan berpartisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang disebabkan oleh perpanjangan keisolasian (Hubeis, 1998). Hal ini antara lain disebabkan lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung, untuk membiarkan wanita berpatisipasi dalam politik dan penentu keputusan nasional, dan adanya kelembagaan yang masih terus membatasi wanita pada kekuasaan marginal.

Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial pada dasarnya tidak dipermasalahkan di masyarakat, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan. Berikut adalah beberapa bukti ketimpangan gender di bidang sosial-budaya yang terjadi di masyarakat.

a) Status Sosial

Status gender perempuan terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan, kesehatan, dan posisi dalam proses pengambilan keputusan umumnya memberikan dampak tertentu terhadap produktivitas mereka. Rumpang lebar yang terjadi antara pencapaian pendidikan laki-laki dan perempuan, disertai kenyataan bahwa perempuan secara umum kurang memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan telah menciptakan konsekuensi kritis terhadap perempuan dalam peran produktif dan reproduktif mereka.

b) Hambatan Memperoleh Pekerjaan

Peluang gender tertentu guna memperoleh pekerjaan sering dihubungkan dengan norma tradisional. Pada umumnya pekerjaan gender perempuan dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga. Pekerjaan gender perempuan juga sering dinilai berkarakter rendah, bersifat marginal, dan mudah disingkirkan. Selain itu gender perempuan menghadapi hambatan mobilitas relatif. Dalam hal ini perempuan seringkali enggan bekerja jauh secara fisik, karena mereka diharapkan selalu berada dekat dengan anak-anaknya.

c) Status Pekerjaan

Sering terjadi pembedaan posisi untuk gender yang berbeda. Perempuan sering memperoleh posisi yang lebih rendah dari rekannya laki-laki. Demikian juga sering terjadi imbalan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Dari segi teknologi, gender tertentu seringkali mengalami lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya.

d) Beban Ganda

Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga. Sementara laki-laki hanya mempunyai tuntutan peran sekuental.

Pada kenyataannya, perempuan cenderung lebih terampil dalam bekerja dan lebih taat mengikuti aturan/norma yang ada. Di bidang sosial-budaya, legislator perempuan akan cenderung lebih kuat tekadnya dalam

mempertahankan tradisi dan budaya. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. Walaupun dalam dunia global, pemimpin perempuan akan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak mudah tergerus. Perempuan juga lebih sabar dan cenederung menggunakan logika dalam menyelesaikan suatu konflik sosial. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Terdapat banyak kelebihan perempuan dibanding laki-laki dalam memberikan dampak sosial-budaya melalui kebijakan yang diambil.

Terjunnya wanita ke dunia politik merupakan hal yang membanggakan, karena sudah mampu mewakili rakyat dengan menjadi anggota dewan yang notabene kedudukannya sejajar dengan laki-laki. Seperti diketahui bahwa perjuangan untuk sampai duduk menjadi seorang anggota dewan bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi seorang perempuan. Dalam paradigma umum masyarakat, wanita masih dianggap lebih lemah daripada laki-laki, sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian, perempuan dalam kedudukannya di rumah tangga, biasanya mendapatkan posisi nomor dua (berada di bawah kepala keluarga/ laki-laki). Apabila seorang wanita ingin maju sebagai calon legislatif, tentunya harus mendapat dukungan penuh dari suami, mertua, dan keluarga. Selain itu, ruang gerak wanita dalam keluarga adalah sangat terbatas karena terikat oleh kewajiban di rumah tangga dan di adat/banjar. Kebanyakan perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga, karena naluri keibuannya terkadang merasa bahwa dunia politik terlalu keras untuk mereka. Di samping itu, untuk maju sebagai calon di legislatif, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan berpikir (otak), namun juga memerlukan biaya (ongkos) yang tidak sedikit. Seperti diketahui bahwa di Bali yang menganut budaya patriarki, yang mendapatkan hak waris adalah laki-

laki, bukan perempuan. Sehingga seorang perempuan jika ingin terjun ke dunia politik, harus siap secara mental maupun finansial.

Dalam proses penelitian ini, peneliti sempat menghubungi beberapa calon legislatif perempuan yang tidak berhasil lolos dalam Pemilu 2014 lalu untuk mengadakan wawancara. Namun, kebanyakan para calon legislatif tersebut tidak bersedia untuk diwawancara. Mereka mengatakan, "Tidak mau mengungkit-ungkit hal itu lagi". Hal ini kemungkinan karena terdapat fobia politik yang dikarenakan belum berhasilnya para calon tersebut untuk menduduki kursi anggota dewan. Proses mengkampanyekan diri dan mengenalkan diri ke masyarakat tentunya memerlukan perjuangan yang berat, baik dari segi pemikiran, tenaga, mental, emosional, maupun finansial. Hal ini merupakan salah satu dampak sosial yang penting untuk dicarikan solusi, agar nantinya fobia seperti ini tidak menjadi ketakutan pula bagi generasi muda perempuan lainnya yang ingin menjadikan dunia politik sebagai salah satu agenda perencanaan karirnya.

4.3 Implikasi Pada Kebijakan Publik

Pada bidang politik di Kabupaten Badung, baik pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, masih didominasi kaum laki-laki. Bukan berarti tokoh politik perempuan dan pemimpin perempuan di bidang pemerintahan tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh dari imbang dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan publik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian

besar masih beranggapan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, perempuan mengikuti saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik, serta segudang persepsi patriarki lainnya.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif baik itu berupa manusia, benda, atau tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan (Sumartopo, 2000). Tindakan yang telah diputuskan juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan atau memperkecil resiko kerugian harus ditanggung bila peristiwa yang sudah dicoba terulang lagi.

Prasyarat mutlak yang dimungkinkan dalam mengambil keputusan sangat ditentukan pada akses dan kontrol yang dimilikinya. Akses kepada dan kontrol atas pengambilan keputusan adalah bagian dari kondisi-kondisi yang harus dimiliki oleh siapapun. Tidak dimilikinya akses dan kontrol atas pengambilan keputusan oleh perempuan menyebabkan perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan dan menikmati manfaatnya. Akses dan kontrol atas berbagai sumber daya yang dimiliki oleh dan laki-laki secara adil, merupakan faktor-faktor penting dalam mencapai kondisi yang adil dalam menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Akses ke berbagai sumber daya berarti memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber-sumber daya penting (misalnya pendapatan, tanah, rumah, sawah dan sebagainya) tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan keputusan yang berkaitan dengan hasilnya. Contohnya, buruh tani (perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki tanah/sawah tetapi mereka mengerjakan sawah/tanah milik orang lain dan menerima sebagian kecil upah dari hasil kerjanya).

Kontrol atas berbagai sumber daya berarti memilki kewenangan penuh misalnya memutuskan penggunaan sumber daya yang dimiliki serta hasil yang diperoleh, kewenangan penuh atas tubuhnya sendiri seperti menentukan berapa anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan, maka perempuan itu sendirilah yang seyogyanya menentukan, bukan suaminya, orangtuanya, mertuanya, pemerintahnya, dan sebagainya. Sebab, perempuanlah yang memiliki pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan reproduktifnya.

Keputusan merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi, walaupun keputusan tidak selalu merupakan pemecahan dari suatu masalah, bila keputusan tersebut tidak tepat. Situasi dan kondisi yang terus berubah makin menyulitkan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu pengambil keputusan perlu berpikir secara dinamis atau bahkan futuristik. Setelah membuat perhitungan secara sistematis dan logis, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan resiko atau akibat dari suatu pemilihan masalah.

Struktur dan sistem dari kerangka pengambilan keputusan sangat tergantung pada:

a) Posisi pengambil keputusan
b) Kedudukan masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan
c) Situasi dimana pengambil keputusan itu berada
d) Kondisi pengambil keputusan yang meliputi kemampuan dan kekuatannya untuk mengadapi masalah tersebut
e) Tujuan yang harus dicapai dari pengambil keputusan tersebut

Proses pengambilan keputusan menurut Miriam Budiardjo (1998:35) adalah suatu proses pemilihan alternatif,

baik itu berupa manusia, benda atau tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan. Keputusan adalah menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukan siapa yang akan melakukan serta bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

Selanjutnya Atmosudirdjo (1982:79) menyebutkan proses pengambilan keputusan sebagai berikut.

a) Mendudukan diri sebagai pemimpin
b) Mengidentifikasi dan menelaah masalah yang ada
c) Pengidentifikasian dan pemilihan serta penilaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan pengambilan keputusan
d) Menelaah situasi dan kondisi
e) Menelaah keputusan yang akan diambil mencari alternatif-alternatif
f) Tindak lanjut dari keputusan yang diambil

Proses pengambilan keputusan merupakan inti dari suatu kepemimpinan. Oleh karena itu, efektifitas kepemimpinan seseorang dapat diukur melalui kemahirannya dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan kemampuan mempengarhi perilaku orang lain menjadi bawahan seseorang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong yang kuat bagi tindakan-tindakan positif demi kepentingan organisasi. Kelangsungan suatu organisasi sangat tergantung pada keputusan pimpinan yang didasarkan pada efektifitas dan efisiensi dalam mengambil keputusan agar menghasilkan dampak yang terbaik bagi organisasi/pemerintahan secara keseluruhan.

Apabila kaum perempuan kehilangan akses dan kontrol dalam mengambil keputusan, hal ini akan mengakibatkan suatu keadaan tersubordinasi sehingga melahirkan ketergantungan yang berlebihan pada kaum laki-laki. Dalam isu-isu gender, ketergantungan melahirkan

keadaaan yang dialami oleh kaum perempuan yang tidak memiliki penguasaan (kontrol) atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam banyak negara-negara Selatan (negara-negara dunia ketiga), ketika pendapatan kaum perempuan (misalnya, dari pertanian atau kerajinan tangan) dirusak, kaum perempuan tergantung secara ekonomi dan tergantung dalam pengambilan keputusan.

Pada kenyataannya pasca masuknya perempuan kedalam arena legislative ada perubahan yang bisa diapesiasi dari kerja politik perempuan di parlemen baik itu tingkat nasional dan local, sebagaimana di tulis dalam Majalah Bali Sruti Edisi 5, Januari-Maret 2012:

Lahirnya undang-undangn Kewarganegaraan, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam RUmah Tangga adala contoh terobosan positif dari peran yang telah dimainkan politisi perempuan di parlemen. Di tingkat lokal kita bisa mencatat lahirnya perda/perdes, ranperda, SK Bupati/wali kota/ SK Gubernur tentang beragam isu seperti perda KDRT di Bone, Ranperda pengutamaan Jender di Yogyakarta, SK Wali kota tentang pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak di Bengkulu; hingga kenaikan APBN dan APBD di berbagai daerah untuk biaya pendidikan dan kesehatan, maupun eksperimen dan inovasi pelaksanaan otonomi daerah dengan catatan keberhasilan yang ditunjukkan pemimpin perempuan di Kebumen, Gunung Kidul, dan Pekalongan (Bali Sruti, Edisi 5, Januari-Maret 2012:30).

Perempuan sesungguhnya memegang peran yang sangat vital dalam turut serta menentukan kebijakan pemerintah. Apabila perempuan duduk di legislatif, maka perempuan memiliki wewenang dan *power* untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat untuk mengkawal kebijakan pemerintah. Perempuan cenderung mengetahui bagaimana keadaaan atau kondisi masyarakat

yang sesungguhmya, baik kondisi ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Perempuan juga memiliki perasaan dan hati nurani yang lebih peka, terutama dalam masalah-maslaah yang riskan seperti kesejahteraan masyarakat, pelecehan seksual, kasus HIV-AIDS, kekerasan, buta huruf, dan sebagainya.

Hal di atas sejalan dengan apa yang ditulis oleh Vicky Randall (1982), dimana dalam tulisannya ia mengindikasikan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan lingkup politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lainnya. Kehidupan politik barangkali akan lebih bermoral karena perempuan lebih mementingkan isu-isu *Conventional Politics* seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada *Hard Politics* seperti anggaran pembelian senjata, perang, nuklir, dan sebagainya.

Walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih luas terjadi di berbagai bidang. Di bidang politik, tema mengenai partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan menjadi tema sentral yang harus segera diselesaikan. Emansipasi akan dapat dinikmati oleh perempuan dalam segala lapisan apabila kebanyakan perempuan dapat mencapai pendidikan formal sama dengan laki-laki. Sebab perjuangan perempuan dalam emansipasi bukan untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi perempuan memperoleh kedudukan sehingga dapat turut menentukan kebijakan publik.

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjelang Pemilihan Umum 2009, ada kebijakan penting terkait dengan permasalahan kuota perempuan dalam panggung politik Indonesia. Salah satu kebijakan penting itu ialah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Tentu ada alasan yang mendasar mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD). Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggungjawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang

terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan lain sebagainya.

Perempuan dalam pengembangan kiprahnya sebagai warganegara mempunyai harapan sebagai pemilik masa depan bangsa yang secara fungsional mampu menempatkan diri sebagai tenaga pembaharu, dinamisator dan katalisator untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu perempuan dalam menghadapi tantangan globalisasi harus membekali dirinya dengan ilmu, teknologi dan berbagai macam kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsanya. Artinya, bahwa perempuan karena dipengaruhi naluri keibuannya, ia memilih untuk tinggal di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Pekerjaan mengurus rumah tangga menjadi pilihannya sehingga ia tidak mempunyai keinginan untuk melakukan kerja produktif.

Ada beberapa faktor yang menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di dalam sektor publik. Faktor tersebut antara lain adalah faktor internal yang datangnya dari dalam diri perempuan itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari lingkungan.

Faktor internal antara lain adalah sebagai berikut.

a) Apabila dilihat dari kompetensi dan pengetahuan perempuan tidak kalah dengan laki-laki, namun perempuan cenderung lemah dari segi keberanian.
b) Dalam melakukan suatu hal, perempuan biasanya lebih senang bermain jujur dan mengikuti

norma/aturan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa dunia politik identik dengan kekerasan, pertentangan, menghalalkan segala cara, dan lain sebagainya. Karena sikap "polos" dan jujur seorang perempuan, hal ini mengakibatkan perempuan kalah dari segi strategi dalam pertempuran politik.

c) Sikap "*pakeweh*" yang dimiliki oleh perempuan, artinya perempuan berada dalam posisi yang sulit dan memiliki ruang gerak yang sempit. Perempuan kadang sulit bergaul, dalam hal ini ketika bergaul dengan orang lain yang baru dikenal atau lawan jenis ada muncul perasaan tidak enak dan rasa sungkan. Ketika seorang perempuan diharuskan pergi melaksanakan tugas di malam hari, terkadang ada rasa enggan karena terkait dengan norma-norma di masyarakat.

d) Hal-hal yang diperlukan dalam berpolitik tidak hanya kompetensi dan relasi, namun finansial merupakan hal yang sangat menentukan. Perempuan terkadang kalah dari segi finansial karena seperti diketahu bahwa di Bali hak waris selalu dipegang oleh laki-laki karena di Bali menganut sistem patrineal. Hal ini menyebabkan segala asset dan kekayaan keluarga lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.

Faktor Eksternal antara lain adalah sebagai berikut.

a) Seorang perempuan dengan profesi apapun, tidak pernah bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sehingga konsentrasi yang dimiliki buyar dan bercabang. Di satu sisi, ia harus memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai menantu dari mertuanya. Ditambah lagi para perempuan Hindu di Bali yang terikat oleh adat-istiadat di banjara atau

desa, yang menyebabkan perempuan diwajibkan untuk membuat berbagai jenis banten, *ngayah*, *tedun*, dan lain-lain. Belum lagi perempuan yang diharuskan turut serta meniti karir untuk mencari penghasilan untuk keluarga. Sehingga perempuan yang terjun di ranah politik merupakan perempuan yang memiliki kemampua strategi dan time management yang baik.

b) Masyarakat terkadang meragukan kemampuan dari seorang perempuan dalam memimpin dan terjun di dunia politik, sehingga perempuan merasa pesimis di awal tidak leluasa dalam melangkah.

c) Perempuan yang maju sebagai calon legislatif, terkadang dianggap hanya sebagai pelengkap kuota persyaratan 30% agar sesuai dengan undang-undang. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang maju tidak atas keinginan, niat, dan kompetensi sendiri, namun karena didorong bahkan "dibayar" untuk mau maju sebagai calon legislatif.

Upaya untuk mengentaskan ketidakberdayaan perempuan yang berkaitan dengan kualitas perannya dibidang politik dalam menentukan kebijakan publik, yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di pentas politik untuk mangaktualisasikan kemampuannya. Hal tersebut tidak hanya selaras dengan tujuan pembangunan nasional, tetapi juga karena jumlah perempuan adalah separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila ada wakil yang dapat menyuarakan aspirasi politik mereka. Sehingga perempuan harus menjadi salah satu pihak yang mengambil peran dalam menentukan kebijakan publik.

Selama ini anggota legislatif wanita di Kabupaten Badung tidak fokus hanya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, namun mereka mengurus

permasalahan secara umum, disesuaikan dengan komisi yang didapatnya. Program tentang perempuan, perlindungan anak, dan sejenisnya sudah diperjuangkan oleh semua anggota dewan. Namun, apabila ada isu-isu penting yang menyangkut pemberdayaan, perlindungan, dan kesejahteraan perempuan dan anak, biasanya anggota legislative perempuannya lah yang paling pertama peka terhadap masalah tersebut.

Peran perempuan Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik. Oleh karena itulah harus adanya gerakan yang mendorong untuk terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender. Peminggiran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik semakin berkembang tatkala pengambilan keputusan politik dilakukan di lembaga politik yang jauh dari jangkauan rumah tangga.

Kebijakan yang sensitif gender adaah kebijakan yang mencerminkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara (Syaifudin, 1996). Di dalam lingkup publik, sumberdaya dialokasikan melalui kebijakan publik. Alokasi sumberdaya dalam lingkup publik pun terbukti tidak memberikan kesempatan yang sama berdasarkan gender. Pilihan-pilihan dan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan sangat terbatas akibat proses sosialisasi yang selama ini ada, menyebabkan perempuan harus melalui banyak rintangan ketika akan memasuki aena politik dan kebijakan. Politik dan kebijakan dipercaya sebagai dunia laki-laki. Bahkan memasuki dunia ini masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kodrat perempuan. Oleh karena itu berbagai program kebijakan dari pusat harus ditelaah apakah sesuai dengan kenyataan di dalam masyarakat. Norma yang selama ini sering digunakan sebagai acuan perlu ditinjau kembali, agar kebijakan yang yang diambil tepat sasaran.

Penyeragaman kebijakan tidak dapat diterapkan karena peran gender berbeda baik antar tempat, waktu, dan kelas sosial ekonomi masyarakat.

4.4 Implikasi Pada Dunia Pendidikan

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, satu diantaranya adalah kurangnya partisipasi *(under-participation).* Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari, 2005). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan yang menjadi pimpinan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama dengan jumlah laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis. Dimensi yang lain yaitu dimensi penguasaan dimana kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula faktor pemanfaatan tenaga perempuan yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.

Gambar 20
Edukasi untuk meningkatkan partisipasi
politik dikalangan perempuan
Sumber: KPUD Kabupaten Badung

Melalui peningkatan partisipasi politik perempuan, maka kesenjangan gender yang terjadi di dunia pendidikan dapat diminimalisir. Hal ini karena ketika seorang tokoh politik perempuan menduduki jabatan tertentu, maka kebijakan yang diambil akan cenderung dilandasi oleh gerakan emansipasi. Di Kabupaten Badung, ketika perempuan menduduki jabatan politik, maka perempuan akan meningkatkan kualitas pendidikan untuk laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang sama, tanpa membeda-bedakan. Satu hal yang penting bahwa perempuan harus mengenyam pendidikan yang setinggi mungkin, karena perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Perempuan juga merupakan sosok suri tauladan utama bagi anak-anak penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya. Perempuan juga mesti memiliki

kemampuan dalam IPTEK. Hal ini karena selama ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam motivasi dan rangsangan penguasaan IPTEK. Apalagi saat ini Indonesia sudah karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah memasuki segala lini kehidupan, baik pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, masih terdapat sejumlah masalah dalam pengembangan karier sarjana perempuan di bidang IPTEK. Masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Wulur,1992):

a) Anak laki-laki lebih diutamakan untuk bersekolah, masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih memerlukan pendidikan dari pada perempuan
b) Dalam pola pendidikan, anak laki-laki sampai besar lebih mendapat rangsangan untuk menekuni bidang IPTEK
c) Ada pendapat *stereotype* bahwa IPTEK tidak cocok untuk perempuan, tidak sesuai dengan bakat perempuan
d) Anak perempuan tidak ada panutan dalam bidang IPTEK, nama-nama yang menonjol biasanya laki-laki (perempuan kurang mempunyai *role-models*)
e) Keluarga kurang mendukung pengembangan karier perempuan, pandangan masyarakat tidak menguntungkan pihak perempuan
f) Ada angapan bahwa makin tinggi pendidikan perempuan, makin sulit mendapatkan jodoh
g) Perempuan lebih mengutamakan keluarga, dan pada umur produktif sering sibuk dengan urusan rumah tangga karena mengurus anak kecil, sehingga kurang waktu untuk studi, pekerjaan, maupun pengembangan karir.
h) Dalam pembagian kerja di rumah tangga belum ada pemerataan tugas antara suami-istri. Hal ini terkait dengan konsep diri bahwa perempuan adalah di

rumah, mengurus rumah tangga. Anak perlu mendapat perawatan, maka tidak adanya pemerataan pembagian tugas antara suami istri menjadi penghambat bagi ibu rumah tangga untuk berperan di luar rumah tangga.

Padahal berdasarkan berbagai penelitian diperoleh informasi bahwa perbedaan kemampuan (potensi) alamiah antara perempuan dan laki-laki sangat kecil sekali. Hal ini sependapat dengan Suwarno (1995), bahwa seseorang dapat mengembangkan secara penuh baik sifat maskulin maupun sifat feminin pada dirinya, sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara penuh (Lips dan Colwill, 1978). Seseorang yang tanpa memandang jenis kelamin mampu mengembangkan unsur *maskulin* disebut mempunyai perilaku *androgini*. Di Bali, meskipun terdapat perkembangan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kemitrasejajaran, namun dibanding daerah lain relatif lambat. Hal ini sebagai akibat dari hambatan faktor nilai-nilai budaya tradisional yang masih dianut masyarakat (Hanartani, 1997).

Untuk menciptakan kesetaraan gender, tidak boleh ada alasan untuk membatasi salah satu gender untuk menekuni bidang-bidang kegiatan yang ada di sektor publik di dalam masyarakat luas. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu perempuan jauh lebih unggul dibandingkan laki-laki.

Adapun langkah konkrit yang bisa diambil agar keberadaan perempuan dalam dunia politik memeberikan implikasi di bidang responsif gender, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPPA) mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.

b) Kemendiknas mengkaji kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No. 84/2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota dan untuk memperkuat pelaksanaan Keputusan Menteri yang bertujuan mencapai pendidikan yang responsif gender dengan pengembangan kapasitas di semua tingkatan dalam sistem pendidikan.
c) Kemendiknas dan Kemenag melakukan penilaian terhadap sejumlah sekolah sampel di beberapa lokasi geografis yang berbeda tentang cara-cara pengintegrasian kebijakan gender dalam rencana dan pelaksanaan manajemen sekolah.
d) Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dengan menggunakan perspektif gender, Peraturan Pemerintah tentang Anggaran propinsi dan kabupaten/kota, dan Peraturan Kemendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 119/2009 tentang Anggaran responsif gender.
e) Kemendiknas dan Kemenag memberikan lebih banyak perhatian pada provinsi yang belum berhasil dalam menurunkan rasio paritas gender, transisi dan angka putus sekolah, dengan membuat rancangan strategi berdasar kebutuhan yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor dasar yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian indikator di propinsi dan kabupaten/kota.

f) Kemendiknas mempercepat program pelatihan yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan data terpilah berdasar gender, analisa dan perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk indikator tertentu.
g) Mempercepat program yang ada yang terkait akses pendidikan dan memprioritaskan provinsi yang memiliki kesenjangan paritas gender yang signifikan dalam indikator pendidikan. Ini termasuk Program Sekolah Satu Atap (gabungan SD dan SMP), Sekolah Kecil, Sekolah Satelit di daerah miskin dan terpencil dan program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat. Meningkatkan cakupan dan kualitas program pemerataan (Paket A, B dan C), khususnya jika disparitas rasio gender terjadi pada angka putus sekolah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Perlu juga dilakukan kajian untuk melihat efektifitas skema yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan gender.
h) Mengembangkan kebijakan dan mensinkronisasinya di tingkat nasional, daerah dan sekolah untuk memastikan bahwa perempuan yang menikah dini, hamil dan ibu muda bisa melanjutkan pendidikan. Melaksanakan kampanye untuk membangun kesadaran akan pentingnya mengurangi insiden pernikahan dini dan mendorong kelangsungan pendidikan bagi laki-laki, dan apalagi perempuan yang menikah dini.
i) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK perlu mengkaji kurikulum pelatihan guru untuk memperbaiki penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga responsif gender.
j) Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dan meningkatkan penyediaan buku teks pelajaran yang

peka gender pada semua tingkat pendidikan, termasuk teks, gambar dan akses yang sama terhadap kegiatan ekstra-kurikuler olahraga, seni dan sains.

k) Kemendiknas memastikan mekanisme pembiayaan pendidikan bersifat responsif gender. Misalnya, ketika membiayai infrastruktur dan rehabilitasi sekolah baru, dan merancang bangunan sekolah, maka harus memenuhi kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan. Di SMP dan SMA, perlu ada fasilitas sanitasi yang terpisah dan memadai bagi perempuan, untuk keperluan terkait menstruasi.

l) Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang jelas, yang mengatur penempatan laki-laki dan perempuan yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan, terutama dalam posisi kepemimpinan, manajemen, dan akademik di semua tingkatan pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan parlemen).

Kehadiran wanita dalam kursi legislatif harus memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pendidikan. Ia mengakui bahwa untuk menjalankan amanat dan aspirasi masyarakat dengan baik, diperlukan kompetensi yang memadai. Kompetensi bisa saja diperoleh dari bakat dan pengalaman, namun untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi tersebut, diperlukan pula gelar pendidikan. Walaupun seseorang memiliki kompetensi dan potensi yang baik dalam memimpin, namun tingkat pendidikan yang ditempuhnya masih rendah, maka sulit pula untuk memperoleh pengakuan di masyarakat. Maka dari itu, mengedepankan kepentingan pendidikan dalam setiap langkah pengabdiannya untuk masyarakat. Anggota dewan asal Ungasan ini selalu menjalin komunikasi dengan setiap

kepala sekolah di wilayah Desa Ungasan. Senantiasa memantau bagaimana perkembangan pendidikan generasi muda di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan karena seorang perempuan menyadari bahwa melalui pendidikan, maka masa depan bangsa dapat diselamatkan. Generasi muda adalah calon penerus pemimpin masa depan, maka dari itu harus pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijadikan prioritas.

4.5 Implikasi Pada Perencanaan Karir Perempuan

Karir adalah keahlian yang diamalkan di masyarakat atau dijadikan sumber kehidupan. Umumnya karir bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk mendukung dirinya atau keluarganya, sebagai usaha seseorang mengembangkan dan memajukan dirinya dalam menjalani suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghargaan atau penghasilan, bisa berupa uang atau dalam bentuk lainnya. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa apapun yang dilakukan itu bisa dianggap dan dimasukkan sebagai karir sepanjang seseorang mau berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, mempergunakan kemampuannya itu untuk mendapatkan sesuatu apakah berupa uang atau setara nilainya dengan uang. Selama ini banyak orang berpendapat bahwa karir merupakan pekerjaan yang bisa diperoleh di bidang politik, bidang ekonomi, atau di bidang ekonomi, dan umumnya dihubungkan dengan pekerjaan di kantor, di DPR, di pemerintahan, atau di perusahaan tertentu. Apabila dianggap semua yang dilakukan yang bisa meningkatkan kemampuannya dan bisa meningkatkan taraf hidupnya, bisa dianggap sebagai karir, maka hal ini akan merangsang perempuan untuk menunjukkan kelebihannya. Setiap perempuan, sebenarnya memiliki potensi untuk berkarir. Hal yang menentukan berhasil tidaknya seorang perempuan untuk berkarir, tergantung seberapa besar niat dan keberanian seorang perempuan untuk memberdayakan

potensi yang ada di dalam dirinya. Faktor lainnya adalah keampuan seorang perempuan untuk memimpin dan melihat suatu hal/permasalahan secara holistik atau menyeluruh (Suryani, 2003).

Di Bali, kedudukan yang diperoleh perempuan dalam karirnya, bukan karena belas kasihan atau agar dikatakan bahwa pemerintah Bali sudah menjalankan emansipasi, tetapi karena memang perempuan itu mempunyai kemampuan dalam menempati jenjang karirnya. Dengan adanya pandangan ini kiranya pembangunan di Bali tidak didasarkan atas perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai mitra kerja dalam membangun daerah Bali.

Biasanya perempuan karir memiliki kelas pergaulan yang sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan. Ada yang dijuluki kaum borjuis, jetset, hingga kaum materialis. Perempuan karir biasanya cenderung mulai mempunyai status di masyarakat. Pergaulannya, kebiasaan, budaya, atau nilai moralnya mulai bergeser. Seorang perempuan karir harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan memposisikan diri di lingkungan ia berada. Semisal seorang perempuan yang sudah bergelar professor, di rumah suaminya ia bersikap baik dan melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan, karena tidak mahir membuat *banten*, tidak terlalu mahir dalam urusan adat. Ketika seorang perempuan berada di kantor, mungkin saja perempuan tersebut memiliki jabatan sebagai pemimpin perusahaan. Namun ketika sudah sampai di rumah, perempuan tersebut harus memposisikan diri sebagai ibu yang mengayomi anak-anaknya, menjadi istri yang mendampingi suami. Terkadang hal ini yang tidak banyak diperhatikan oleh perempuan karir pada umumnya, sehingga ini menjadi salah satu faktor mengapa seorang perempuan sulit untuk memperoleh izin, waktu, dan kesempatan untuk berkarir (Suryani, 2003).

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kesetaraan gender hanya dapat berlaku pada perempuan muda yang belum menikah (ini pun hanya sementara saja), atau perempuan yang tidak mempunyai anak, atau perempuan yang benar-benar menarik diri dari kehidupan berkeluarga, dan mengabdikan seluruh hidupya untuk pengembangan karir. Namun perempuan yang masuk dalam kategori ini dapat dihitung atau hanya beberapa persen saja. Para perempuan yang semula memutuskan hidupnya untuk berkarir (bukan bekerja untuk menyambung hidup), memang dapat mencapai posisi yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, bahkan dapat lebih unggul dari laki-laki. Namun kondisi seperti ini akan berakhir manakala perempuan tersebut telah mencapai usia di atas tiga puluh lima tahun, yaitu dimana perempuan telah berpikir secara matang tentang makna keperempuanannya. Banyak dari para perempuan ini akhirnya memutuskan untuk mempunyai anak dan membina kehidupan keluarga (Nugroho, 2008).

Menjadi seorang perempuan merupakan posisi yang tidak mudah, karena secara naluri di muncul urusan domestik, urusan rumah tangga yang terbentang luas dan secara logika, ambisi muncul untuk bersaing dengan kaum laki-laki dan sesama perempuan, dan kedua-duanya ingin diraih untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Terkadang di dalam diri seorang perempuan muncul konflik dalam mencapai kebahagiaan itu, apakah harus memilih karir sebagai perempuan untuk mengurus rumah tangga atau memilih karir di luar rumah tangga dengan menjadi pengusaha atau tokoh masyarakat. Pergolakan di dalam diri perempuan dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dalam darah yang berubah setiap periode menstruasi dan akan menurun pada fase klimakterium. Hal ini sangat besar peranannya dalam mendorong semangat juang perempuan dalam berkarir. Disamping itu, peranan yang tidak kalah

pentingnya yang menghantarkan perempuan berhasil sukses dalam karirnya adalah apakah ia memiliki otak jantan (*male brain*) atau otak betina (*female brain*). Perbedaan karakteristik dari otak jantan dan otak perempuan adalah: otak jantan (terutama dalam bekerja) lebih pandai matematika dan pemikiran ruang (*spatial reasoning*) dengan karakterisktik agresif, tidak emosiaonal, aktif, berorientasi kerja, objektif, intelektual, percaya diri, dan berdikari. Sedangkan otak betina memiliki potensi lebih dalam bicara, pandai dalam bahasa, kesadaran dalam pengindraan, daya ingatan, kesadaran dalam sosial, dan hubungan personal, dengan karakteristik: kurang agresif, emosional, pasif, tergantung, subjektif, bicara banyak, penuh kehangatan, sensitif, lemah lembut, kooperatif, dan membutuhkan rasa aman. Disamping itu, keadaan perempuan sangat ditentukan pula apakah ia mempunyai belahan otak sebelah kiri atau belahan otak sebelah kanan yang berkembang lebih banyak yang membedakan dalam menyelesaikan masalah. Apabila otak bagian kiri yang leboh banyak berperan, maka seseorang cenderung menggunakan logika. Sedangkan apabila otak bagian kanan yang lebih berkembang, maka seseorang akan lebih banyak menggunakan intuisi. Disamping itu, pandangan dan kepercayaan masyarakat tentang perempuan dan kesempatan yang mungkin bisa dikembangkan oleh wanita mempengaruhi gerak langkah perempuan tersebut (Suryani, 2003).

Melalui semakin besar keterlibatan perempuan dalam dunia politik, maka perempuan akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan karir di luar rumah tangga. Perempuan tidak akan lagi menjadi peran subordinasi. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka stereotip pencitraan peran yang membedakan kemampuan seseorang dalam berperan berdasarkan perbedaan biologis akan terus melembaga. Tradisi membedakan gender dan peran gender dalam masyarakat akan menimbulkan rigiditas dikotomi

perilaku dalam konteks laki-laki versus perempuan yang cnderung mendorong orang untuk mempersepsikan perempuan sebagai objek dibanding perseorangan dengan keunikan kualitas tersendiri. Selain itu, perempuan diminta berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi pekerjaan yang dianggap masayarakat sebagai kodrati perempuan tetap dituntut untuk dilakukan sendirian oleh perempuan. Perempuan rumahan terkadang risau karena menganggap posisinya bukan wujud positif manusia pembangunan karena tidak mampu berprtisipasi dalam konteks yang lebih luas (yang diurus hanya suami dan anak, bukan bangsa) (Nugroho, 2008).

Dari banyak kepustakaan tentang perumusan kebijakan publik, terdapat beberapa alternatif penjelasan mengenai bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Karena aktivitas inti perumusan kebijakan adalah melirik berbagai alternatif yang berkaitan dengan masalah kebijakan, maka alternatif penjelasannya adalah menggunakan model-model pembuatan keputusan di antaranya model rasional komprehensif, model inkremental, dan model sistem (Negara, 2010).

Saat ini, wanita mulai mempunyai lebih banyak kesempatan untuk penempatan serta kemajuan karir dari pada sebelumnya. Wanita dapat melakukan berbagai upaya untuk menghadapi segala rintangan untuk memanfaatkan pendidikannya. Baik pria maupun wanita melihat pekerjaan dalam keluarga dan dalam jabatan sebagai sumber dari kesejahteraan *(weel-being)* dan pemenuhan *(fulfillment)* (Munamdar, 2010).

Sumber-sumber yang membantu keluarga berkarir dua secara konseptual meliputi sumber-sumber personal, relasional, dan sosietal. Sumber-sumber pribadi mencakup karakteristik yang unik, seperti atribut kepribadian, sumber finansial, kemampuan untuk menangani stress dalam hidup, keyakinan mengenai cinta dan pekerjaan, realitas siklus

kehidupan, dan sebagainya. Sumber-sumber keluarga menyangkut dukungan sensitivitas pasangan. Paling esensial ialah dukungan dari partner perkawinan, kemudian dari anak-anak, dan dari orang tua serta teman-teman. Makin suportif pasangannya, makin supportif pula anak-anak. Sumber-sumber dan dukungan sosial/masyarakat meliputi antara lain: fleksibilitas dari jadwal kerja, atasan yang mendukung keluarga, dan kebijakan tentang benefit. Tersedianya perwatan dan Pengasuh anak yang memadai, serta jaminan yang kesehatan yang baik (Munamdar, 2010).

Perkembangan studi perempuan atau studi gender di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan studi gender di berbagai negara. Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1975 melahirkan perspektif *Women in Development* (WID) yang menuntut agar terdapat persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi akan meningkatkan posisi ekonomi perempuan, sehingga mereka percaya status dan kedudukan perempuan akan meningkat di masyarakat. Menurut A. A. I. N. Marhaeni (2008) konsep WID adalah memfokuskan pada perubahan situasi, yang bertujuan untuk menarik dan menempatkan perempuan dalam arus pembangunan, karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang melimpah, yang dapat menggerakkan roda pembangunan, asalkan kemampuan mereka ditingkatkan.

Erat kaitannya dengan paradigma *Women In Development* (WID), diperkenalkan konsep *Gender and Development* (GAD) dimana studi tentang perempuan dihubungkan dengan laki-laki. Dengan perspektif gender wacana tentang perempuan sekaligus dihubungkan dengan laki-laki, dimana dominasi dan subordinasi laki-laki terhadap perempuan menjadi kajian utama. GAD menekankan pada redistribusi kekuasaan dalam relasi sosial perempuan dan laki-laki, dimana kekuasaan laki-laki di

bidang ekonomi, sosial, dan budaya terus dipertanyakan. Dalam pendekatan ini dipandang bahwa yang menciptakan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan adalah struktur dan proses sosial politik. Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan dan manfaat, serta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu pendekatan dalam GAD ini adalah masyarakat dan berbagai institusi mengubah cara berpikir dan praktek untuk mendukung persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan. Di Kabupaten Badung, beberapa anggota legislatif perempuan yang sudah/sedang menjabat menyatakan bahwa dengan terlibat dalam kegiatan politik, maka perempuan dapat lebih leluasa dalam melakukan perencanaan karir. Dimana melalui perencanaan karir yang baik, perempuan dapat mengambil peran lebih banyak untuk mengabdi dalam berbagai hal, misalnya dalam mengambil kebijakan publik, mengembangkan perekonomian, dan bahkan memimpin masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa generasi muda perempuan di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa antusiasme politik generasi muda perempuan sangat bervariasi. Ada yang sangat berminat untuk terjun dalam politik dan mulai mempersiapkan diri dari sekarang, namun ada pula yang sama sekali tidak berminat untuk terlibat dalam dunia perpolitikan. Hasil wawancara dengan Ketua KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) PC Badung yaitu Putu Diah Praba pada 22 Juli 2016, menyatakan bahwa ia melihat partisipasi politik perempuan di kabupaten Badung sudah cukup baik, walaupun terkadang masih ada yang maju hanya untuk formalitas saja yaitu guna memenuhi kuota 30% tersebut. Selaku salah satu perempuan muda yang memiliki banyak peran dalam pergerakan mahasiswa Hindu di kabupaten Badung, ia menyatakan bahwa tidak memiliki minat untuk maju sebagai calon legislatif, melainkan ingin berbisnis dan membangun sosioenterpreneur. Namun

sebagai pimpinan organisasi, ia melihat kiprah perempuan di ranah politik, pemerintahan maupun sektor lainnya telah menginspirasi para remaja untuk mengambil peran dan bahkan sebagai proyeksi karir. Dikatakannya, banyak perempuan yang tidak segan-segan lagi bercita-cita sebagai legislator, senator atau bahkan jabatan eksekutif. Sehingga keberadaan perempuan di ranah publik sangat menginsprasi dalam perencanaan karir.

Beda halnya dengan pendapat aktivis muda perempuan di Kabupaten Badung yang lain, menyatakan bahwa beberapa organisatoris muda perempuan di beberapa organisasi muda Hindu di Badung mengaku termotivasi untuk berkecimpung ke dunia politik dan menjadikan dunia politik sebagai salah satu agenda dalam perencanaan karirnya. Hal ini karena segala kebijakan disusun oleh orang-orang yang yang duduk di kursi politik. Ketika ingin melakukan perubahan atau berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, setidaknya harus masuk ke dalam sistem pembuat kebijakan politik itu sendiri, dengan kata lain harus masuk ke dalam alur pembuatan kebijakan itu sendiri. Kemampuan atau potensi perempuan dan laki-laki sesungguhnya sama. Seorang legislator dianggap sukses bila mampu menjabarkan bagaimana aspirasi konstituennya. Kecerdasan itu perlu, namun yang lebih penting adalah bagaimana membawa aspirasi konstituen (masyarakat) untuk ke kebjiakan yang sesuai aspirasi masyarakatnya. Hal lain lagi yang membuat beberapa aktivis muda perempuan tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik, satu diantaranya adalah perempuan masih sangat dibutuhkan di kursi legislatif. Perempuan memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Dalam melakukan pekerjaan, perempuan cenderung mengandalkan hati nurani, emosinya cenderung stabil, perempuan memiliki insting yang kuat dalam mengambil keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perempuan cenderung

diberikan sentuhan feminis, sehingga kebijakan yang diambil akan jauh lebih manusiawi dan humanis. Selain itu, dalam praktiknya perempuan biasanya tidak hanya bermain logika, namun melibatkan intuisi sehingga penglihatannya lebih holistik dan solusi pemecahan masalah menjadi jauh lebih variatif.

Perempuan memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan. Apalagi dalam bidang ekonomi, perempuan merupakan pihak yang paling sering berkecimpung langsung dalam hal perekonomian masyarakat. Sehingga perempuan yang tahu persis mengenai bagaimana keadaan ekonomi sesungguhnya, sehingga ketika seorang perempuan menduduki jabatan sebagai seorang legislator atau penyalur aspirasi masyarakat, maka ia akan cenderung membuat regulasi yang baik untuk melindungi konsumen. Terkait dengan menyalurkan aspirasi masyarakat, perempuan jauh lebih bisa berbaur dengan masyarakat bawah sehingga lebih mudah untuk mendengarkan curahan hati masyarakat. Apabila demikian, maka kebijakan yang diambil pemerintah menjadi tepat sasaran, karena kebijakan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat secara langsung.

Adapun hal yang dapat dilakukan untuk lebih memotivasi perempuan guna lebih banyak berkecimpung dalam dunia politik adalah perempuan harus sadar dan mengetahui bahwa mereka memiliki peranan penting dan dibutuhkan untuk terjun dalam dunia politik. Perempuan harus lebih berani mendobrak untuk daerah yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Hal ini dilakukan agar walaupun suatu daerah menganut budaya patriarki, namun kesetaraan gender harus tetap diperjuangkan.

Perempuan karir merupakan perempuan yang mampu mengatur waktu untuk melakukan segala aktivitas dan kesibukannya dengan baik. Perempuan karir akan

terkesan jauh lebih bergairah dalam menjalankan kesehariannya. Terkhusus perempuan dalam karir politik, merupakan perempuan yang dapat dikatakan memiliki otak baja, otot baja, hati baja (kuat) namun tetap diselimuti sikap kasih sayang seorang ibu. Akan menjadi nilai tambah bagi seorang perempuan bila memiliki niat untuk tidak hanya mengabdi bagi keluarga, tapi mengabdi pula pada masyarakat luas, pada bangsa dan negara. Menjadi kebanggaan bagi seorang perempuan bila bisa turut serta menyumbangkan pemikiran untuk menentukan arah pergerakan bangsa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Dinamika politik di Kabupaten Badung sangat menarik untuk dikaji. Walaupun Kabupaten Badung sebagai barometer politik di Provinsi Bali dan gencarnya arus informasi di wilayah yang terkenal dengan pesona pariwisata ini, namun perempuan tetap tidak berdaya dalam pertarungan politik. Pada pemilu legeslatif tahun 2009, hanya satu orang calon perempuan yang terpilih. Demikian pula pada pemilu 2014, Caleg perempuan yang terpilih hanya satu orang atau jika dipersentasekan hanya 2,7% dari keseluruhan 40 orang anggota legeslatif. Sementara jumlah laki-laki yakni 39 orang atau 97,5%. Hal serupa juga berulang pada pemilu legeslatif tahun 2014 yakni hanya satu calon perempuan yang berhasil duduk di anggota DPRD Kabupaten Badung. Tiga orang berikutnya, diantaranya dua orang perempuan menjadi pengganti antar waktu (PAW) karena mundur sebagai anggota legeslatif. Kuota 30 persen perempuan tidak dapat dipenuhi di Kabupaten Badung. Berbagai faktor menjadi dasar penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan Hindu dalam Pemilu seperti budaya Patriarki, stigma politik hegemoni laki-laki, pembagian kerja keluarga Hindu, keberadaan perempuan yang relatif awam berpolitik, keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan dunia politik yang masih identik dengan kecurangan serta tingginya biaya politik. Laki-laki masih tampak menghegemoni pertarungan politik di Kabupaten Badung.

2. Dalam tataran konsep, menurut susastra Hindu, tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Malah

sastra menganjurkan agar perempuan tampil sebagai pelopor, perintis maupun ahli pidato. Ini mengindikasikan perempuan yang memiliki kompetensi tertentu harus mengambil peran publik. Gambaran umum tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang sangat rendah. Pada semua tingkat pengambilan keputusan, baik pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam birokrasi pemerintahan, partai politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Dalam hal ini rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam politik terjadi di Bali, yakni pada jajaran eksekutif. Diperlukan peningkatan SDM perempuan untuk tampil mengambil peran publik termasuk berpolitik. Diperlukan peningkatan pendidikan sampai pada kemampuan tertentu yang diperlukan seperti kemampuan berkomunikasi, terlebih komunikasi politik hingga pada kemampuan personal lain yang dapat diandalkan. Namun demikian, perempuan selalu hadir dalam ranah publik dari waktu ke waktu, akan tetapi jumlahnya masih sangat minim.

3. Kegiatan politik perempuan memberikan implikasi yang sangat luas. Dalam bidang politik dan sistem demokrasi, kehadiran perempuan akan membawa perubahan yang besar, memecah sistem politik keras yang didominasi kaum laki-laki. Perempuan yang masuk dalam ranah politik, memberikan dampak positif dalam pembangunan di Indonesia. Secara politis, perempuan dianggap lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat, karena kemampuan khusus yang dimiliki berupa ketajaman hati dan kehalusan budi yang dipadukan dengan kecerdasan pikiran. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik membawa perubahan yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perempuan sudah mulai berani

menyuarakan hak-hak kaumnya dan mulai memikirkan masa depan bangsa dan negaranya. Keterlibatan perempuan dinilai banyak pihak sangat penting untuk pembangunan di Indonesia. Selain itu, berbagai kebijakan hukum dan perundangan digagas khusus bagi kaum wanita yang berimplikasi luas pada sistem hukum dan pemerintahan. Pada bidang sosial budaya, keterlibatan perempuan dalam bidang politik membawa perubahan yang sangat besar. Wanita tidak dipandang sebagai subordinat dengan peran domestik yang kental tetapi lahir perempuan cerdas yang mampu memberikan perubahan pada lingkungan sosial. Implikasi juga terjadi pada kebijakan publik, dimana perempuan sebagai penentu kebijakan publik yang lebih memihak kaum perempuan atau kebijakan publik yang benar-benar membawa perubahan yang lebih humanis. Selain itu, juga berimplikasi kuat pada dunia pendidikan, dimana wanita akan semakin bersemangat dalam menempuh pendidikan guna mempersiapkan diri. Kiprah perempuan juga berpengaruh pada perencanaan karir perempuan, dimana semakin banyak remaja perempuan yang bercita-cita untuk mengambil peran publik dan tampil dalam berbagai ranah yang selama ini dikuasai laki-laki.

5.2 Saran

1. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang selama ini menjadi barometer perhelatan politik di Kabupaten Badung dengan isu gender yang sangat santer terdengar. Sejak beberapa tahun belakangan, keterwakilan perempuan dalam legeslatif menjadi isu yang menggelinding dalam dunia politik. Namun demikian di Kabupaten Badung keterwakilan perempuan dalam kursi legeslatif tidak mencapai harapan 30 persen. Caleg perempuan masih minim duduk sebagai wakil rakyat dengan suara legeslatif yang kecil. Diperlukan berbagai

upaya guna meningkatkan partisipasi politik perempuan Hindu di Kabupaten Badung. Perempuan harus mengambil peran yang baik dalam bidang politik tanpa meninggalkan sifat-sifat keperempuanannya. Perempuan harus mempersiapkan diri secara baik untuk memenangkan kompetisi politik demi mengambil peran publik yang lebih luas. Mengingat masih rendahnya partisipasi politik kaum perempuan yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pendidikan yang masih relatif rendah, disarankan kepada pemerintah di Kabupaten Badung untuk serius dalam melakukan investasi pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa perempuan guna mempelajari politik dan kebijakan publik pada universitas terbaik di Indonesia dan luar negeri. Penting untuk memberikan beasiswa mempelajari *public policy* demi membangun SDM yang unggul.

2. Kungkungan adat menjadi salah satu faktor penyebab masih minimnya peran perempuan dalam panggung politik. Dalam keseharian masyarakat adat, wanita masih diidentikkan dengan peran marginal. Anggapan wanita masih tabu mengambil kiprah publik masih terasa walau Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang sangat maju di Bali. Dominasi laki-laki masih dirasakan oleh caleg perempuan dalam perhelatan pemilukada. Olehnya, desa adat sebagai elemen kuat masyarakat Bali harus turut memikirkan bagaimana meningkatkan kiprah perempuan dalam dunia politik. Lembaga adat harus berkembang dan memberikan ruang gerak yang tinggi bagi perempuan yang ingin terjun dalam dunia politik. Lembaga adat tidak lagi mengungkung perempuan dalam dunia marjinal dengan peran publik yang didominasi laki-laki.

3. Politik uang masih menggelayuti dunia politik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Badung. Tidak dapat disangkal, biaya politik yang tinggi, termasuk penggunaan uang dalam mendulang suara bukan isapan jempol semata. Dalam hal ini, selain pemerintah, partai politik mestinya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna membangun budaya politik bersih, rasional dan demokratis guna membangun bangsa kedepan. Kenyataannya, partai politik masih dijadikan kendaraan sementara guna kepentingan jabatan tertentu. Akibatnya, visi politik seseorang hanya bersifat pragmatis, demi sebuah jabatan tertentu, baik eksekutif maupun legeslatif. Kondisi ini akan sangat membahayakan karena masyarakat tidak mendapat pendidikan politik yang benar dan akan memilih wakilnya berdasarkan siapa yang mau memberikan bantuan, bukan siapa yang memiliki kompetensi guna melakukan pelayanan masyarakat di bidang politik. Olehnya, kedepan, pemerintah, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat harus bekerjasama membangun budaya politik yang sehat, bersih dan mengutamakan semangat demokrasi, bukan hanya demi kepentingan sesaat semata. Sebab hanya dengan demikian, masyarakat akan cerdas berpolitik dan memilih wakilnya berdasarkan kompetensi, kemampuan dan dedikasi yang tinggi demi kemajuan bangsa dan Negara.

5.3 Temuan

1. Adanya hegemoni pada tataran konsep kultural ideologi menempatkan perempuan Hindu di Kabupaten Badung mengalami kesulitan yang mendasar dalam partisipasi politiknya. Konsep kultural ideologi laki-laki dan perempuan dalam peran kewajaran di masyarakat patriarkal membuat perempuan berada pada posisi yang disebut oleh Gayatri C. Spivak sebagai posisi sub-altern.

Kondisi ini ternyata masih sangat nyata dan menonjol walau di era modernisasi dan gerakan feminis dunia serta upaya meningkatkan peran perempuan yang dilakukan oleh negara. Salah satu ciri masyarakat modern dan post modern adalah menganut nilai-nilai baru dan meninggalkan kekolotan atau nilai-nilai yang dianggap kuno. Namun tidak demikian halnya dengan kultural idiologi patriarki yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya.

2. Konsep-konsep demokrasi serta feminis yang membuahkan afirmasi kuota 30% Anggota Legislatif di parlemen masih belum banyak membantu untuk melahirkan lebih banyak perempuan Hindu di Kabupaten Badung untuk terjun ke dunia politik maupun birokrasi. Sebagian besar dari mereka yang masuk dalam DCT Pemilu Legeslatif hanya sebagai pelengkap untuk partai bisa mendaftar, namun tidak 'bertarung habis-habisan' untuk menjadi anggota legislatif. Banyak diantaranya tidak bersungguh-sungguh ingin merebut kursi legeslatif melainkan menggunakan faktor keberuntungan atau kebetulan terpilih. Para calon legeslatif perempuan yang terdaftar dalam DCT dan secara resmi mengikuti Pemilu Legeslatif sebagian besar belum terbangun sikap mentalnya untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara melalui jalur politik.

3. Kemunculan phobia politik di kalangan perempuan cenderung meningkat. Sebagian besar Caleg perempuan yang tidak berhasil menduduki posisi sebagai anggota legeslatif tidak ingin terjun kembali di dunia politik bahkan tidak mau membicarakan politik. Hal ini terbukti dengan sejumlah Caleg perempuan tidak mau diwawancarai mengenai politik atau tidak mau membahas soal pencalonan yang bersangkutan yang lalu.

Kondisi ini sangat berbahaya mengingat perempuan tidak boleh apatis dalam dunia politik, briokrasi maupun tata negara. Phobia politik mengindikasikan sejumlah hal seperti kerasnya persaingan dalam dunia politik, dunia politik yang identik dengan kecurangan dan persaingan tidak sehat atau lemahnya mental para politisi.

4. Dunia politik di Kabupaten Badung ternyata masih dipersepsikan sebagai 'dunia hitam' karena politik masih identik dengan kecurangan dan intrik yang tidak sehat. Permainan-permainan kotor seperti politik uang masih sangat kental dan bahkan diakui oleh sejumlah politisi, namun dianggap sebagai '*cost politic*.' Demikian pula kecurangan lain seperti intimidasi pemilih dan permainan curang saat penghitungan suara mulai dari TPS sampai penghitungan di tingkat kabupaten disinyalir banyak pihak masih terus terjadi. Dengan demikian, kesan Pemilu Legeslatif bukan memilih calon yang dianggap berkompeten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan bekerja untuk kemajuan daerah, tetapi terpilihnya orang-orang yang memiliki '*cost politic'* besar atau orang-orang yang memiliki kemampuan dan jaringan untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian tujuan utama aktivitas politik dalam Hindu yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap negara dan warga Negara melalui kepemimpinan para Ksatria secara ideal tidak tercapai. Peran para Ksatria yakni para politisi, tentara, dan birokrat sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan suatu negara

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Paran Gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agus, Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Agustino, Leo. 2009.*Pilkada dan Dinamika Politik Lokal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amasari. 2005. *Laporan Penelitian Pendidikan Berujatuasan Gender*. Banjarmasin: IAIN Antasari.

Ardika, I Wayan, 2004. Pariwisata Bali: Membangun Pariwisata Budaya dan Mengendalikan Budaya Pariwisata. Dalam I.N Darma Putra (e.d.), *Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Ardana, I Gusti Gede, 2007. *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global*. Denpasar: Pustaka Tarukan Agung-Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Ardana, I Gusti Gede.1982. *Sejarah Perkembangan Hinduisme*. Denpasar: Tanpa Penerbit.

Aripta Wibawa, Made.2006. *Wanita Hindu Sebuah Emansipasi Kebablasan***.** Denpasar: Panakom.

Arsana, Anak Agung Putra, (2011). Hasil Penelitian. Etos Kerja Perempuan Pedagang Acung Bali yang Bekerja di Sektor Pariwisata dan Kebertahanan Nilai Sosio-Kultural pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Perempuan Pedagang Acung di Kawasan Sentral Pariwisata di Provinsi Bali).

Apte, P.V. 1987. *Student Sanskrit English Dictionary*. New Delhi: Motilal Banarsidass.

Ashrama, B., I Gede Pitana dan I Wayan Windia (Eds). 2007. *Bali is Bali Forever Ajeg Dalam Bingkai Tri Hita Karana*. Denpasar: Bali Travel News bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Bali dan PT. Bali Post.

Aziz, Abdul, 2006. *Esai-Esai Sosiologi Agama*. Jakarta: Diva Pustaka.

Atmadja, Bawa IN., 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi.* Yogyakarta: LKiS.

Atmosudirdjo, Prayudi. 1982. Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran. Jakarta: Ghalia.

Pemerintah Provinsi Bali. 2009. *Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS Provinsi Bali

Basrowi & Sukidin, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.

Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. Bali Dalam Angka (*Bali On Figures*) 2009. katalog BPS: 1102001.51

Bali Sruti: Suara Milenium Development Goals. 2012. *Energi Baru Politisi Perempuan.* Edisi No 5 Januari-Maret 2012. Denpasar.

Bonar, S.K., 1987. *Teknik Wawancara.,* Jakarta: Bina Aksara.

Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitati.* Jakarta: Kencana.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Po* rta: Gramedia Pustaka Utama.

Connolly, Peter, 2002. *Aneka Pendekatan Studi Agama.* Yogyakarta: LKIS

Covarrubias, Miguel, 1972. *Island of Bali*. Oxford London: Oxford University Press.

Cohen Bruce J; tanpa tahun, Sosiologi Suatu Pengantar, penerbit Rineka Cipta.

Dayananda Sarasvati, 1981. *An Introduction to the Vedas*. Delhi: Sarvadesh Arya Pratinidhi Sabha.

Darma Putra, I Nyoman (Ed), 2004. *BALI Menuju Jagadhita*: Aneka Perspektif.

Dhavamony, Mariasuai, 1995. *Fenomenologi Agama.* Terjemahan oleh Kelompok Studi Agama Driyarkara. Yogyakarta: Kanisius.

Endraswara, Suwardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Faisal, Sanapiah, 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Goudriaan, T. 1980. *Sanskrit Texts and Indian Religion in Bali*, dalam Jurnal Vivekananda Kendra Patrika, Madras, India: February, 1980.

Gramsci, Antonio. 1992. Buttigieg, Joseph A, ed. *Prison Notebooks*. New York City: Columbia University Press.

Gramsci, Antonio. 2001. *Catatan-Catatan Politik*. Surabaya: Pustaka Promethea.

Hanartani. 1997. *Jurnal Warta Studi Perempuan*. Profil Kedudukan dan Peranan Wanita di NTB. Vol.5 (1).

Hemas, G K R. 2012. *Dari Perempuan untuk Kasih Sepanjang Peradaban*. Dalam Bali Sruti: Suara Milenium Development Goals. *Energi Baru Politisi Perempuan.* Edisi No.5, Januari-Maret 2012.

Hubeis. 1990. *Provincial Forest Economic Profiles, Ministry of Forestry & FAO*. Jakarta: Jakarta Post.

Halevy, Eva Etzioni, 2011. Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik. Penyadur: Sufiansyah, Ruraji dan Syahdi Rasyid. Yogyakarta: Totalmedia.

Haught, John F., 2004. *Perjumpaan Sains dan Agama Dari Konplik Ke Dialog*. Bandung: Mizan Pustaka.

Hariwijaya, H dan Triton P.B, 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Oryza.

Hendropuspito, D., 1983. *Sosiologi Agama. Jakarta*: Kanisius dan BPK Gunung Mulia.

Huntington, S. P. dan J. Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* Jakarta: Rineka Cipta. hal. 4.

Kahmad, Dadang, 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung.

Keraf, Gorys, 2003. *Argumentasi Dan Narasi*, Jakarta: Gramedia.

Kerepun, Kembar M, 2007. Kelemahan dan Kekuatan Manusia Bali (Sebuah Otokritik). Denpasar: Panakom.

Kimbal, Meredith. M. 1981. *International Journal of Womens*. Studies Women and Science: Acitique of Biological Theories. Vol 4(4).

Klostermaier, Klaus K. 1990. *A Survey of Hinduism*. New Delhi, India: Munshiram Manoharlal.

Koentjaraningrat, 1987. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Koentjaraningrat,1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Koentjaranigrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*.Jakarta: Aksara Baru.

Lubis Mochtar. 1994. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mahadevan.T.M.P. 1984. *Outlines of Hinduism*, Bombay, India: Chetana.

Maleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mantra, I. B.,1990. *Bali Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.

Marhaeni AAIN. 2008. *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Perspektif Untuk Studi Gender Ke Depan.* Diunduh dari dari: http://www.fe.unud.ac.id/ep/?page_id=269 pada 20 Juli 2016.

Mikkelsen, Britha, 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Mittal, Mahendra, TT. *Intisari Veda Pesan Tuhan untuk Kesejahteraan Umat Manusia*. Surabaya: Paramita

Moore, Henrietta L, 1998. *Feminism and Anthropology*. Terjemahan Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI. Jakarta: Obor.

Mosse, Julia Cleves,1996. *Half The World, Half A Chance An Introduction to Gender and Development (Gender dan Pembangunan)*. Penerjemah Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhadjir, Noeng, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhkyananda, Swami. 1996. *"Konsep Yajna Dalam Hindu" dalam Yajna Basis Kehidupan Sebuah Canang Sari*. Denpasar: Warta Hindu Dharma.

Munandar, S. C. Utami. 2001. *Wanita Karier: Tantangan dan Peluang. dalam Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Nordholt, Henk Schulte, 2010. Bali Benteng Terbuka 1995-2005, Jakarta: KITLV

Negara, Solahudin Kusuma. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, R. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pals, Daniel L., 1996. *Seven Theories of Religion*. Terjemahan oleh Ali Noer Zaman. 2001. Yogyakarta: Qalam.

Pandit, Bansi, 2006. *Pemikiran Hindu, Pokok-Pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafatnya untuk Semua Umur*. Terjemahan oleh IGA Dewi Paramita. Paramita: Surabaya.

Pemkab Badung. 2007. Buku Statistik Gender dan Analisis. Denpasar: Pemerintah Kabupaten Badung.

Poloma, Margaret, M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Pringgodigdo, A.G., 1973. *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius.

Putrawan, N. 2008. *Babad Bali Baru, Sejarah Kependudukan Bali 1912-2000*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.

Radhakrishnan.S. 1961. *Indian Philosophy*, terjemahan Poedjitomo. Yogyakarta: Letter Press.

Randall, Vicky. (1982). *Women* in *Politics*. New York.

Redig, I Wayan.1997. Ciri-Ciri Ikonografis Beberapa Arca Hindu di Bali: Studi Banding Dahulu dan Sekarang dalam *Dinamika Kebudayaan Bali*. Editor: I Wayan Ardika dan I Made Sutaba. Denpasar: Upada Sastra.

Ritzer, George & Barry Smart. 2001. *Handbook of Social Theory*. London: SAGA Publications.

Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda.* Jakarta: Rajawali Pers.

Semadi Astra, I Gde.1997. *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII*: *Sebuah Kajian Epigrafis*. Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sivananda, Swami.1991. *Hindu Fasts and Festivals*. Tehri-Garhwal, Sivananda-nagar: The Divine Life Society.

Sjaifudin, H. 1992. *Jurnal Warta Studi Perempuan*. Gender Marginalisasi dan Pekerjaan di Pedesaan, Wanita Pengusaha, Tenaga Kerja Upahan dan Tenaga Kerja di Jawa Barat. Vol. 3(2).

Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Masa Kini*. Denpasar: PT. Offset BP Denpasar.

Suwarno, B. 1995. *Warta Studi Perempuan*. Perilaku Androgini di Kalangan Wanita: Fajar Menyingsing Bagi Masa Depan Wanita. Edisi Khusus.

Sumadio, Bambang. 1976. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sarwono, Sarwito Wirawan, 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Scott, John. 2000. *Rational Choice Theory (from Understanding Contemporary Society: Theories of the Present)*. Edited by G. Browning, A. Halcli, dan F. Webster. Sage Publications.

Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surpi, Ni Kadek., 2009. *Konversi Agama Masyarakat Bali (Studi Kasus Konversi Agama Hindu ke Kristen Protestan di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung)* (Tesis) Program Pasca Sarjana Institut Negeri Denpasar.

Smith, Houston. Tanpa tahun. *Agama-Agama Manusia*. Terjemahan oleh Saafroedin Bahar, 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Strauss dan Corbin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sudarto, 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Stuart-Fox, David J.,2010. *Pura Besakih Pura, Agama, dan* Masyarakat *Bali*.Denpasar: Pustaka Larasan, Udayana University Press, KITLV-Jakarta.

Tamerius, Karin. L. 1995. "Sex, Gender, and Leadership in the Representation of Women," di dalam Geordia Duerst-Lahti dan Rita Mae Kelly (Eds.), Gender, Power, Leadership, and Governance. Michigan: The University of Michigan Press.

Thouless, Robert H, 2000. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Titib, I Made, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupa.,* Surabaya: Paramita.

Titib, I Made, 2003. *Teologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.

Titib, I Made, 2007. *Teologi Hindu (Brahmavidya): Analisis Teks dan Konteks Implementasi*. Bahan Ajar Program Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Titib, I Made. 2000. *Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.

Tjandraningsih. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Nuansa.

Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thougt*. Terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta; Penerbit Jalasutra.

Weber, M. 1920. '*Conceptual Exposition'. In Economy Society*. Edited by G. Roth dan C. Wittich.

Whaling, Frank. 2002. 'Pendekatan Psikologis' dalam *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Peter Connoly (ed). Yogyakarta: *LK*iS.

Wiana, I Ketut, 2001. *Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu I*. Surabaya: Paramita.

Wiana, I Ketut, 2004. *Mengapa Bali Disebut Bali?*. Surabaya: Paramita.

Wiana, I Ketut, 2008. *Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu* II. Surabaya: Paramita.

Wiana, I Ketut, 2015. *Berpolitik Menurut Hindu*. Surabaya: Paramita.

Wijayananda, Ida Pandita Mpu Jaya, 2004. *Makna Filosofis Upacara dan Upakara*. Surabaya: Paramita.

Wiana, I Ketut, 2015. *Berpolitik Menurut Hindu*. Surabaya: Paramita.

Zaehner, Robert C., 1992. *Kebijaksanaan Dari Timur* (*Beberapa Aspek Pemikiran Hinduisme*). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

TENTANG PENULIS

Dr. Si Luh Nyoman Seriadi, S.Pd, S.Ag, M.Pd

Kelahiran Desa Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali Tanggal 31 Desember 1964 dari pasangan Si Putu Sudita (Almarhum) dengan Siluh Ketut Rengkih, adalah dosen di IHDN Denpasar. Pendidikan SD ditamatkan di SD Tumbak Bayuh Mengwi Badung (1971-976), Pendidikan SMP ditamatkan di SMPN Sedang Abyansemal Badung (1976-1980), Pendidikan PGAHN Di Tamatkan di PGHN Denpasar (1980-1983), SI Pendidikan Bahasa Inggris ditamatkan di Universitas Muhammadyah Malang (1988-1993), S1 Pendidikan Agama Hindu ditamatkan di STHD Klaten (1998-2003), S2 Ditamatkan di Universitas Kanjuruhan Malang (2005-2008), S3 ditamatkan di IHDN Denpasar (2012-2017).

Pernah menjadi narasumber pendamping bersama Dr. Shri IGN Arya Wedakarna, dalam Seminar Internasional Spirituality In 21 Century, Di Pesraman Seruling Dewata, menjadi narasumber di Studium General di Jurusan Pendidikan Agama Hindu, menulis artikel jurnal kampus, proseding dan lain lain. Menjadi Ketua WHDI bidang Pendidikan di kota Malang, Menjadi ketua Penasehat WHDI di Kabupaten Malang.

ISBN 978-602-53968-2-3